



**LAPORAN
RENCANA KERJA
TAHUNAN
(RENJA)
Tahun 2020**

DINAS KESEHATAN
SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **B** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pembangunan di daerah, perlu disusun dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

6

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

- pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk priode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2020.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal **28 JUN 2019**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal **28 JUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR **13**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 telah selesai disusun. Selanjutnya diharapkan dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja bagi Dinas Kesehatan selama tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana kerja ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Program serta Kegiatan. Dokumen Rencana Kerja juga memuat indikator-indikator kinerja kegiatan berupa input, output dan hasil outcome yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Stubondo, 29 Juli 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SITUBONDO**



Drs. Abu Bakar Abdi, Apt, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19650525 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan.....	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.2.1 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	2
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	2
1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah.....	4
1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah	6
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja SKPD Perangkat Daerah	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	72
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	74
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	80
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	81

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional	82
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	83
3.3 Program dan Kegiatan	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	88
BAB V PENUTUP.....	112
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian	112
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	112
5.3 Rencana tindak lanjut.....	113

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel T-C.29
Lampiran 2	Tabel T-C.30
Lampiran 3	Tabel T-C.31
Lampiran 4	Tabel T-C.32
Lampiran	Tabel T-C.33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 disusun dengan latar belakang sebagai berikut :

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2020 dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai hasil rumusan dari Rencana strategis dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perumusan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Renja PD
 - a. Pengolahan data dan informasi.

- b. Analisis gambaran pelayanan PD.
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD.
- d. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- e. Penelaahan terhadap RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- h. Perumusan kegiatan prioritas

2. Tahap penyajian Renja PD

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memerlukan perencanaan kinerja pembangunan kesehatan yang baik sehingga dengan seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dan didapatkan hasil pembangunan kesehatan yang optimal dan tepat sasaran.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Selain itu penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja tahun 2020 sebagai berikut :

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan memiliki fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- j. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- k. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- n. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 440/2943.1/431.202.1.1/IX/2016 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 1.1 Jenis layanan dan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	Jenis Layanan Dasar	Pernyataan standar	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun mendapat skrening Kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 1.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan target pencapaian Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/DO/FORMULA SI PERHITUNGAN	2020
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup : rata - rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup	68,85
2	Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76	Jumlah nilai IKM Puskesmas > 76 / Jumlah Puskesmas x 100%	81 %
3	Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76	Jumlah nilai IKM Rumah Sakit > 76 / Jumlah Rumah Sakit x 100%	79 %

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja tahun 2020 sebagai berikut

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 dimaksudkan Menyelenggarakan pembangunan kesehatan berkesinambungan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja SKPD Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah

- Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2021.

- c. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat
- d. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan.
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
- f. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kesehatan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja , berisi :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- 2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi :

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2018 terdiri dari 4 indikator kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategic. Capaian kinerja (performance result) selama tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mencapai target dan 1 (Satu) indikator kinerja yang belum mencapai target. Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	AKI	110/ 100.000 KH	110/ 100.000 KH	141,6/ 100.000 KH kelahiran Hidup (13 bumil)
		AKB	15/ 1000KH	16/1.000 KH	13,2/ 1000 KH kelahiran Hidup (121 bayi)
		Prevalensi Gizi Buruk	1.90%	0,37%	0,29% (130 dari 44386 sasaran Balita)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase Puskesmas yang memiliki nilai IKM > 76	79%	76,00%	82.28%
		Prosentase Rumah Sakit yang memiliki nilai IKM > 76	78%	-	78.08%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada :

1. Angka Kematian Ibu Tahun 2018 lebih jelek/ rendah dari pada capaian Kinerja pada tahun 2017;
2. Angka Kematian Bayi Tahun 2018 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2017;
3. Prevalensi Gizi Buruk Tahun 2018 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2017;
4. Prosentase Puskesmas yang memiliki nilai IKM > 76 Tahun 2018 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2017
5. Prosentase Rumah Sakit yang memiliki nilai IKM > 76 Tahun 2018 lebih dari target

Tabel 2.2 Capaian kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	102/100.000 KH	141,6/100.000 KH kelahiran Hidup (13 bumil)	71,27 %
	Angka Kematian Bayi (AKB)	11/1000 KH	13,2/ 1000 KH kelahiran Hidup (121 bayi)	112 %
	Angka Prevalensi Gizi Buruk	1.7%	0,29% (130 dari 44386 sasaran Balita)	184,74%
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase Puskesmas yang memiliki nilai IKM > 76	82%	82.28%	104,15%
	Prosentase Rumah Sakit yang memiliki nilai IKM > 76	79,5%	78.08%	100,1

Data diatas dapat dijelaskan pada masing masing Indikator sebagai berikut :

2.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dampak Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di samping Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup (kh). Berdasarkan Laporan Kematian Ibu dari Puskesmas se Kabupaten Situbondo tahun 2018 jumlah kematian ibu adalah 13 kasus dengan masa kematian pada masa hamil 23% (3 kasus), masa persalinan sebesar 15% (2 kasus) dan masa nifas 62% (8 kasus). Dengan kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 9177 bayi, maka AKI kabupaten Situbondo tahun 2018 adalah 141,6 per 100.000

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan Kualitas pelayanan Ibu Nifas. Upaya percepatan penurunan AKI di Kabupaten Situbondo yang terus dilakukan hingga saat ini adalah sbb:

1. Peningkatan pelaksanaan ANC berkualitas
2. Optimalisasi aplikasi SI RISTI MESSEM dan tindaklanjutnya
3. Memaksimalkan GERDU PENAKIB di tingkat desa, kecamatan berikut jejaringnya
4. Penguatan rantai rujukan ibu hamil
5. Pengawasan ibu sejak hamil sampai dengan masa nifas dengan pemberian pelayanan sesuai standart.
6. Pembentukan kelas nenek asuh
7. Pembentukan kelas unmeetneed

Trend kematian ibu tahun 2013 s.d. 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

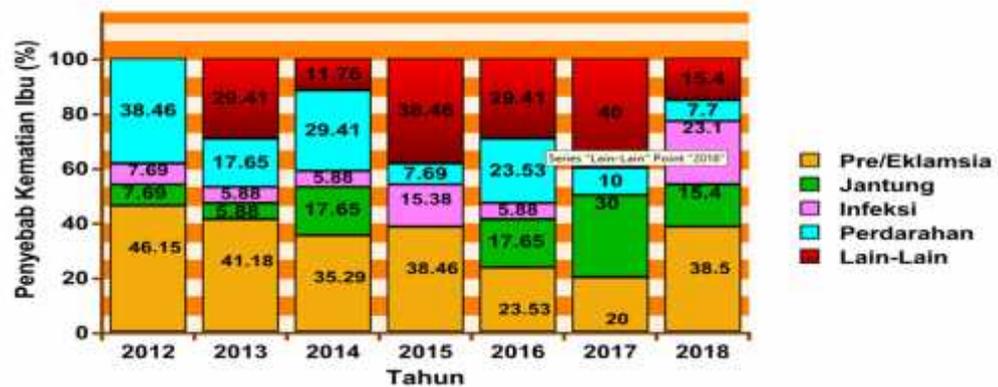
Gambar 2.2 Trend Angka Kematian Ibu Tahun 2013-2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Sedangkan penyebab kematian langsung ibu maternal di Kabupaten Situbondo tahun 2018 terlihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3 Trend Penyebab Kematian Ibu tahun 2012-2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Penyebab Kematian ibu tertinggi di Kabupaten Situbondo tahun 2018 adalah Pre Eklamsi/ Eklamsi , yakni sebanyak 6 kasus dari 13 kasus kematian ibu (60%). Sedangkan untuk kematian dengan penyebab yang lainnya memiliki proporsi yang sama (Masing2 ada 1 kasus) adalah Perdarahan, HIV, TB, Jantung, Typhoid, Kelainan pembekuan darah dan aspirasi.

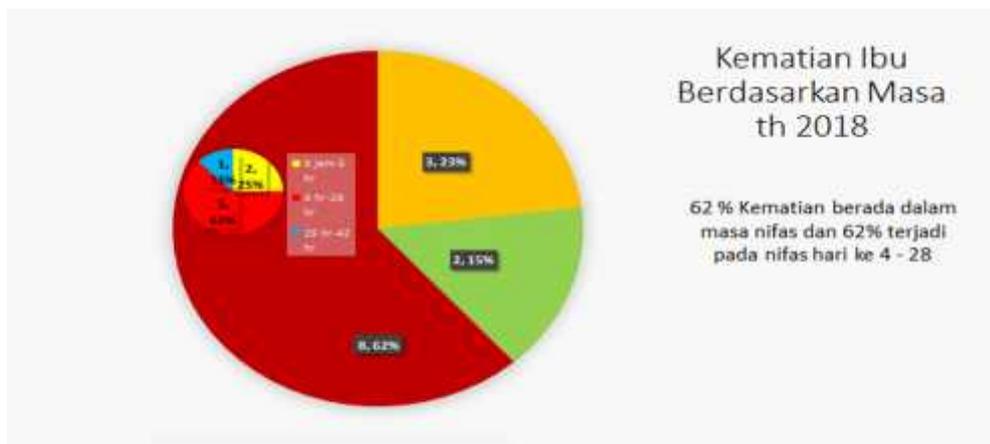
Kematian ibu berdasarkan tempat di Kabupaten Situbondo tahun 2018 mayoritas terjadi di rumah Sakit, yakni sebesar 61,5% (6 kematian) sedangkan 30% nya dikarenakan mengalami keterlambatan dalam sistem rujukan, dan komposisi kematian ibu terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah pada usia produktif secara seksual (20-35 tahun), yakni sebesar 76,9% (10 orang). Rentang usia ini seharusnya menjadi usia yang paling aman untuk reproduksi. Kematian ibu hamil berdasarkan tempat dan masa Kehamilan berdasarkan gambar 2.4 dan 2.5

Gambar 2.4 Tempat Kematian Ibu tahun 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Gambar 2.5 Kematian Ibu berdasarkan masa Tahun 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Walaupun Angka kematian ibu di Kabupaten Situbondo tahun 2018 sudah dibawah target Nasional yaitu sebesar 306/ 100.000 KH akan tetapi masih jauh diatas target Renstra Th 2018 sebesar 110/ 100.000 KH. yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten, namun adanya kematian ibu masih menjadi permasalahan kesehatan. Beberapa hambatan yang dijumpai di lapangan terkait penurunan AKI di Kabupaten Situbondo adalah sbb:

1. Keterbatasan tenaga Bidan, baik di wilayah maupun Bidan jaga di rumah sakit serta dokter Puskesmas menjadi masalah tersendiri.
2. Sebagian puskesmas PONEC belum mampu PONEC karena Tim yang dilatih dimutasi serta kurangnya sarana prasarana
3. Pelaksanaan Sistem rujukan yang belum sepenuhnya sesuai SOP oleh Tenaga kesehatan dari tingkat bawah/ wilayah sampai dengan Rumah sakit.
4. Keterbatasannya sarana prasarana, obat2 an dan sumberdaya tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
5. PMI belum bisa menyediakan semua jenis komponen darah yang dibutuhkan.
6. Belum semua bidan mengikuti pelatihan (APN, Kegawat daruratan Obstetri dan Neonatal, Manajemen Asfiksia, MTBS, Manajemen BBLR, DDTK) Karena keterbatasan dana APBD

7. Sebagian wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan kegawat daruratan maternal perinatal
8. Sosial budaya masyarakat yang merugikan kesehatan (ibu hamil dilarang periksa pada tribulan awal)
9. Masih ada 23 desa yang belum ada bidan PTT/ PNS sehingga Pelayanan belum optimal
10. Masih ada bidan wilayah yang tidak berdomisili di wilayahnya

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyebab kematian ibu adalah sbb:

1. Pengawasan rujukan ibu hamil Risti/ komplikasi sampai bayi lahir sehat dan ibu selamat oleh tim dan Satgas GERDU PENAKIB Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Pendampingan ibu hamil Risti melalui aplikasi SiMessem..
3. Pembahasan kasus kematian ibu dan bayi oleh tim AMP serta pembelajaran hasil rekomendasi AMP
4. Pembentukan Kelas Nenek Asuh dan kelas Unmeetneed.
5. Pembinaan dan pemberian sanksi untuk memberikan efek jera bagi bidan penolong persalinan yang mengalami kematian ibu/bayi, mulai dari teguran sampai pencabutan ijin praktek.
6. Menempatkan bidan magang di wilayah yang tidak ada bidannya dengan pengawasan bidan wilayah terdekat/ bidan PNS senior.
7. Pelatihan APN kepada semua bidan baik dengan dana APBD II maupun mandiri.
8. Pendataan ibu hamil dan pemasangan stiker oleh bidan dan kader
9. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
10. Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan kelas ibu bersalin
11. Meningkatkan kualitas pelayanan pada ibu hamil dengan ANC terpadu di Puskesmas dan jaringannya

2.2.1.1 Cakupan Program yang mendukung Indikator Ibu Tahun 2018

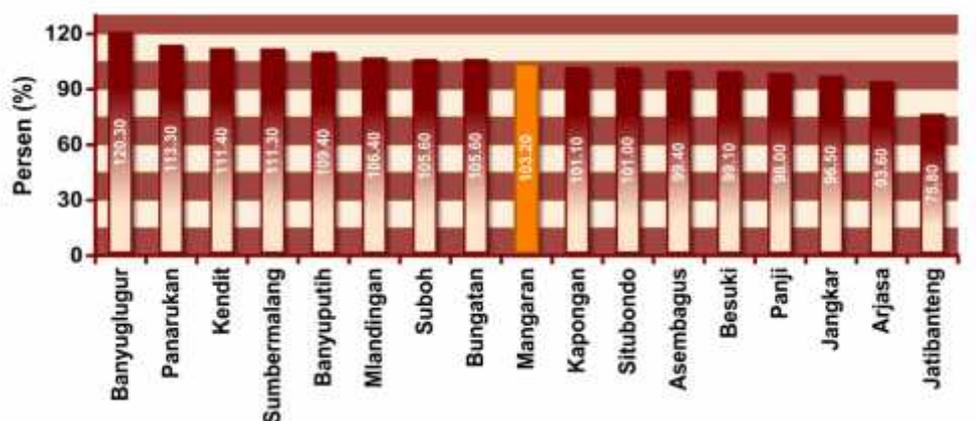
Tabel 2.3 . Cakupan Program yang mendukung Indikator Ibu

NO	INDIKATOR CAKUPAN	CAPAIAN CAKUPAN Th 2017	CAPAIAN CAKUPAN Th 2018	KET
1	Cakupan K1	101,1%	102,4%	Terjadi Kenaikan
2	Cakupan K4	88%	84,1%	Terjadi Penurunan
3	Deteksi Risti oleh Masyarakat	16%	17,5%	Terjadi Kenaikan
4	Deteksi Risti oleh Nakes	44,3%	47,2%	Terjadi Kenaikan
5	Penanganan Komplikasi kebidanan	134,5%	116,4%	Terjadi Penurunan
6	Persalinan Nakes	95,4%	97.80%	Terjadi Kenaikan
7	Persalinan Nakes di Faskes	94,9%	97,6%	Terjadi Kenaikan
8	Pelayanan Nifas	93.60%	95,2%	Terjadi Kenaikan

a. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Capaian cakupan K1 Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 adalah 102,4% dan mengalami peningkatan sebesar 1,3 poin dibandingkan tahun 2017. Puskesmas Banyuglugur memiliki capaian K1 tertinggi sebesar 120,3%, sedangkan Puskesmas Jatibenteng memiliki capaian K1 terendah, yakni sebesar 75,8%. Cakupan K1 per kecamatan dapat dilihat Gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2.6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 Kabupaten Situbondo Tahun 2018

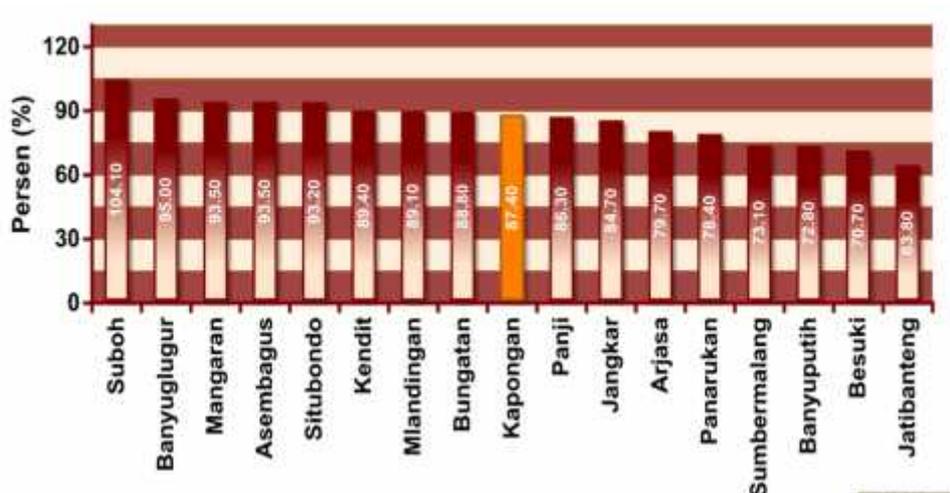


Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

b. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4

K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2016 yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, target pencapaian pelayanan ibu hamil K4 adalah sebesar 100%. Cakupan K4 Kabupaten Situbondo per Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Situbondo Tahun 2018

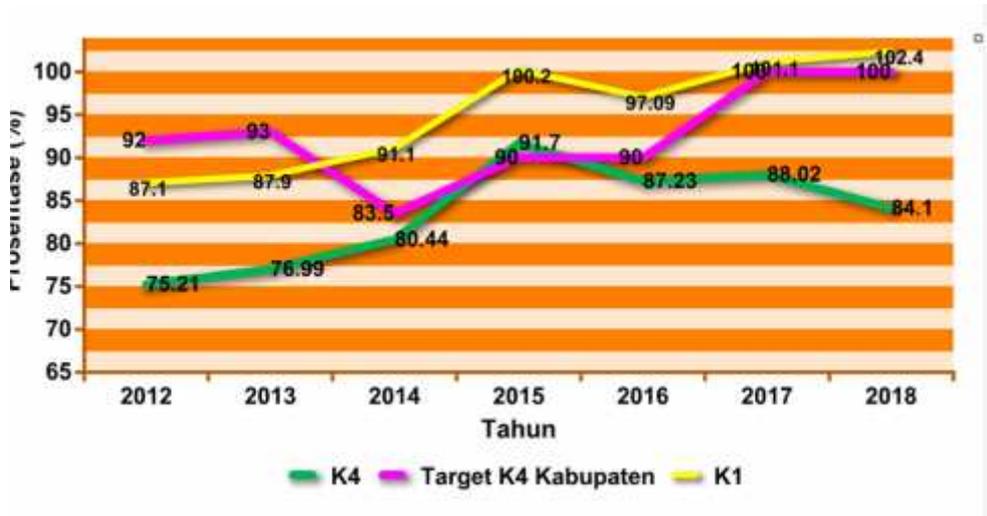


Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 2.7 di atas diketahui bahwa capaian K4 tahun 2018 di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo hanya ada satu Puskesmas yang mencapai target 100% yang sudah ditetapkan dalam PMK No 43 tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan sehingga capaian K4 Kabupaten pun belum mencapai target. Cakupan K4 Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 84,1% atau 8.241 bumil mendapat pelayanan K4 dari 9.802 sasaran ibu hamil yang ada. Kecamatan Suboh merupakan kecamatan dengan capaian K4 tertinggi, yakni sebesar 104,1% dan kecamatan dengan cakupan K4 terendah adalah Kecamatan Banyuputih (63,8%).

Sedangkan trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013 – 2018 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir untuk pertama kalinya di tahun 2016 capaian K4 mengalami penurunan, yakni dari 91,7% pada tahun 2015 menjadi 87,23% di tahun 2016 atau menurun 4,47 poin. Tahun 2017 cakupan K4 mengalami sedikit peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari 87,23% tahun 2016 menjadi 88,02% di tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,79 poin. Cakupan K4 Kabupaten situbondo mencapai puncaknya di tahun 2015 hingga mencapai 91,7%. Sedangkan pada tahun 2018 Cakupan K4 menurun sebanyak 3,92 poin dari tahun 2017. Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut.

Gambar 2.8 Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Gambar 2.8 di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Drop Out K4 atau selisih cakupan K1 dan K4 dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Drop Out K4 tahun 2017 sebesar 18.3 poin dan merupakan drop out tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena sebenarnya sudah banyak ibu hamil yang akses dengan fasilitas kesehatan namun masih belum mendapatkan pelayanan sesuai standar. Angka toleransi Drop Out K4 adalah kurang dari 5%.

Hambatan yang dijumpai di lapangan terkait cakupan K4 adalah sebagai berikut:

1. Ibu hamil akses pertama kali di Fasilitas Kesehatan di atas trimester I
2. Sebagian Bumil yang sudah akses K1 lolos dan tidak ditindaklanjuti oleh bidan wilayah (DO K4 Tinggi)
3. Mapping (pendataan) ibu hamil belum dilakukan secara maksimal,
4. Sebagian masyarakat yang berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas memilih akses dengan Dokter Praktek swasta (DPS) ataupun Bidan Praktek Swasta (BPS) dan mereka tidak melaporkan kepada bidan penanggung jawab wilayah sehingga tidak tercatat.
5. Cukup banyaknya kasus abortus (329 bumil atau 3,27%) dan persalinan prematur pada ibu hamil (275 orang atau 2,9 %)

Hal ini berarti bahwa masih perlu adanya peningkatan kinerja untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan sbb:

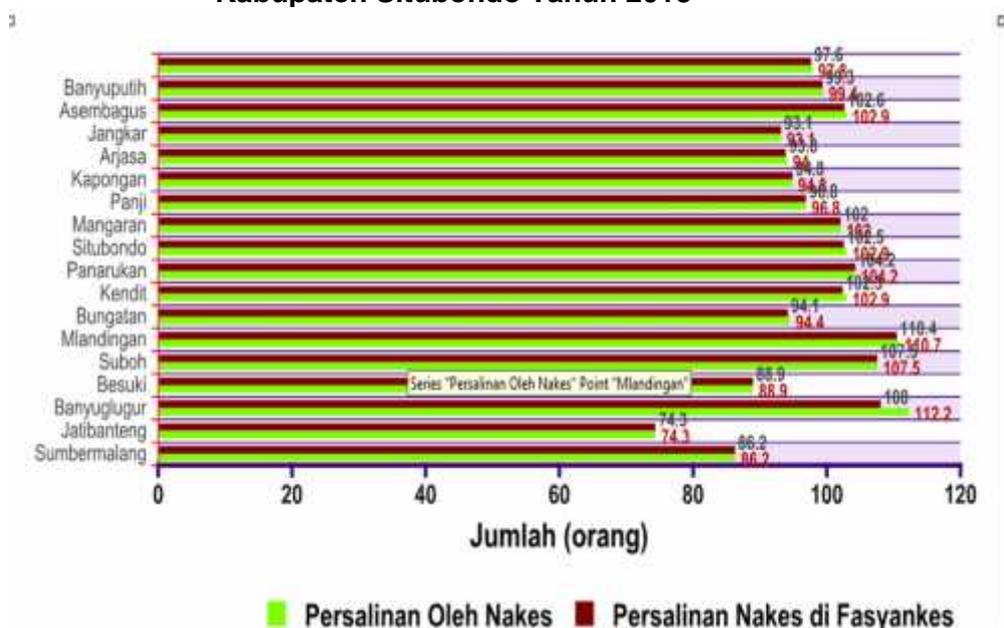
1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini mungkin
2. Peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui kelas ibu hamil
3. Kunjungan rumah pada ibu hamil yang Drop Out dengan melibatkan peran kader
4. Pemanfaatan dana BOK untuk pendataan /mapping ibu hamil
5. Peningkatan kinerja bidan penanggung jawab wilayah untuk bekerja sama dengan DPS dan BPS terkait pelaporan program

c. Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter dan atau dokter spesialis kebidanan) di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2016 yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Dengan demikian, target pencapaian pelayanan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah sebesar 100%.

Laporan PWS Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo tahun 2018 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 97,8% (9.151 persalinan dari target 9.357), namun yang melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 97,6% (9.128 orang). Dengan demikian masih ada 0,2% atau 23 persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas kesehatan. Puskesmas Banyuglugur menduduki peringkat pertama persalinan non Faskes, yakni 12 persalinan nakes tidak dilakukan di Faskes dikarenakan ada daerah yang sulit jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus di tolong oleh Nakes

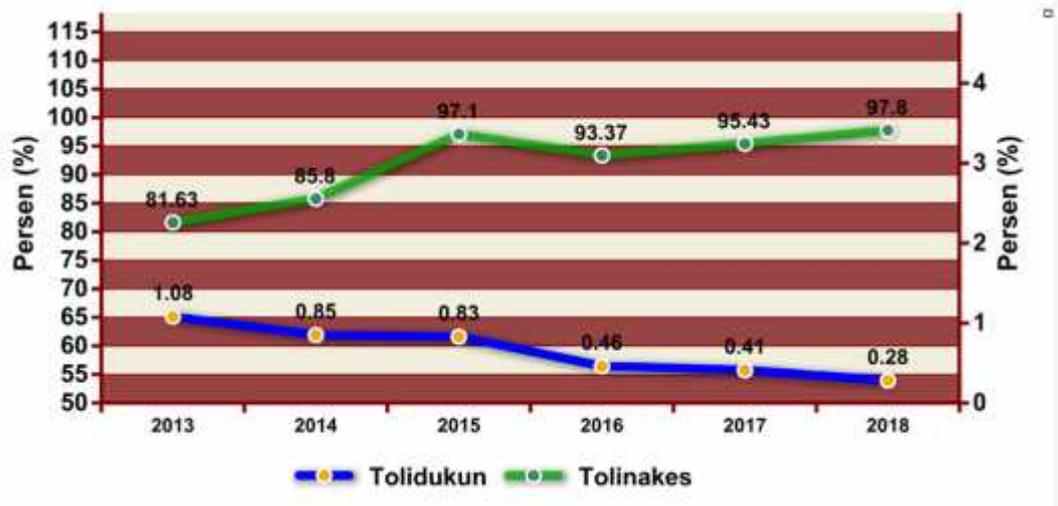
Gambar 2.9. Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan dan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Trend cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan dukun tahun 2013 s.d 2018 disajikan pada Gambar 2.10 berikut.

Gambar 2.10 Trend Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan dan Persalinan Dukun di Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s.d. 2018



Sumber : Laporan bulanan PWS dan LB3 KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa Angka persalinan dukun di Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 1,08% (115 persalinan) pada tahun 2013 menjadi 0,85% (90 persalinan) pada tahun 2014. Di tahun 2015 angka persalinan dukun kembali mengalami penurunan menjadi 0,83% (80 persalinan) dan puncaknya di tahun 2016 menurun hampir separuhnya menjadi 0,46% (44 persalinan) dan di tahun 2017 menurun lagi menjadi 0,41% (39 persalinan) dan di tahun 2018 menurun lagi menjadi 0,28 (25 persalinan) Sebaliknya, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melahirkan di tenaga kesehatan sudah semakin baik.

Hambatan yang dijumpai di lapangan terkait cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas kesehatan adalah sbb :

1. Dukun masih aktif menolong persalinan

2. Tidak semua bidan menempati wilayah kerjanya sehingga masyarakat tidak dapat akses dengan tenaga kesehatan.
3. Belum semua desa ada tenaga bidannya
4. Kondisi topografi wilayah sulit dilalui sehingga persalinan dilakukan di rumah pasien oleh bidan wilayah

Dengan demikian, maka perlu terus ditingkatkan upaya kemitraan bidan dukun dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang persalinan aman di sarana pelayanan kesehatan melalui program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) di desa serta mewajibkan bidan wilayah untuk berdomisili di wilayah kerjanya tanpa kecuali. Sedangkan untuk wilayah dengan topografi yang sulit dan terpencil dapat mengoptimalkan fungsi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

d. Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Pengertian penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu dengan komplikasi kebidanan yang ditangani secara definitif (sampai selesai) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Komplikasi yang mengancam jiwa ibu antara lain : abortus, hiperemesis gravidarium, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, infeksi berat, sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda dan kasus non obsteri. Jumlah komplikasi kebidanan diperkirakan sebesar 20% dari jumlah ibu hamil yang ada.

Berdasarkan Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo tahun 2018, cakupan Ibu hamil risti/komplikasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebesar 116,4% dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80% . Bahkan semua kecamatan di Kabupaten Situbondo sudah mencapai target. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Trend perkembangan cakupan komplikasi kebidanan ditangani disajikan pada gambar 2.11 di bawah ini.

Gambar 2.11 Trend Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani Di Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s/d 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Diagram 2.11 di atas juga menggambarkan bahwa kejadian komplikasi kebidanan di Kabupaten Situbondo terus meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan melebihi perkiraan 20% kasus komplikasi, bahkan mencapai puncaknya di tahun 2017, dan ditahun 2018 mengalami Penurunan 18,16 poin ini merupakan penurunan yang signifikan karena Penguatan Puskesmas PONED untuk mengatasi komplikasi kebidanan dan pemantapan pemahaman definisi operasional komplikasi kebidanan pada bidan terhadap pencatatan dan pelaporan menjadi lebih baik.

e. Pelayanan Nifas

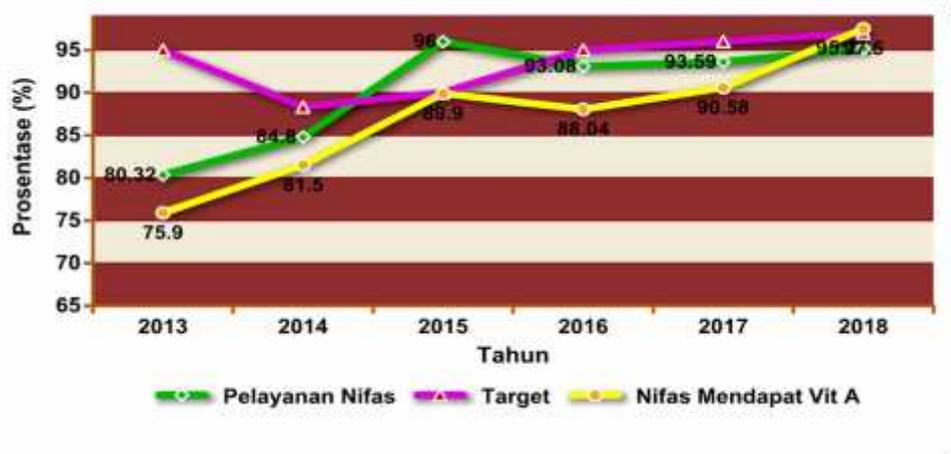
Pelayanan kesehatan pada ibu nifas yang sesuai standart adalah mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas. Kunjungan nifas minimal dilakukan 3 kali dengan ketentuan waktu sbb:

- 1) Kunjungan nifas I pada masa 6 jam-3 hari setelah persalinan,
- 2) kunjungan nifas II dalam waktu 4-28 hari setelah persalinan dan
- 3) kunjungan nifas III dalam waktu 29-42 hari setelah persalinan termasuk pemberian Vitamin A 200.000 IU serta persiapan dan atau pemasangan KB,

Pada tahun 2018 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Situbondo sebesar 95,2%. Target Pelayanan nifas yang ditetapkan tahun 2018 adalah 97% (target PKP). Hal ini berarti bahwa capaian

pelayanan nifas Kabupaten Situbondo tahun 2018 belum mencapai target. Walaupun belum mencapai target, namun cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan seperti disajikan pada Gambar 2.12 berikut.

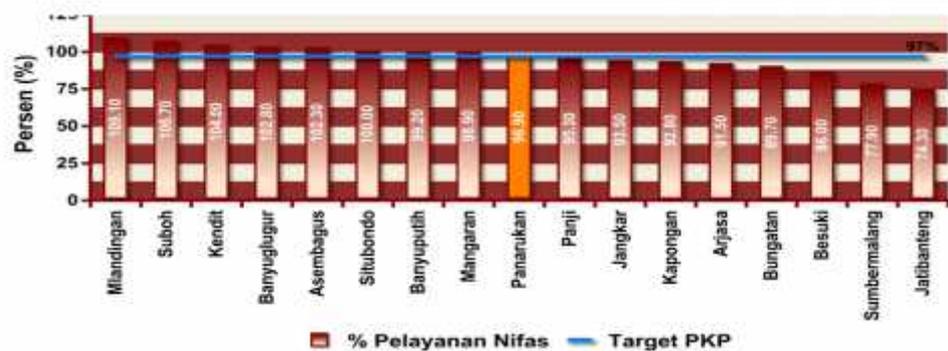
Gambar 2.12 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2018



Sumber: Laporan Bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, 8 kecamatan sudah memenuhi target 97%, sedangkan sisanya 9 kecamatan belum memenuhi target. Delapan kecamatan yang sudah memenuhi target adalah Kecamatan Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Kendit, Situbondo, Mangaran Asembagus dan Banyuputih. Kecamatan dengan cakupan pelayanan nifas tertinggi adalah kecamatan Mlandingan (109,1%) dan kecamatan dengan cakupan pelayanan nifas terendah adalah kecamatan Jatibanteng dengan capaian sebesar 74,3%. Cakupan Pelayanan Nifas Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2018 disajikan pada Gambar 2.13 di bawah ini.

Gambar 2.13 Cakupan Pelayanan Nifas Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber: Laporan Bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Rendahnya cakupan pelayanan nifas di beberapa kecamatan dikarenakan beberapa hambatan yang ditemui di lapangan, yakni pasien lahir di dukun sehingga tidak akses dengan tenaga kesehatan, pasien lahir di RS dan Bidan Praktek Mandiri sehingga tidak tercatat oleh bidan wilayah. Selain itu, ibu nifas juga tidak datang untuk kontrol sesuai standar. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemitraan bidan dan dukun, peningkatan peran kader, mengoptimalkan pelaksanaan program P4K, peningkatan cakupan persalinan nakes serta melakukan kunjungan ibu nifas yang tidak akses ke petugas kesehatan.

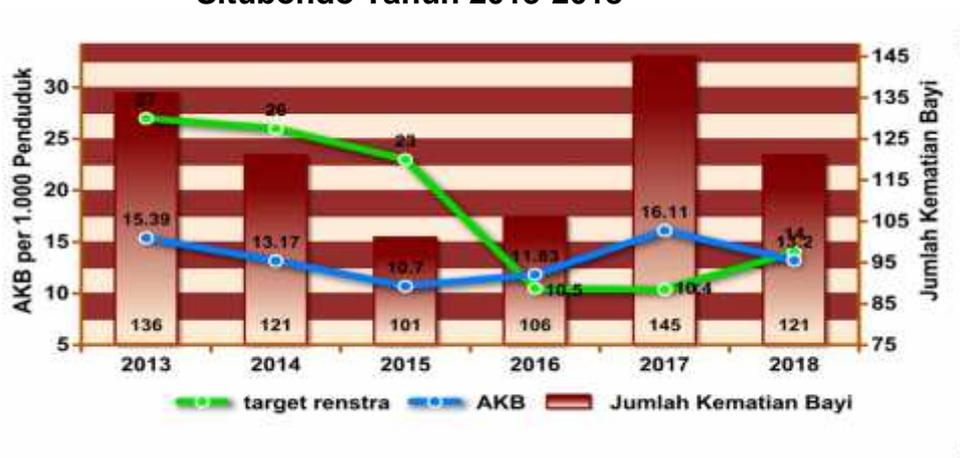
2.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 KH

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya.

Berdasarkan kelompok usianya, kematian bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2018 banyak terjadi pada usia 0-6 hari (60,3% atau 73 kematian), kemudian disusul 29 hari -11 bulan (22,3% atau 27 kematian) dan usia 8-28 hari (17,4% atau 21 kematian). Usia 0-7 hari merupakan usia yang sangat rentan terutama pada bayi premature dan BBLR. Dengan demikian total kematian bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2018 sebanyak 121 kasus dari 9177 kelahiran hidup, sehingga angka kematian bayi tahun 2018 adalah 13,2 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi terbanyak ada di Kecamatan Asembagus, yakni sebanyak 12 bayi dan kematian bayi terendah di Kecamatan Banyuglugur dan Kecamatan Sumbermalang, dengan 2 (dua) kematian bayi.

Berikut ini disajikan Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2018

Gambar 2.14 Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

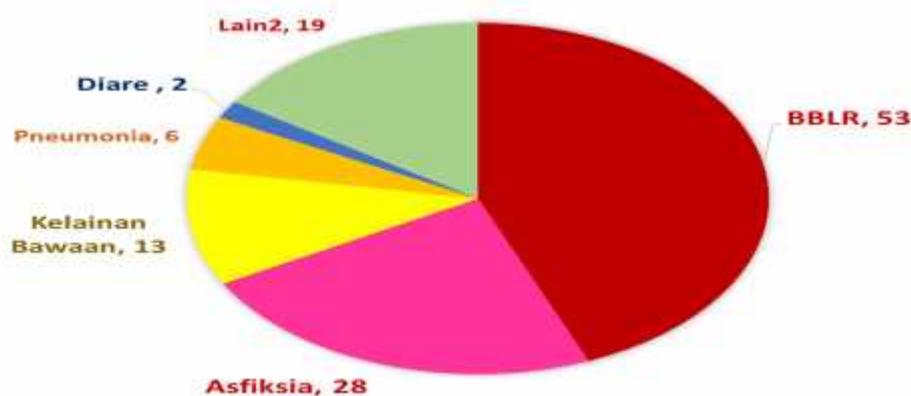
AKB Kabupaten Situbondo tahun 2018 mengalami penurunan 2,8 point dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini cukup signifikan, yakni 16/ 1000 KH pada tahun 2017 (145 kematian bayi) menjadi 13,2 pada tahun 2018 (121 kematian bayi). AKB Kabupaten Situbondo Tahun 2018 sudah dibawah angka toleransi yang ditetapkan dalam Renstra (IKU Kabupaten), yakni 15 per 1.000 KH.

Dari sisi penyebabnya, kematian bayi dibedakan faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan, umumnya disebabkan oleh faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen (kematian post neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan sampai satu tahun, umumnya disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan.

BBLR masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2018, yakni sebanyak 53 kasus kematian atau 43,8%. Asfiksia menduduki peringkat kedua penyebab kematian bayi tahun 2018 yakni sebanyak 28 kasus atau sebesar 23%, selanjutnya kelainan bawaan sebanyak 13 kasus atau sebesar 10,7%, Pneumonia sebanyak 6 kasus atau sebesar 4,9% Diare sebanyak 2 kasus atau sebesar 1,6% serta penyebab yang lainnya sebanyak 19 kasus atau sebesar 15,7%.Penyebab

kematian bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2018 terlihat pada Gambar 2.15 di bawah ini.

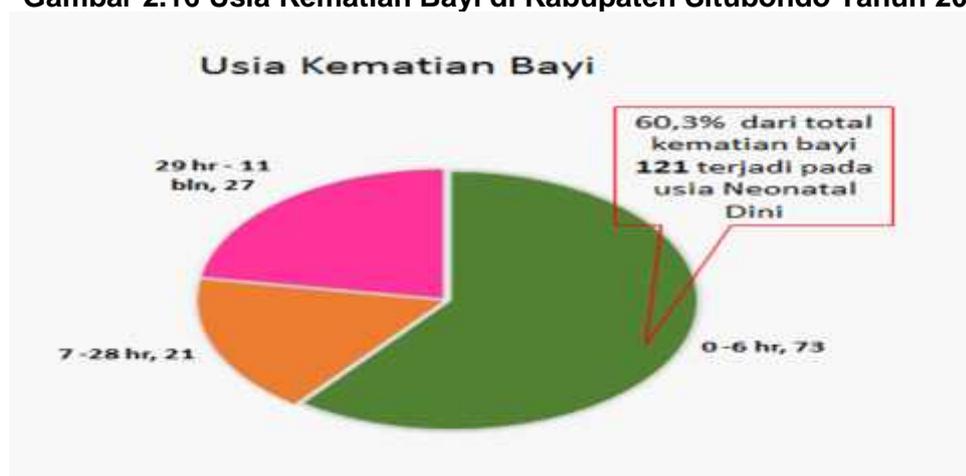
Gambar 2.15 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Seanjutnya usia kematian terbanyak dari AKB adalah usia neonatal dini 0-6 hari sebesar 60.3% sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.16 Usia Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengan resiko tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat diminimalkan. Selain itu, penatalaksanaan bayi muda < 2 bulan dengan menggunakan MTBM sangat diperlukan dalam deteksi dini komplikasi pada bayi khususnya neonatal. Karena masa neonatal

adalah masa yang sangat rawan terjadinya kematian. Adanya pembentukan Kelas Ibu Balita serta program peningkatan pengetahuan peran seorang nenek dalam pengasuhan bayi melalui Kelas Nenek Asuh yang juga menunjang upaya penurunan kematian bayi dan peningkatan SDM ibu hamil juga turut mendukung penekanan AKB.

Masih adanya kematian bayi tetap menjadi masalah sehingga diperlukan solusi dari hambatan-hambatan yang ditemui. Hambatan yang dijumpai di lapangan terkait kematian bayi di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

1. Bidan yang tidak patuh pada penapisan/ SOP;
2. Perilaku dan budaya dari masyarakat setempat yang tidak mendukung upaya penurunan AKB, misal pengambilan keputusan yg terlambat
3. Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap orang yang dituakan
4. Banyaknya kasus Anemia dan Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang merupakan salah satu penyebab BBLR.
5. Pengetahuan masyarakat tentang bayi resiko tinggi (terutama bayi berat lahir rendah, 2500 gram/BBLR) masih rendah

Angka kematian bayi yang terjadi dapat ditekan serendah mungkin dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi ibu hamil dan perawatan kehamilan, serta meningkatkan cakupan kunjungan bayi melalui kegiatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang), sehingga tercapai jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal

2.2.2.1 Cakupan Program yang mendukung Indikator Bayi Tahun 2018

Tabel. 2.4 Cakupan Program yang mendukung Indikator Bayi

NO	INDIKATOR CAKUPAN	CAPAIAN		KET
		CAKUPAN TH 2017	CAKUPAN TH 2018	
1	KN 1	100,6 %	103.20%	Terjadi kenaikan
2	KN Lengkap	98,3 %	100%	Terjadi kenaikan
3	Komplikasi Neonatal	92,3 %	88,7 %	Terjadi Penurunan
4	Kunjungan Bayi	87,8 %	88,9 %	Terjadi kenaikan

a. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

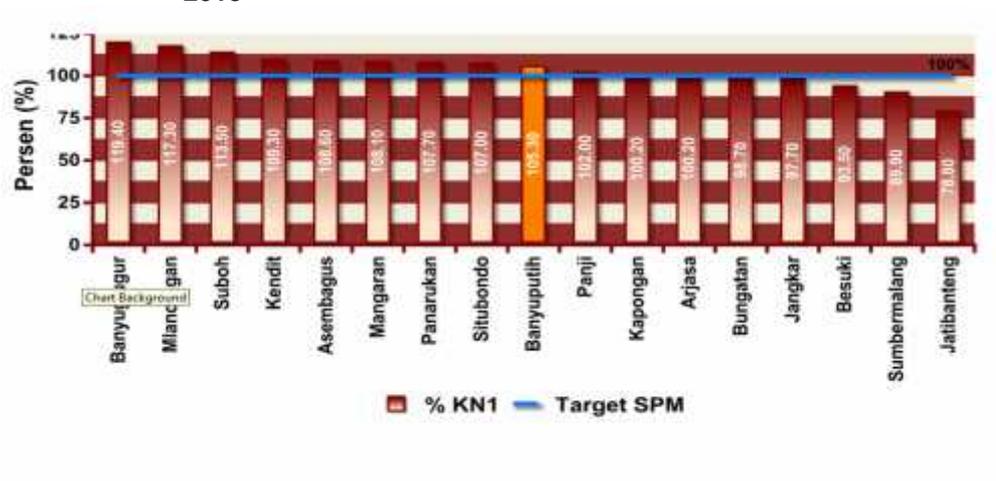
Setiap bayi baru lahir wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya. Hal ini sesuai amanah Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir merupakan salah satu jenis pelayanan dasar bidang kesehatan. Dengan demikian, target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah sebesar 100%.

Bayi usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) merupakan golongan umur yang rentan gangguan kesehatan. Upaya untuk mengurangi resiko tersebut adalah melalui pelayanan kesehatan pada neonatus (bayi baru lahir) minimal tiga kali yaitu satu kali pada 6-48 jam setelah lahir (disebut KN1), satu kali pada usia 3-7 hari dan satu kali pada usia 8 – 28 hari atau disebut KN lengkap. Pelayanan yang diberikan meliputi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pencegahan infeksi berupa perawatan mata (salep mata), perawatan tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi apabila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi Hepatitis B (HB0) dan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).

Cakupan KN1 di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebesar 103,0% sedangkan cakupan kunjungan neonatus lengkap sebesar 100,2% dari target 100%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Drop Out KN lengkap Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 2,8% atau sebanyak 249 Bayi Baru Lahir.

Cakupan kunjungan neonatus per kecamatan tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17 Cakupan Kunjungan Neonatus Di Kabupaten Situbondo Tahun 2018

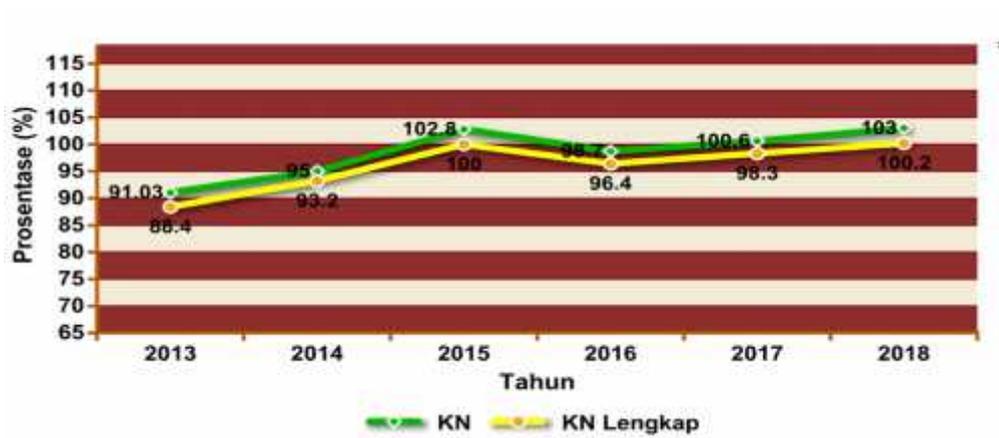


Sumber: Laporan Bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Gambar 2.17 di atas diketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, ada 12 kecamatan yang sudah mencapai target 100%, sedangkan sisanya 5 kecamatan belum mencapai target. Dua Belas kecamatan yang sudah mencapai target 100% pelayanan Bayi Baru Lahir adalah Banyuglugur, Mlandingan, Suboh, kendit, Asembagus, Mangaran, Panarukan, Situbondo, Banyuputih, Panji, Kapongan, Arjasa. cakupan KN Lengkap tertinggi adalah di Kecamatan Banyuglugur sebesar 119.40% dan yang terendah di Kecamatan Jatibanteng sebesar 78,80.

Trend cakupan kunjungan neonatus kabupaten situbondo selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan meskipun di tahun 2016 pernah mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, cakupan kunjungan neonatus Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, yakni meningkat sebesar 1,9 poin dan di Tahun 2018 meningkat sebesar 2,4 point . Trend cakupan kunjungan neonatus kabupaten situbondo selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 2.18 berikut.

Gambar 2.18. Trend Cakupan Kunjungan Neonatus Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s.d 2018



Sumber: Laporan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Permasalahan di lapangan terkait capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sbb:

1. Bayi dilahirkan di dukun sehingga tidak akses dengan tenaga kesehatan (Tahun 2018 ada 25 persalinan dukun)
2. Bidan wilayah tidak aktif melakukan kunjungan rumah terhadap bayi neonatal yang tidak akses ke petugas kesehatan
3. Masih ada orang tua yang tidak mau mengimunitasikan anaknya karena berbagai alasan, ex : vaksin haram atau takut anak jadi sakit
4. Tidak semua bidan terlatih MTBS/M(ManajemenTerpadu Balita Sakit/ Muda)
5. Banyaknya Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR yang tidak diimunitasi HB0 sehingga tidak mendapatkan pelayanan paripurna
6. Masih tingginya kematian bayi Neonatal (Tahun 2018 ada 94 kematian bayi usia 0-28 hari) sehingga pelayanan yang diberikan tidak sampai paripurna

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sbb:

1. Meningkatkan kemitraan bidan dan dukun
2. Meningkatkan peran kader untuk senantiasa melaporkan kelahiran bayi di wilayahnya ke bidan setempat
3. Melakukan Kunjungan Neonatal kepada bayi yang tidak akses ke petugas kesehatan

4. Penyuluhan pentingnya imunisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader dsb
5. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan MTBS/M (dengan kalakarya)

b. Komplikasi Neonatal Ditangani

Neonatal risti/komplikasi adalah keadaan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian serta kecacatan seperti asfiksia, hipotermi, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital termasuk klasifikasi kuning pada MTBS. Dalam pelayanan neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang dilayani bidan di Puskesmas tergolong dalam kasus risti/komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Selama enam tahun terakhir, cakupan Komplikasi Neonatal ditangani di Kabupaten situbondo memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya di tahun 2017. Cakupan neonatal komplikasi ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 sebesar 92,38% dan pada tahun 2018 Mengalami Penurunan 88,7 (menurun 3.68 poin). Trend Cakupan Komplikasi Neonatal ditangani tahun 2012-2018 disajikan pada Gambar 2.19 berikut.

Gambar 2.19 Trend Cakupan Komplikasi Neonatal Ditangani Di Kabupaten Situbondo Tahun 2012-2018



Sumber: Laporan Bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Peningkatan cakupan komplikasi neonatal yang ditangani tidak lepas dari dukungan para tenaga kesehatan diwilayah yang telah melakukan penanganan bayi muda (usia < 2 bln) dengan

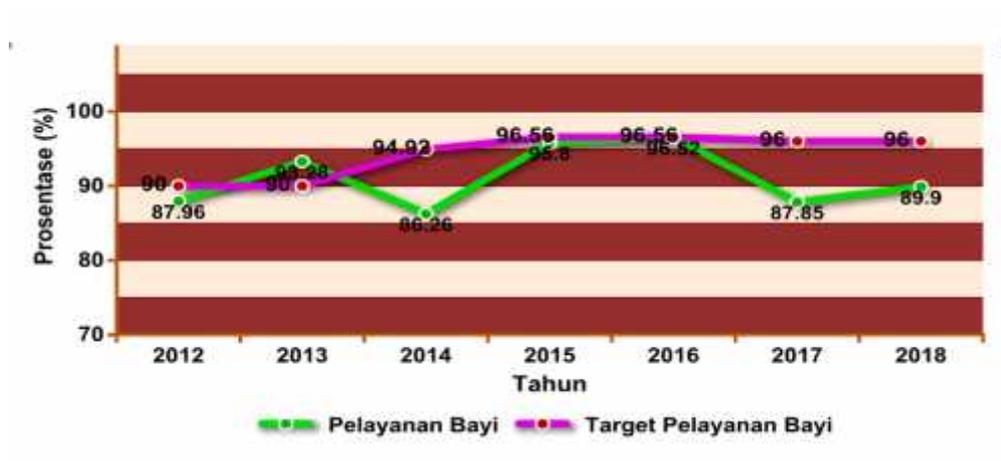
menggunakan penatalaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) meskipun belum semua tenaga dokter, bidan dan perawat dilatih tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dimana MTBM merupakan bagian dari MTBS. Untuk itu semua Puskesmas wajib melakukan Kalakarya kepada bidan dan perawat yang belum dilatih MTBS agar nantinya semua petugas bisa melaksanakan penatalaksanaan bayi muda dengan MTBM sehingga semua komplikasi neonatus bisa terdeteksi dan bisa tertangani dengan baik dan cakupan akan lebih meningkat lagi.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi

Bayi atau anak usia kurang dari satu tahun (29 hari-11 bulan) dikatakan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna jika sudah dilayani sesuai standar minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari – 11 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bulan dan telah lulus KN Lengkap. Pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut meliputi imunisasi dasar lengkap, mendapatkan Vitamin A 1x, dilakukan pemantauan tumbuh kembang sebanyak 4x dan jika sakit dilakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Gambaran Trend Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2012 s.d 2018 disajikan Gambar 2.20 di bawah ini.

Gambar 2.20. Trend Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2012 s.d 2018



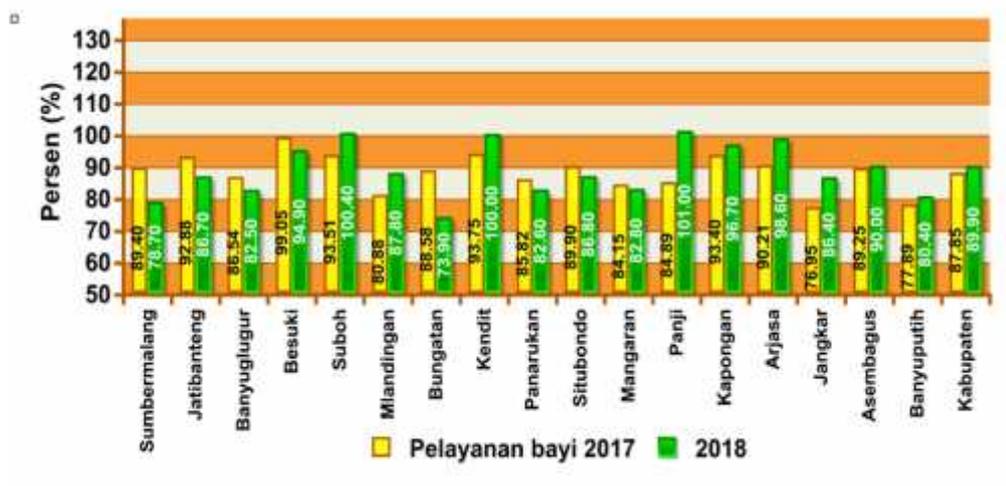
Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas diketahui bahwa trend cakupan bayi Kabupaten Situbondo cukup fluktuatif dan naik turun seperti mata gergaji. Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Situbondo

tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2017, yakni dari 96,52% di tahun 2016 menjadi 87,85% tahun 2017 atau menurun sebesar 8,67 poin setelah sebelumnya di tahun 2016 sempat mengalami sedikit peningkatan, yakni dari 95,8% pada tahun 2015 menjadi 96,52% pada tahun 2016 (meningkat 0,72 poin). Penurunan ini seperti yang terjadi 3 tahun yang lalu, yakni tahun 2014 cakupan kunjungan bayi pernah mengalami penurunan yang juga signifikan dari 93,28% pada tahun 2013 menjadi 86,26% pada tahun 2014 (menurun 7,02 poin) dan di tahun 2018 meningkat menjadi 2,05 poin.

Kenaikan di tahun 2018 dikarenakan ada 4 Kecamatan Suboh, Kendit, Panji, Arjasa yang menyumbang poin dibandingkan di tahun 2017 hanya 1 Kecamatan saja. Cakupan kunjungan bayi per Kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat diamati pada Diagram di bawah ini.

Gambar 2.21. Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Per Kecamatan 2018



Sumber: Laporan bulanan PWS KIA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

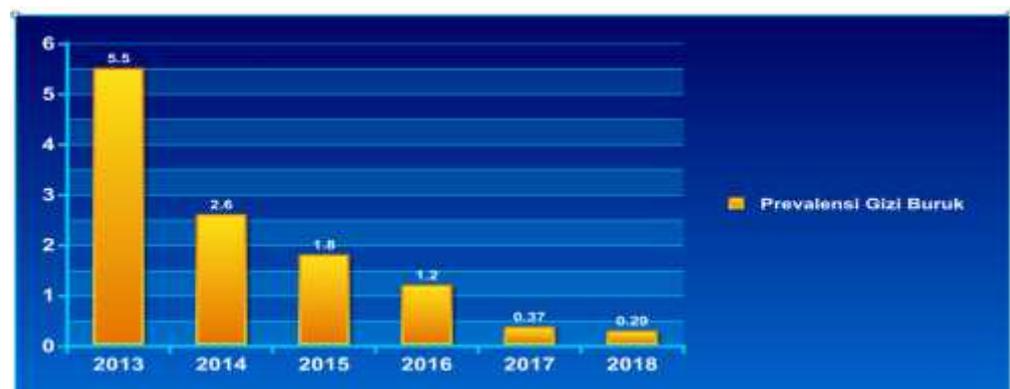
Hambatan di lapangan terkait cakupan kunjungan bayi adalah imunisasi bayi yang tidak lengkap dan pelaksanaan Deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) yang belum optimal karena jumlah tenaga terlatih masih kurang. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut kedepannya adalah koordinasi lintas program dengan bidang P2P (Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit) untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan Pelatihan DDTK/ deteksi dini tumbuh kembang balita bagi bidan.

2.2.3 Angka Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk adalah jumlah balita yang mengalami gizi buruk dibandingkan dengan seluruh balita / total balita.

Prevalensi gizi buruk yang menurun secara signifikan dari tahun 2014-2017 menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan telah berhasil. Berturut turut menurun dari tahun 2014 (2,6%), 2015 (1,8%), 2016 (1,2%), 2017 (0,37%) dan 2018 (0,29%) Trend Gizi buruk tahun 2012-2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

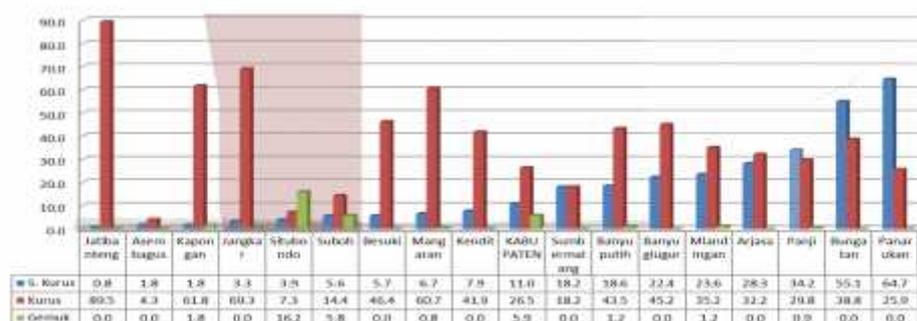
Gambar 2.22. Tren Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2012-2018



Terdapat 2 cara dalam menentukan kasus Gizi Buruk yang ada yaitu dengan cara melihat laporan oleh Puskesmas dan melakukan survei PSG yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan. Dalam laporan LB3Gizi jumlah penderita gizi buruk tercatat dan dilaporkan setiap bulan, tidak hanya berhenti sampai pelaporan, balita gizi buruk yang telah dilaporkan diinvestigasi dan harus mendapat penanganan sesuai dengan standar TLAGB (Tata Laksana Gizi Buruk).

Berikut adalah hasil gizi buruk dan penanganannya yang telah dilakukan berdasarkan data laporan LB3Gizi:

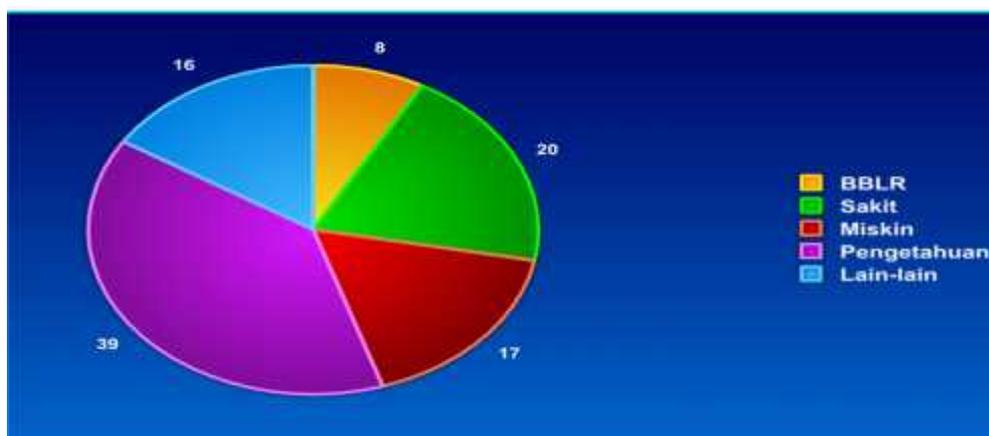
Gambar 2.23. Jumlah Prevalensi Gizi Kurang di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber : Laporan LB3 Gizi Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Jumlah gizi buruk berdasarkan data laporan adalah 0,29% yaitu 131 balita yang menderita gizi buruk di seluruh Kabupaten Situbondo. Tersebar di 17 kecamatan dengan jumlah gizi buruk tertinggi berturut-turut yaitu: Banyuputih (20 kasus), Banyuglugur (18 kasus), Mlandingan (16 kasus), Situbondo (12 Kasus), Kendit (10 kasus), panji (9 kasus), Arjasa (8 kasus), Suboh (6 kasus), Besuki (6 kasus), panarukan (5 kasus), Mangaran (5 kasus), Bungatan (5 Kasus), jangkar (4 kasus), Asembagus (3 kasus), Kapongan (2 kasus), Jatibanteng (1 kasus), Sumbermalang (1 kasus).

Gambar 2.24. Faktor Penyebab Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber : Laporan LB3 Gizi Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Faktor penyebab gizi buruk antara lain karena pengetahuan (39%), kemiskinan (17%), sakit (20%), BBLR (8%), lain-lain (16%) yang dijelaskan sebagaimana berikut:

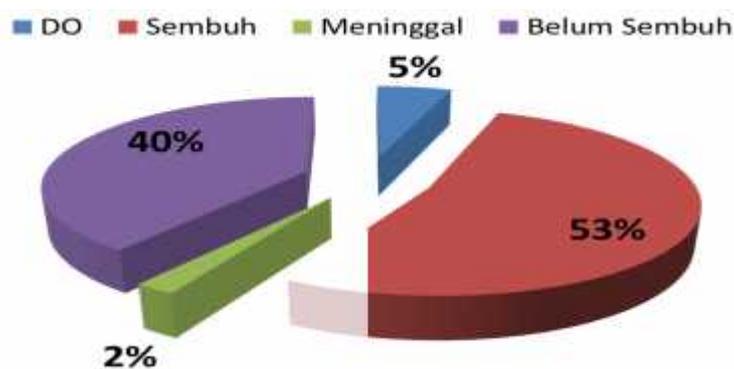
- **Pengetahuan** menjadi penyebab paling tinggi diantara 4 penyebab lainnya dan peningkatan pengetahuan telah menjadi tujuan utama dalam mengatasi gizi buruk. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan cara penyuluhan, penyelenggaraan TPG (Taman Pemulihan Gizi) dan konseling di Rumah Pemulihan Gizi (RPG).
- **Kemiskinan** menjadi penyebab ke-2 setelah pengetahuan dan penanganan karenanya untuk penderita gizi buruk seluruh biaya pengobatan telah diGRATISkan oleh pemerintah, termasuk pemberian obat, pemeriksaan, dan terapi di RPG.
- **Sakit** merupakan penyebab ke-3, dimana sebagian besar penderita gizi buruk memiliki penyakit penyerta yang dapat

mengakibatkan gizi buruk maupun memperburuk keadaan. Tercatat 26 balita dari 131 yang menderita gizi buruk memiliki penyakit penyerta diantaranya: PJB (penyakit jantung bawaan), TBC (*mycobacterium tuberculosis*), *Cerebral Palsy*, HIV, dll.

- **BBLR** juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gizi buruk dimana penyebabnya bisa dari ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK.

Berikut hasil penanganan gizi buruk yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018

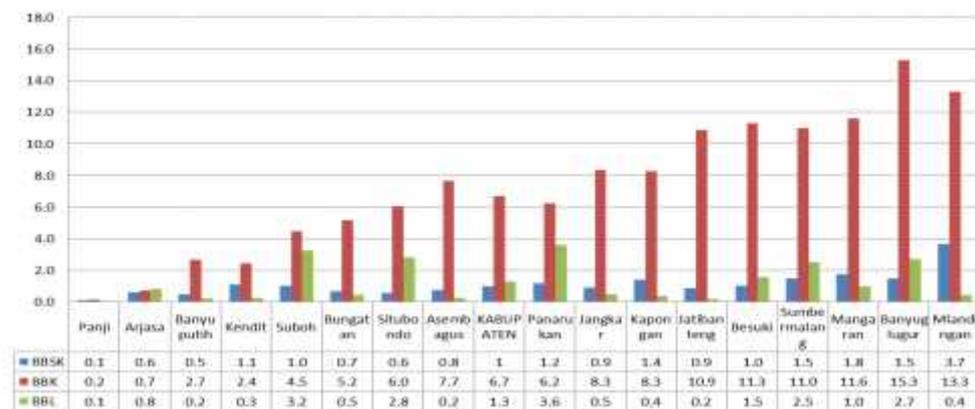
Grafik 2.25. Hasil Penanganan Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber : Laporan LB3 Gizi Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Dari 131 kasus gizi buruk dimana 100% telah tertangani sesuai dengan TLAGB yaitu dengan pemberian PMT, rujukan ke faskes yang lebih tinggi, perawatan di TFC, kontrol dan terapi serta edukasi di RPG, belajar pembuatan makanan yang bergizi di TPG didapatkan hasil 53% sembuh, 40% belum sembuh, 5% drop out (pindah wilayah), dan 2% meninggal.

Gambar 2.26. Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U (Survei PSG) di Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Sumber : Laporan LB3 Gizi Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Situbondo untuk menekan kejadian kasus gizi burk adalah optimalisasi TPG, TFC, RPG pemberian makanan tambahan, suplementasi, peningkatan surveilans, pemantapan kinerja petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk (respon cepat).

- a) TFC (Theurapeutic Feeding Center) sebagai tempat perawatan dan pengobatan anak gizi buruk secara intensif di ruangan khusus dan ibu /keluarga ikut aktif terlibat.
- b) TPG (Taman Pemulihan Gizi) yang bertujuan mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang sudah ada di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- c) sarasehan kelompok pendukung ASI yang mendukung ibu untuk percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menyusui dan menurunkan prevalensi balita pendek
- d) Pelayanan gizi terintegrasi di RPG (Rumah Pemulihan Gizi) dengan semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pemberian Fe dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatan ASI Eksklusif, pemberdayaan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggulangan KEP, GAKY dan KVA.

2.2.4 Cakupan Program yang Mendukung Indikator Kinerja Utama pada AKI, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk

2.2.4.1 Penyakit Menular Langsung

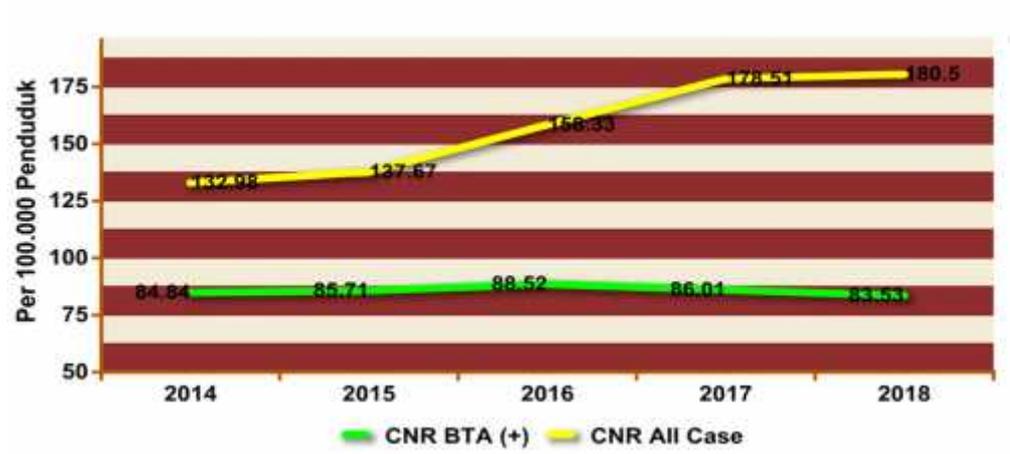
Berikut ini akan diuraikan situasi beberapa penyakit menular langsung yang perlu mendapat perhatian, yakni TB Paru, Kusta, HIV/AIDS, Pneumonia dan Diare.

a. Tuberculosis (TB)

Angka Notifikasi Kasus atau *Case Notification Rate* adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu dan dapat menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun. Angka Notifikasi Kasus TB Paru all case atau semua kasus selama lima tahun terakhir di Kabupaten Situbondo menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yakni dari 132 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 180 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa penemuan kasus

TB dari tahun ke tahun semakin banyak atau meningkat, yang berarti bahwa kinerja petugas di lapangan semakin baik. Sedangkan untuk penemuan kasus TB BTA (+) sedikit mengalami penurunan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yakni dari 89 kasus per 100.000 penduduk menjadi 83 kasus per 100.000 penduduk. Trend *Case Notification Rate* (CNR) TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2014 s.d 2018 disajikan pada Gambar 2.27 berikut.

Gambar 2.27. Case Notification Rate (CNR) TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s.d. 2018



Sumber : Laporan Triwulan Penemuan Pasien TB (TB03 UPK) Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Proporsi penemuan pasien TB BTA (+) di antara suspek merupakan prosentase pasien BTA positif yang ditemukan di antara seluruh suspek yang diperiksa dahaknya. Angka ini menggambarkan mutu dari proses penemuan sampai diagnosis pasien serta kepekaan menetapkan kriteria suspek. Proporsi penemuan pasien TB BTA (+) Kabupaten Situbondo tahun 2018 mencapai 10,50%, yakni 568 kasus dari 5.412 suspek yang diperiksa dahaknya. Toleransi angka ini sekitar 5-15%. Walaupun Proporsi penemuan pasien TB BTA (+) Kabupaten Situbondo sudah baik karena masih dalam angka toleransi namun jika melihat angka per faskes masih ada yang butuh perhatian khusus terutama di Rumah Sakit karena capaiannya terlalu kecil (<5%), yakni RSUD Abd. Rahem (0,76%), RSUD Besuki (0,20%), RSUD Asembagus (2,08%) yang kemungkinan disebabkan penjarangan suspek terlalu longgar sehingga banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (negatif palsu). Sebaliknya bila angka ini terlalu besar (>15%) kemungkinan disebabkan penjarangan terlalu ketat atau ada masalah dalam

pemeriksaan laboratoriu (postif palsu). Hal ini terjadi di Puskesmas Mlandingan (32,65%), Puskesmas Besuki (15,33%) dan Puskesmas Panji (14,14%).

Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s.d 2017 disajikan pada Gambar 2.28 berikut.

Gambar 2.28 Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2014 s.d 2018



Sumber : Laporan Triwulan Penemuan Pasien TB (TB08 UPK) Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Angka kesembuhan penderita TB BTA Positif tahun 2018 merupakan data penderita yang diobati pada tahun 2017 yang telah menyelesaikan seluruh pengobatan di tahun 2018 dan dinyatakan sembuh oleh petugas. Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan tahun 2018 adalah 90,25%. Capaian ini kembali mengalami penurunan, yakni sebesar 0,87 poin dibandingkan tahun 2017.. Walaupun selama tiga tahun terakhir angka kesembuhan TB Paru Kabupaten Situbondo mengalami penurunan, namun masih dikatakan berhasil karena telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 85% untuk angka kesembuhan. Demikian juga halnya dengan angka keberhasilan pengobatan bisa dikatakan berhasil karena sudah di atas target *success rate* >95%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan angka kesembuhan *Tuberculosis* (TB), yaitu :

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemberian suplemen vitamin bagi penderita TB. Hal ini dikarenakan Sebagian besar penderita TB adalah golongan ekonomi menengah ke bawah dan

TB mengakibatkan nafsu makan menurun sehingga diperlukan PMT berupa susu dan pemberian suplemen vitamin untuk menaikkan berat badan sehingga penderita TB mempunyai status gizi yang baik.

2. Pelacakan kasus TB mangkir oleh petugas TB puskesmas apabila terdapat penderita TB yang tidak datang mengambil obat. Pada saat pelacakan, penderita TB selalu diberi motivasi ulang tentang pentingnya keteraturan minum obat sampai tuntas.
3. Pembentukan Forum Paguyuban TB. Forum ini merupakan media untuk saling berbagi informasi tentang TB sehingga terbentuk keterikatan sosial dan psikologis di antara sesama penderita TB.

Kendala yang dihadapi dalam program penanggulangan penyakit TB yaitu:

1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor yang masih belum optimal,
2. Pencatatan dan pelaporan yang kurang tertib,
3. Partisipasi tokoh masyarakat masih kurang,
4. Pemeriksaan kontak serumah bagi pasien TB BTA positif dan kasus TB anak belum optimal.
5. Penentuan kriteria suspek TB oleh petugas terlalu ketat
6. Pot TB yang diberikan kepada pasien banyak yang tidak kembali
7. Munculnya kasus TB MDR atau TB resisten obat di Kabupaten Situbondo yaitu sebanyak 4 kasus pada tahun 2013 menjadi 8 kasus pada tahun 2014, tahun 2015 sebanyak 4 kasus, tahun 2016 sebanyak 3 kasus.
8. Meningkatnya kasus TB HIV yaitu kasus TB dengan HIV atau kasus HIV dengan TB. TB merupakan pembunuh nomor satu pada HIV. Pada tahun 2013 di Kabupaten Situbondo ditemukan sebanyak 1 kasus TB dengan HIV, pada tahun 2015 ditemukan 2 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 9 kasus.
9. Dari 10 indikator PHBS di Kabupaten Situbondo yang masih belum tercapai adalah indikator perilaku merokok di dalam rumah. Apabila perilaku merokok di dalam rumah masih tinggi maka kemungkinan penderita TB di masyarakat juga tinggi. Karena merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit TB

10. Belum berjalannya program kolaborasi PHN sehingga banyak kasus TB yang belum diperiksa status HIV-nya begitu pula sebaliknya.

Rencana tindak lanjut dalam program penanggulangan TB yaitu :

1. Kolaborasi TB HIV sehingga terbentuk jejaring yang kuat antara program TB dan HIV khususnya di rumah sakit dan Puskesmas.
2. Penyuluhan mengenai TB MDR dengan membentuk satgas anti TB MDR pada kader kesehatan sehingga diharapkan satgas ini dapat memberikan informasi yang benar tentang TB MDR kepada masyarakat dan dapat meminimalisir penolakan dari masyarakat untuk berobat.
3. Kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait dengan menghidupkan kembali Gerdunas (Gerakan Terpadu Nasional) TB melalui MOU dengan Ormas keagamaan (Aisyiah, Muslimat) dalam rangka ikut berpartisipasi pada program pengendalian TB
4. Kerjasama dengan Dinas Sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat TB
5. Pembentukan paguyuban TB setiap kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Bina Suasana dan Pemberdayaan masyarakat

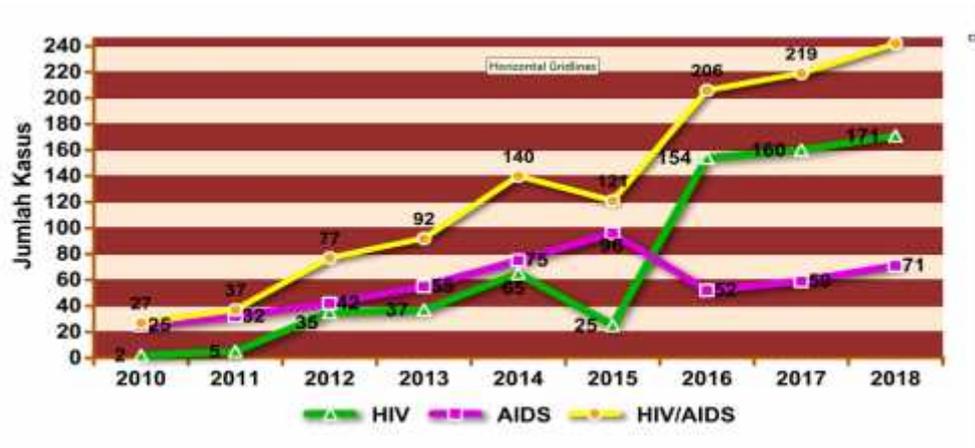
b. HIV/AIDS

AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Akibat dari penurunan daya tahan tersebut penderita jadi mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi (Infeksi Oportunistik).

Kasus HIV dan AIDS diperoleh dari laporan klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) di Rumah Sakit Abdoer Rahem serta klinik PITC (*Provider Initiative Testing and Conseling*). Di kabupaten Situbondo pada tahun tahun 2018 tercatat 171 kasus baru HIV dan 71 kasus baru AIDS. Angka ini kembali meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama 8 tahun terakhir kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo cenderung terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Padahal angka-angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi (fenomena

gunung es). Gambar 2.29 berikut menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.29 Trend Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo Tahun 2010 s.d. 2018



Sumber : Laporan Klinik VCT (*Voluntary Conseling Terapy*) Kabupaten Situbondo

Permasalahan di lapangan terkait penemuan dan penanganan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

1. SDM belum terlatih untuk program PITC (*Provider Iniatif HIV Testing dan Conseling*)
2. Pemenuhan Reagen HIV 1, 2 dan 3 belum memadai
3. Stigma masyarakat masih tinggi sehingga penderita HIV AIDS sering dikucilkan
4. Obat ARV masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pasien yang ada di Kabupaten situbondo
5. Kurangnya dukungan dari Stakeholder dan Partisipasi tokoh masyarakat terhadap Program Pengendalian Penyakit HIV AIDS
6. Masih minimnya peran serta nyata dari lintas sektor (SKPD) terkait terutama dari Kemenag, Disnaker dan Dinas Koperasi dan UKM.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang sudah dilakukan di Kabupaten Situbondo adalah sbb:

1. penyuluhan masyarakat,
2. pendampingan kelompok beresiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku,
3. layanan konseling dan testing HIV,
4. pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit menular seksual (IMS),
5. pengamanan donor darah,

6. kerjasama dengan Dinsos dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis rumah tangga dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS.
7. Melakukan pemeriksaan HIV kepada orang berisiko terinfeksi HIV, yakni ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan

c. Pneumonia Balita

Upaya dalam rangka pemberantasan penyakit infeksi saluran pernafasan akut, dalam hal ini Pneumonia lebih difokuskan pada balita karena Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian balita. Program ini diutamakan pada upaya penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia yang ditemukan. Selain itu, kecepatan keluarga dalam membawa penderita ke pelayanan kesehatan serta keterampilan petugas dalam menegakkan diagnosa merupakan kunci keberhasilan penanganan penyakit Pneumonia.

Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebanyak 2.363 kasus, yakni 119,63 % dari 1.975 perkiraan kasus. Target PKP Penemuan Penderita Pneumonia Balita tahun 2018 adalah sebesar 80%, sehingga dapat dikatakan program Pneumonia berhasil memenuhi target. Sedangkan Cakupan Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita Kabupaten Situbondo per kecamatan Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2.30 berikut .

Gambar 2.30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita Kabupaten Situbondo Per Kecamatan Tahun 2018



Sumber : Laporan Bulanan ISPA Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Gambar 2.30 di atas dapat diketahui bahwa meskipun capaian kinerja Kabupaten sudah melampaui target, namun masih ada 1 Kecamatan yang belum mencapai target yang diharapkan, yakni Kecamatan Sumbermalang (10,62%), kecamatan tersebut perlu kerja keras dan berkomitmen untuk meningkatkan capaian penemuan dan tatalaksana penderita secara cepat dan tepat. Peringkat pertama pencapaian cakupan Pneumonia Balita diraih oleh Puskesmas panji, yakni sebesar 173,8%. Sedangkan Kecamatan Sumbermalang menduduki peringkat terendah dengan pencapaian sebesar 10,62%.

Hambatan di lapangan terkait rendahnya cakupan Pneumonia Balita di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. SOP Tatalaksana P2 Pneumonia Balita belum dilaksanakan dengan maksimal, khususnya melalui program MTBS
- b. Petugas enggan menghitung jumlah nafas
- c. Petugas kurang paham terhadap tanda – tanda Pneumonia sehingga enggan untuk mengklasifikasi pasien sebagai Pneumonia
- d. Alat penghitung nafas terbatas (Ari Sound Timer)

Dengan Monitoring, Evaluasi dan bimbingan teknis yang intens ke Puskesmas dan wilayah serta kerja sama lintas program terkait MTBS (Manajemen Tata Laksana Balita Sakit) dengan program KIA diharapkan akan mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan Pneumonia Balita.

d. Diare

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Diare adalah penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena Diare. Di Indonesia, setiap tahun 100.000 balita meninggal karena diare.

Berdasarkan hasil survei *Sub Direktorat Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian*

Kesehatan RI, Angka Kesakitan Diare pada semua umur tahun 2010 adalah 411 per 1.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 214 per 1.000 penduduk dan pada tahun 2015 naik lagi menjadi 270 per 1.000 penduduk. Sedangkan Angka Kesakitan Diare pada Balita tahun 2015 adalah 843 per 1.000 Balita.

Jumlah penderita diare semua umur yang di tangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 17.549 kasus dari 18.360 perkiraan kasus diare atau sebesar 95,58 %. Sedangkan Jumlah penderita diare Balita yang di tangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 7.482. Target Pelayanan Diare adalah 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan Diare semua umur di Kabupaten Situbondo tahun 2018 sudah mencapai target.

Tata laksana program Diare pada Balita yang berkualitas melalui Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) sbb:

1. Pemberian Oralit untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi.

Di Kabupaten Situbondo semua penderita Diare Balita tahun 2017 mendapatkan oralit, yakni dari 5.867 penderita dikali 6 sachet oralit = 35.202 sachet. Dari 5.867 penderita Diare Balita tahun 2017 yang diinfus sebanyak 209 balita atau sebesar 3,56%. Angka ini sudah melebihi angka toleransi 1%, padahal semua penderita Diare sudah mendapatkan oralit yang harusnya bisa menekan kejadian dehidrasi karena infus hanya diberikan pada penderita diare dengan dehidrasi berat. Hal ini kemungkinan disebabkan oralit yang sudah diberikan oleh petugas hanya diterima saja dan tidak dikonsumsi oleh pasien



2. Pemberian sirup Zinc sesuai umur selama 10 hari berturut-turut kepada balita dengan target 80%. Zinc dapat mengurangi lama dan beratnya Diare, mencegah berulangnya Diare selama 2-3 bulan dan mengembalikan nafsu makan anak.

Di Kabupaten Situbondo dari 5.867 penderita Diare Balita tahun 2017 yang mendapat sirup Zinc sebanyak 3.523 balita atau sebesar 60,05%. Angka ini belum mencapai target 80% yang sudah ditetapkan sehingga ke depannya perlu adanya perbaikan.

3. ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat, untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang.
4. Antibiotik hanya diberikan pada diare berdarah, kolera dan diare dengan masalah lain.
5. Segera kembali ke petugas kesehatan jika ada demam, tinja berdarah, muntah berulang, makan atau minum sedikit, sangat haus diare makin sering atau belum membaik dalam 3 hari.

Tata laksana penderita Diare yang tepat diharapkan dapat mencegah terjadinya dehidrasi berat yang bisa berujung pada kematian. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan Diare diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan Diare dengan. Upaya yang dilakukan adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua sektor dan masyarakat luas. Salah satu kegiatan berkesinambungan yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan informasi atau penyuluhan dari berbagai sumber media. Keterlibatan kader juga mendukung dalam pelayanan penderita Diare, terutama untuk meningkatkan penggunaan rehidrasi oral, yakni Oralit maupun cairan rumah tangga.

2.2.4.2 Penyakit Menular Bersumber Binatang

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit *Demam Berdarah Dengue* atau *Dengue Haemorrhagic Fever* (DHF) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menimbulkan kematian. Penyakit DHF disebabkan oleh virus Dengue yang penularannya melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang hidup digenangan air bersih di sekitar rumah. Nyamuk ini mempunyai kebiasaan menggigit pada saat pagi dan sore hari, umumnya kasus mulai meningkat pada musim penghujan.

Insidens Rate DBD Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 17,65 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 121 kasus. Angka ini masih di bawah angka toleransi,

yakni 52 per 100.000 penduduk atau 5,2 per 10.000 penduduk. Kecamatan dengan insidens DBD tertinggi tahun 2018 terjadi di Kecamatan Panarukan yang mencapai angka 4,3 per 10.000 penduduk (24 kasus) dan yang terendah di Kecamatan Jangkar Tanpa ada kasus.

Hambatan di lapangan terkait program penanganan DBD di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan mesin fogging yang kurang dipahami dan tidak diperhatikan sehingga banyak yang rusak
- b. SOP Tatalaksana P2 DBD belum maksimal dilaksanakan
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Gerakan 3 M (Menutup, Menguras dan Memanfaatkan kembali/daur ulang)
- d. Masih kurangnya koordinasi dan peran lintas program dan lintas sektor
- e. Adanya persepsi bahwa masalah DBD hanya menjadi masalah sektor kesehatan

Upaya pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pemberantasan sarang nyamuk (gerakan 3 M plus), pemantauan angka bebas jentik (ABJ) serta pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Situbondo untuk menurunkan angka kesakitan DBD di Kabupaten Situbondo adalah dengan Pembentukan Kawasan Bebas Jentik melalui pembentukan kader terlatih DBD atau Jumantik, Pelatihan kader PSN sekolah dan program satu rumah satu jumantik terutama untuk daerah yang endemis DBD yang sudah direalisasikan di tahun 2017.

2.2.4.3 Penyakit menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas atau ditekan dengan imunisasi.

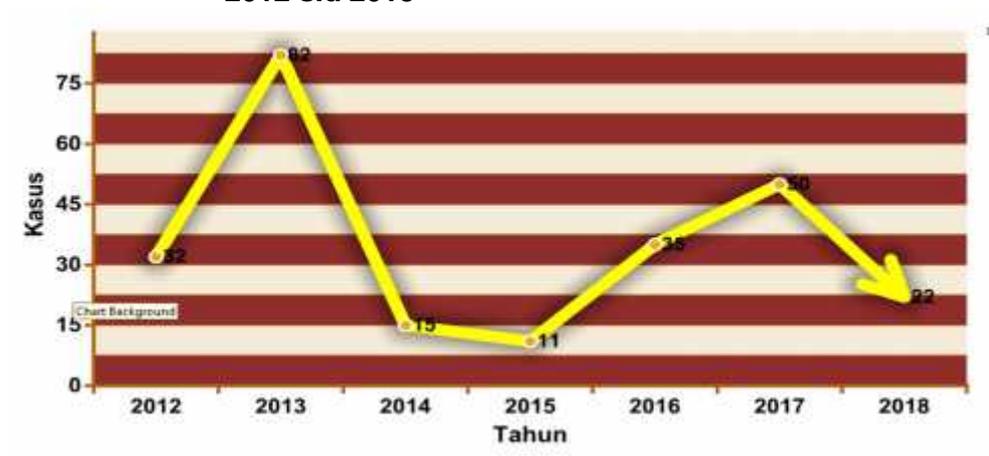
a. Campak

Campak adalah penyakit yang disebabkan virus morbili yang disebarkan melalui droplet dari penderita. Gejala awal penyakit

adalah demam, bercak kemerahan, batuk-pilek, mata merah (*conjunctivitis*) selanjutnya timbul ruam di seluruh tubuh. Penyakit Campak sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Kematian akibat campak pada umumnya disebabkan kasus komplikasi seperti meningitis dan Pneumonia.

Berikut ini disajikan Perkembangan kasus Campak di Kabupaten Situbondo tahun 2012 s.d 2018.

Gambar 2.31 Trend Kasus Campak di Kabupaten Situbondo Tahun 2012 s.d 2018



Sumber: Laporan Program Surveilans Campak Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Grafik perkembangan kasus campak di Kabupaten Situbondo tampak fluktuatif. Kasus campak di Kabupaten Situbondo tahun 2013 mengalami masa puncak selama enam tahun terakhir, yakni sebanyak 82 kasus. Bahkan, kenaikan kasus di tahun 2013 ini menyebabkan 5 kasus KLB Campak. Tahun 2014 kasus campak menurun sangat tajam menjadi 15 kasus. Di tahun 2015 kasus campak kembali menurun menjadi 11 kasus dan kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 35 kasus dan tahun 2017 menjadi 50 kasus dan tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya 22 kasus selisih 28 kasus di Tahun 2017.

Untuk mencegah kenaikan kasus di tahun – tahun yang akan datang diperlukan peningkatan pembinaan secara terpadu, koordinasi dan kemitraan dengan organisasi massa. Peningkatan program imunisasi dan intervensi untuk menemukan KIB diantaranya melalui IRI dan ORI (*Outbreak Respons Immunization*) juga mutlak diperlukan.

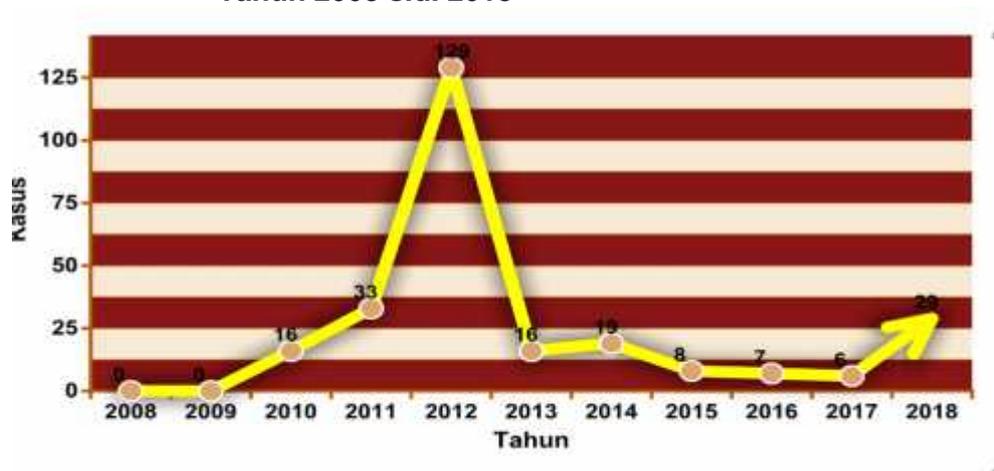
b. Difteri

Difteri merupakan kasus “*Re Emerging Disease*” di Jawa Timur karena kasus Difteri sebenarnya sudah menurun pada tahun 1985, namun kembali meningkat pada tahun 2005 saat terjadi KLB di Bangkalan. Dan sejak itu, penyebaran Difteri semakin meluas dan mencapai puncaknya pada tahun 2010 sebanyak 300 kasus dengan 21 kematian dan Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang kasus Difteri terbesar di Indonesia (74%) bahkan di dunia. Gubernur Jawa Timur menyatakan Propinsi Jatim saat ini berstatus KLB Difteri karena penyakit yang disebabkan bakteri itu menyebar di 14 kabupaten dan kota. Untuk penanganan kasus dan memutus rantai difteri, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Outbreak Response Immunization (ORI) dengan skema pembiayaan sharing antara provinsi dan daerah masing-masing 50 persen. ORI Difteri merupakan kegiatan vaksin imunisasi pada anak berusia 1-19 tahun di seluruh Jatim sebanyak 10.717.765 orang. Imunisasi diberikan sebanyak tiga kali dengan interval 5 bulan.

Penyakit Difteri di Kabupaten Situbondo mulai muncul tahun 2010 dan mencapai puncaknya pada tahun 2012. Bahkan, jumlah kasus Difteri di Kabupaten Situbondo tahun 2012 adalah yang tertinggi di Jawa Timur, yakni sebanyak 129 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 7 orang (*Case Fatality Rate* 5,43%) dan ketujuh penderita Difteri yang meninggal tersebut sebelumnya tidak pernah mendapatkan imunisasi Difteri. Kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan kasus Difteri yang cukup signifikan, yakni dari 129 kasus menjadi 16 kasus dengan kematian sebanyak dua orang. Pada tahun 2014 kasus Difteri kembali meningkat menjadi 19 kasus dan di tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 8 kasus dan satu diantaranya meninggal (Kecamatan Kendit). Di tahun 2016 kasus Difteri menurun menjadi 7 kasus dan di tahun 2017 kembali menurun menjadi 6 kasus dan di Tahun 2018 29 Kasus difteri tahun 2018 tersebar di sembilan kecamatan, yakni Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Situbondo, Mangaran, Panji, kapongan, Jangkar, Asembagus, Banyuputih

Gambar 2.32. di bawah ini menyajikan perkembangan penyakit Difteri di Kabupaten Situbondo dari tahun 2008 s.d 2018.

Gambar 2.32. Perkembangan Penyakit Difteri di Kabupaten Situbondo Tahun 2008 s.d. 2018



Sumber : Laporan Program Surveilans Difteri Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus Difteri adalah dengan melakukan imunisasi dasar pada bayi dengan vaksin Difteri-Pertusis-Tetanus dan Hepatitis B HIB (Pentavalen). Vaksin tersebut diberikan 3 (tiga) kali yaitu pada umur 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan serta booster satu kali pada usia 18 bulan s.d 3 tahun. Selain itu, karena terjadi lonjakan kasus pada anak usia sekolah maka imunisasi tambahan Tetanus Difteri (TD) juga diberikan pada anak Sekolah Dasar (SD) sederajat kelas 4-6 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta ORI pada daerah yang terkena kasus Difteri.

c. Pertusis

Pertusis adalah penyakit yang disebabkan bakteri *Bardetella pertusis* dengan gejala batuk beruntun disertai tarikan nafas *hup (whoop)* yang khas dan muntah. Lama batuk bisa 1-3 bulan sehingga disebut batuk 100 hari. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak berusia dibawah satu tahun dan penularannya melalui droplet atau batuk penderita.

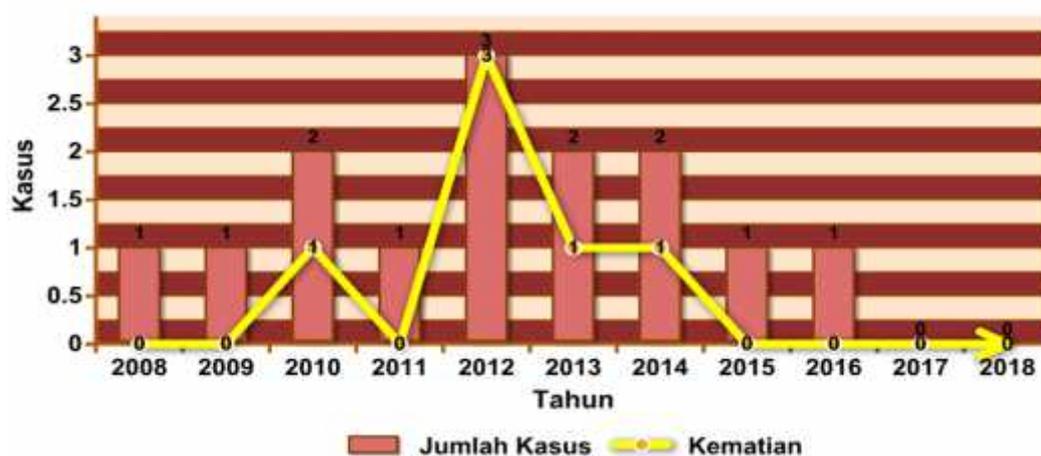
Sejak tahun 2013 s.d 2018 di Kabupaten Situbondo tidak ditemukan kasus Pertusis . Upaya pencegahan kasus Pertusis dilakukan melalui imunisasi DPT+HB sebanyak 3 kali yaitu saat usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan atau usia yang lebih dari itu tetapi masih dibawah 1 tahun (usia s/d 11 bulan).

d. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum (TN) adalah penyakit yang disebabkan *Clostridium tetani* pada bayi (umur < 28 hari) yang dapat menyebabkan kematian. Penanganan Tetanus neonatorum tidak mudah, sehingga yang terpenting adalah upaya pencegahan melalui pertolongan persalinan yang higienis dan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) ibu hamil serta perawatan tali pusat.

Untuk pertama kalinya di tahun 2018 selama 10 tahun terakhir kasus Tetanus Neonatorum tidak muncul di Kabupaten Situbondo. Padahal sebelumnya kasus Tetanus Neonatorum selalu muncul dari tahun ke tahun. Trend kasus TN di Kabupaten Situbondo Tahun 2008 s.d. 2016 disajikan pada Gambar 2.33 berikut.

Gambar 2.33 Trend Kasus Tetanus Neonatorum (TN) di Kabupaten Situbondo Tahun 2008 – 2018



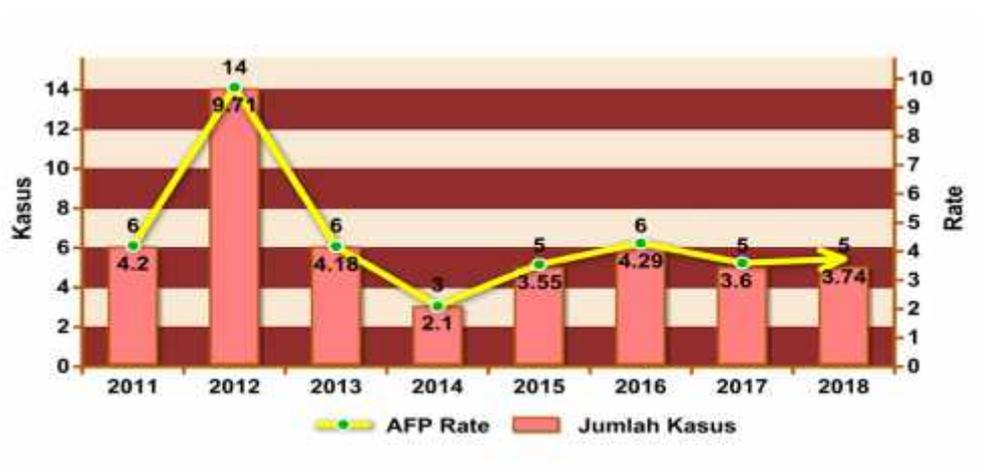
Sumber: Laporan KLB Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

e. AFP (Acute Flacid Paralysis)

Poliomyelitis atau polio merupakan penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan virus polio. Cara penularan Polio terbanyak melalui mulut ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi lendir, dahak atau feses penderita polio. Virus masuk aliran darah ke sistem saraf pusat menyebabkan otot melemah dan kelumpuhan, menyebabkan tungkai menjadi lemas secara akut. Penyakit polio harus dibuktikan masih ada atau sudah tidak ada yang dibuktikan dengan penemuan kasus AFP (*Acute Flaccid Paralysis*). Kegiatan surveilans AFP menjadi salah satu kunci dalam mencapai Eradikasi Polio (Erapo), sehingga diharapkan suatu saat dunia ini akan bebas dari penyakit Polio.

Penemuan kasus AFP di Kabupaten Situbondo selama tujuh tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2012, yakni sebanyak 14 kasus. Kemudian mengalami trend menurun di tahun 2013 dan 2014 menjadi masing-masing 6 kasus dan 3 kasus, lalu meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 5 kasus, di 2016 menjadi 6 kasus dan tahun 2017 menjadi 5 kasus. Dengan penemuan 5 kasus AFP dari 138.726 penduduk usia < 15 tahun, maka AFP rate tahun 2017 sebesar 3,60 per 100.000 penduduk usia <15 tahun (Lampiran Profil Tabel 18). Dengan target sebesar 2, maka indikator AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun sudah tercapai. Trend Penemuan Kasus AFP Tahun 2011 s.d. 2018 di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut.

Gambar 2.34 Trend Penemuan Kasus AFP di Kabupaten Situbondo Tahun 2011 s.d. 2018



Sumber: Laporan KLB Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo

2.2.5.4 Penyakit Tidak Menular

Indonesia mengalami transisi Epidemiologi, yakni mengalami pergeseran tren penyakit, yakni dari penyakit menular berbahaya (PMB) ke penyakit tak menular (PTM). Pada tahun 1990-an, penyakit terbanyak adalah PMB, kemudian di tahun 2000 ke atas, mulai bergeser ke PTM. Sejak tahun 2010 PTM menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan. Sepuluh penyebab kematian utama (semua umur) hasil Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa 6 dari 10 penyakit tersebut adalah PTM, yakni Stroke di peringkat pertama (21,1%), Jantung Koroner di peringkat kedua (12,9%), Diabetes Mellitus dengan komplikasi di peringkat ketiga (6,7%), Hipertensi dengan

komplikasi di peringkat kelima (5,3%), Penyakit Paru Obstruksi Klinis di peringkat keenam (4,9%) dan kecelakaan lalu lintas di peringkat kedelapan (2,6%). Sedangkan beban PTM pada usia >15 tahun adalah Hipertensi (25,8% atau 42,1 juta jiwa), obesitas sentral (26,6% atau 44,3 juta jiwa) dan Diabetes Mellitus (6,9% atau 8,10 juta jiwa) stroke (1,21% atau 1,2 juta jiwa),

Selain transisi epidemiologi, Indonesia juga mengalami masa transisi gizi, yakni permasalahan gizi tidak hanya gizi kurang/gizi buruk, Balita pendek/balita kurus saja tetapi juga masalah gizi lebih, kegemukan dan obesitas baik pada anak-anak, remaja maupun dewasa yang merupakan faktor risiko terjadinya PTM.

Hasil Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa faktor risiko PTM di Indonesia cukup tinggi, yakni 26,1% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik, 93,5% penduduk usia >10 tahun di Indonesia kurang mengonsumsi buah dan sayur, 36,3% penduduk Indonesia usia >15 tahun merokok dan 4,6% penduduk mengonsumsi alkohol. Semua faktor risiko tersebut terkait dengan perilaku atau gaya hidup yang akan menjadi masalah jika tidak segera diperbaiki. Tanpa upaya yang kuat dengan Gaya Hidup Sehat (GHS), tren peningkatan PTM ke depan masih akan terjadi. Sayangnya sebagian besar masyarakat tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa dirinya memiliki faktor risiko PTM sehingga perlu upaya yang adekuat dari Pemerintah untuk menekan penambahan kasus PTM, salah satunya melalui skrining PTM terutama pada usia 15 tahun dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat penderita PTM seperti Hipertensi dan Diabetes sesuai standar yang sudah diatur dalam Permenkes No.43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berikut ini akan dibahas beberapa penyakit tidak menular seperti, Hipertensi, Diabetes .

a. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg (*Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure VII/JNC-VII, 2003*). Setiap Penduduk berusia >15 tahun wajib

dilakukan pengukuran tekanan darah minimal satu tahun sekali. Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar gedung.

Hasil skrining pada usia 15-59 tahun di Kabupaten Situbondo tahun 2018 menunjukkan dari 549.346 penduduk yang diperiksa 379.338 diantaranya menderita Hipertensi atau sebesar 18,71%.

b. Diabetes

Setiap Penduduk berusia >15 tahun wajib dilakukan deteksi kemungkinan Diabetes menggunakan tes cepat gula darah minimal satu tahun sekali. Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar gedung.

Setiap penderita Diabetes Melitus wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang Diabetes Melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya (Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal). Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut: a) Edukasi b) Aktifitas fisik c) Terapi nutrisi medis dan d) Intervensi farmakologis. Selain itu, setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk juga pemeriksaan HbA1C.

Hasil skrining pada usia 15-59 tahun di Kabupaten Situbondo tahun 2017 menunjukkan dari 158.503 penduduk yang berkunjung ke fasilitas kesehatan hanya 5.236 diantaranya menderita Diabetes atau sebesar 3,3%. Sedangkan hasil skrining pada lansia menunjukkan dari 69.850 lansia yang diperiksa 2.328 diantaranya menderita Diabetes atau sebesar 3,3%. Dengan demikian diketahui bahwa total penderita Diabetes di Kabupaten situbondo tahun 2018 sebesar 129.957 dari 379.338 sasaran atau 3,24%. Namun, angka ini sebenarnya kurang menggambarkan kondisi Kabupaten Situbondo karena masih jauh dari angka

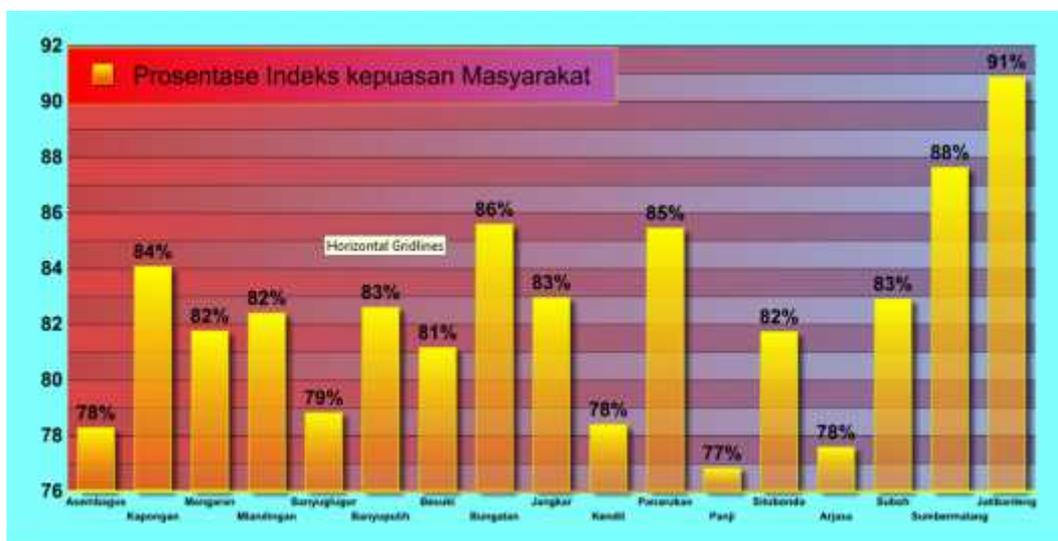
perkiraan Diabetes hasil Riskesdas tahun 2007, yakni sebesar 6,9% atau 37.120 penderita Diabetes. Rendahnya penemuan kasus Diabetes di Kabupaten Situbondo dikarenakan data yang tercatat saat ini hanya bersumber dari Puskesmas dan jaringannya, sedangkan data dari rumah sakit, klinik swasta, Laboratorium swasta dan praktek dokter swasta belum terjaring

2.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat di 17 Puskesmas pada tahun 2018 adalah 82,28%. Target yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 79%, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Situbondo sudah mencapai target. Terdapat 12 puskesmas mencapai target dan 5 puskesmas belum mencapai target IKM pelayanan kesehatan.

Gambar 2.35 IKM pada 17 Puskesmas Tahun 2018



Sumber : Hasil Survei IKM

Ada beberapa temuan yang dari Survei Kepuasan Masyarakat diantaranya yaitu:

- Kepuasan masyarakat Situbondo terhadap keseluruhan layanan yang diberikan oleh puskesmas cukup baik. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan pada bulan Oktober 2018 menunjukkan bahwa 87,4 persen responden menunjukkan bahwa layanan kesehatan di Situbondo Baik.
- Berdasarkan kelompok jenis kelamin prosentase paling besar atas ketidakpuasan layanan di puskesmas adalah pada kelompok laki – laki (47.7%), sementara kepuasan atas layanan pada kelompok perempuan (39%).
- Dari 18 aspek penilaian yang dilakukan di 17 Puskesmas menunjukkan bahwa rata – rata nilai indeks sebesar 3.29 dengan indeks konversi 82,24. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja layanan kesehatan di 17 Puskesmas menunjukkan BAIK.
- Diantara 18 atribut penilaian yang dinilai paling baik oleh masyarakat Situbondo adalah unsur “Dokter menjelaskan diagnosa penyakit yang diderita pasien”, sementara yang perlu untuk dibenahi adalah unsur ketersediaan sarana pengaduan dan tindak lanjut atas aduan.
- Responden menilai bahwa atribut yang paling urgen adalah aspek keramahan petugas dalam memberikan layanan, selanjutnya dokter menjelaskan diagnosa penyakit, dan sarana prasarana yang tersedia memadai
- Berdasarkan kelompok pendapatan responden dengan pendapatan kurang dari RP. 750.000,- merupakan responden yang puas atas

layanan puskesmas di Situbondo, sebaliknya responden berpendapatan RP. 2.500.000 – RP. 3.500.000 merupakan kelompok yang tidak puas.

- g) Berdasarkan kelompok mekanisme pembayaran, responden yang membayar dengan menggunakan fasilitas BPJS – NON PBI merupakan kelompok yang paling tidak puas, sementara responden dengan yang melakukan pembayaran umum (mandiri) merupakan kelompok yang puas atas layanan kesehatan yang diberikan.
- h) Responden yang memanfaatkan layanan rawat inap dan gigi merupakan responden yang puas atas layanan puskesmas di Situbondo, sementara responden yang memanfaatkan layanan Gizi dan IGD merupakan kelompok responden yang tidak puas

Berdasarkan berbagai temuan dalam survei ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk melakukan berbagai perbaikan di waktu yang akan datang.

Adapun saran yang kami berikan antara lain:

- (b) Sebaiknya pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan
- (c) Puskesmas di masing-masing kecamatan segera melakukan perbaikan sesuai harapan dari masyarakat agar pelayanan yang diberikan prima (Service Excelent)
- (d) Aspek fundamental dalam pelayanan seperti pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pemanfaat layanan. Selain itu, aspek peningkatan kapasitas tenaga medis perlu ditingkatkan, dan jumlah tenaga medis seimbang dengan jumlah pemanfaat layanan
- (e) Sebaiknya pemerintah daerah menciptakan sistem yang mengkoordinir saran dan usulan perbaikan yang bisa diakses oleh masyarakat misalnya dengan menciptakan wistle blowing system agar saran dan masukan bisa segera ditindaklanjuti

2.2.5.2 IKM Rumah Sakit

Hasil survei kepuasan masyarakat di 3 Rumah Sakit pada tahun 2018 adalah 78,08%. Target yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 789%, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Situbondo sudah mencapai target. Terdapat 2 Rumah

Sakit yang belum mencapai target IKM pelayanan kesehatan yaitu RSUD Besuki dan RSUD Asembagus di gambarkan pada gambar 2.36.

Gambar 2.36 Hasil IKM Rumah Sakit.



Rekomendasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit :

1. Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bisa dijadikan dasar atau bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua unit pelayanan di Kabupaten Situbondo.
2. Hasil survei dapat digunakan untuk membuat program ataupun kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kabupaten Situbondo.
3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu sekali dengan responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja unit pelayanan masyarakat.
4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat seharusnya di survei pihak ke 3

2.2.6 Indikator Yang Mendukung Mutu Pelayanan kesehatan

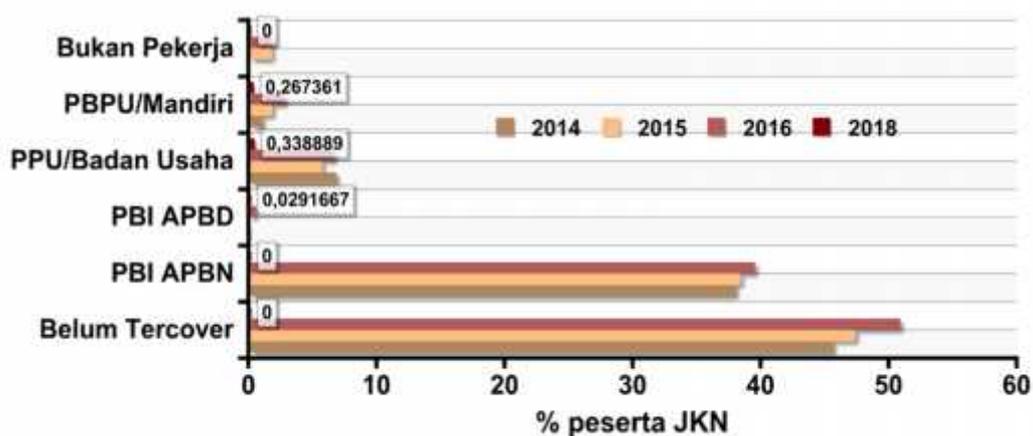
2.2.6.1 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu wujud dari Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Peserta merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia

yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan Peserta Bukan PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Selama empat tahun terakhir jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebagai awal penyelenggaraan JKN, 302.433 penduduk (45,49%) kabupaten Situbondo sudah tercover dalam JKN, kemudian tahun 2015 mencapai 316.358 jiwa (47,24%), tahun 2016 meningkat lagi menjadi 341.696 jiwa atau 50,75% dan di tahun 2017 mencapai 360.636 jiwa (53,29%) dan tahun 2018 mencapai 922.662 (62,16%) seperti terlihat pada Gambar 2.37 berikut.

Gambar 2.37 Trend Kepemilikan Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 s.d 2018



Kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan secara *prospectif payment* merupakan salah satu indikator penting untuk kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dan merupakan indikator keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan peta jalan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dimana minimal 95% total penduduk pada tahun 2019 telah menjadi peserta JKN, maka untuk Kabupaten Situbondo diharapkan kondisi tersebut dapat dicapai pada tahun 2019. Oleh karena itu upaya dari setiap pihak yang terkait dengan JKN haruslah berjalan secara sinergis. Di sisi yang lain, aspek

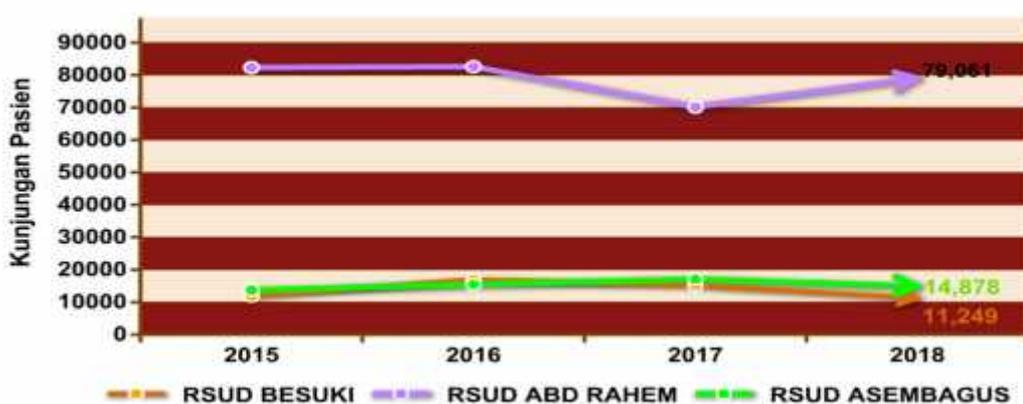
ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat berupa Puskesmas, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi Swasta, Klinik Pratama dan juga fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang berupa Rumah Sakit Umum maupun khusus dan juga klinik utama harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan merata sehingga akses peserta/penduduk terhadap fasilitas kesehatan lebih mudah dan terjangkau. Demikian pula untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta tenaga penunjang kesehatan yang lainnya harus dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

2.2.2.6.2 Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sampai dengan tahun 2018 jumlah Rumah Sakit Miliki Pemerintah di Kabupaten Situbondo sebanyak Tiga unit, yakni Rumah Sakit Umum Abdoer Rahem, Rumah Sakit Umum Besuki, Rumah Sakit Umum Asembagus.

Dari 2 RS yang ada di Kabupaten Situbondo, ada 2 yang mengalami penurunan jumlah kunjungan RSUD Besuki, RSUD Asembagus sedangkan RSUD Abdoer Rahem mengalami Peningkatan di Tahun 2018 Gambar 3.38 di bawah ini menunjukkan kunjungan rumah sakit di Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2018

Gambar 2.38. Trend Kunjungan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Rumah Sakit Di Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2018



Sumber: Laporan Kunjungan Rumah Sakit Tahun 2011-2018

Rumah Sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan dan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperhatikan mutu dan kualitas pelayanan kesehatannya. Mutu pelayanan rumah sakit diantaranya dapat dilihat dari aspek-aspek

penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan serta keselamatan pasien. Beberapa indikator untuk mengetahui mutu efisiensi rumah sakit antara lain : pemanfaatan tempat tidur, pemanfaatan tenaga, pemanfaatan penunjang medik, dan keuangan. Indikator pemanfaatan tempat tidur sendiri yang mudah kita lihat dan kita ketahui adalah melalui angka BOR / *Bed Occupancy Rate*, BTO / *Bed Turn Over*, ALOS / *Average Length Of Stay*, TOI / *Turn Over Interval*.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE N KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWA TAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RSUD Abdoer Rahem	220	15,020	52,942	63,153	65.9	68.3	1.8	4.2
2	RSUD Besuki	69	2,651	7,579	8,899	30.1	38.4	6.6	3.4
3	RSUD Asembagus	50	3,163	9,284	6,025	50.9	63.3	2.8	1.9
KABUPATEN/KOTA		508	32,513	99,570	112,052				

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

BOR merupakan indikator untuk menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Jumlah tempat tidur (TT) yang tersebar di seluruh rumah sakit di Kabupaten Situbondo mencapai 508 TT. Jumlah tempat tidur (TT) yang terus meningkat diharapkan bisa menampung kebutuhan TT rawat inap seluruh daerah di Kabupaten Situbondo. Kapasitas tidur yang mencukupi akan menunjang mutu pelayanan.

b. TOI (Turn Over Interval)

TOI merupakan indikator untuk menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit. Idealnya adalah 1-3 hari. Rentang TOI yang pendek menunjukkan banyaknya pasien yang harus dilayani sedangkan rentang yang sangat panjang disebabkan masih sedikitnya pasien yang dirawat karena keberadaan rumah sakit yang masih baru berdiri atau mungkin kurang diminati masyarakat. Rata-rata TOI rumah sakit di Kabupaten Situbondo sudah sesuai standar, yakni 1,9 hari.

c. ALOS (Average Length Of Stay)

ALOS merupakan indikator untuk mengukur rata-rata lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS untuk RS adalah < 9 hari. ALOS terlalu rendah mengindikasikan kurangnya kepercayaan masyarakat dan bila terlalu tinggi mengindikasikan lambatnya penanganan oleh tenaga medis.

2.2.2.6.3 Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi

Dasar Hukum

1. Undang – Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang – Undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasannya dengan : standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan dan BPJS
5. Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
6. Permenkes No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi

Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. Meningkatkan perlindungan bagi sumberdaya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas sebagai institusi; dan
- c. Meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/ atau kesehatan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama (FKTP) yaitu puskesmas, wajib terakreditasi dan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo sebanyak 17 (tujuh belas).

2.2.2.5.4 Ketersediaan Obat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Obat Nasional Tahun 2006, dalam rangka upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Maka dari itu, dalam hal ini, Pemerintah memiliki kewajiban untuk turut serta menjamin ketersediaan obat yang ada di wilayah kerjanya masing-masing, salah satunya adalah ketersediaan obat yang ada di pelayanan kesehatan tingkat dasar milik pemerintah yaitu Puskesmas.

Dalam rangka mengevaluasi tingkat ketersediaan obat dan vaksin dalam satu wilayah, maka disusunlah suatu alat / tools yang dapat digunakan untuk mengukur nilai ketersediaan obat dan vaksin yang ada. Adapun alat ukur ketersediaan obat dan vaksin ini mengalami perubahan dari alat ukur sebelumnya. Perubahan yang ada yaitu dalam hal cara perhitungan nilai ketersediaan obat dan vaksin serta jumlah item obat dan vaksin yang diukur. Sebelumnya evaluasi dilakukan dengan cara menghitung persentase dari perbandingan jumlah obat dan vaksin yang dibutuhkan di sarana IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dengan jumlah obat dan vaksin yang tersedia di sarana IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dalam satu tahun untuk 144 item obat, sedangkan saat ini evaluasi dilakukan dengan cara menghitung persentase dari penilaian terhadap obat dan vaksin yang tersedia di sarana FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dalam hal ini melalui Puskesmas) dibanding obat dan vaksin yang diharapkan tersedia di sarana FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dalam hal ini melalui Puskesmas) dalam satu bulan untuk 20 item obat. Adapun ketentuan terkait sasaran perhitungan dan jenis item obat yang diukur nilai ketersediaannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sasaran : Puskesmas yang melaporkan data ketersediaan obat dan vaksin adalah seluruh Puskesmas di Indonesia, dalam hal ini adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo;
- b. Dasar pemilihan item obat dan vaksin : obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program kesehatan ibu,

kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional, yang terdiri dari :

Tabel 2.6 Tabel Item Obat Dan Vaksin

NO.	NAMA OBAT	Bentuk Sediaan
1	Albendazol	Tablet
2	Amoxicillin 500 mg	Tablet
3	Amoxicillin	Sirup
4	Deksametason	Tablet
5	Diazepam 5 mg/MI	Injeksi
6	Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL)	Injeksi
7	Fitomenadion (Vitamin K)	Injeksi
8	Furosemid 40 mg / HCT	Tablet
9	Garam Oralit	Serbuk
10	Glibenklamid / Metformin	Tablet
11	Kaptopril	Tablet
12	Magnesium Sulfat 20%	Injeksi
13	Magnesium Maleat 0,200 mg - 1 ml	Injeksi
14	Obat Anti Tuberculosis Dewasa	Tablet
15	Oksitosin	Injeksi
16	Paracetamol 500 mg	Tablet
17	Tablet Tambah Darah	Tablet
18	Vaksin BCG	Injeksi
19	Vaksin TT	Injeksi
20	Vaksin DPT/DPT-HB/DPT-HB-Hib	Injeksi

- c. Mekanisme pengumpulan data : periode pencatatan data di Puskesmas dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya; jika tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka pencatatan dilakukan pada hari kerja berikutnya; Puskesmas melaporkan data ketersediaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
- d. Cara perhitungan : jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas dibagi dengan hasil perkalian dari jumlah Puskesmas yang melapor dikali jumlah total item obat indikator, yang kemudian dikali dengan 100 %.
- e. Target : standar nilai ketersediaan obat dan vaksin dengan 20 indikator obat dan vaksin yang telah ditetapkan adalah sebesar 80% atau sama dengan minimal 16 item obat dan vaksin tersedia untuk pelayanan.

Dari hasil perhitungan nilai ketersediaan obat dan vaksin periode bulan Januari sampai Desember tahun 2018 rata-rata tingkat ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Situbondo sebesar 95,29% dan sudah di atas target 80% yang ditetapkan.

Kebijakan/tindakan strategi dalam mengatasi masalah Indikator Kinerja

Tabel 2.5 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENURUNAN AKI DAN AKB :

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
<i>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</i>	a. Angka Kematian Ibu b. Angka Kematian Bayi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Koordinasi antara Provinsi dan Kab/Kota dalam Penurunan AKI & AKB 2. Meningkatkan Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM 3. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi dan Institusi pendidikan 4. Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan Medis Pelayanan Maternal Neonatal 5. Koordinasi pembiayaan terkait dengan rujukan maternal neonatal 6. Meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah tentang penurunan AKI- AKB 7. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan ibu dan anak 8. Fasilitasi sistem informasi bidang kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 9. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan Nakes Mandiri/Kebijakan <i>In House Training</i>/Pemberdayaan pelatihan oleh organisasi profesi contoh : P2KS) 10. Peningkatan sosialisasi

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>tentang pentingnya program kesehatan/promotif preventif bagi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Optimalisasi tata laksana kematian ibu dan bayi disemua jenjang pelayanan kesehatan 12. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Dokter spesialis/ mengikutsertakan program PDBSBK 13. Pengembangan Regionalisasi Sistem Rujukan 14. Pemetaan Sumber Daya dan Manajemen Puskesmas 15. Peningkatan Pengetahuan Nakes pada deteksi dini bumil resiko tinggi, 16. Program <i>Improvement Collaborating</i> PONEK-PONEK 17. Peningkatan informasi dan tehnologi untuk pemetaan ibu hamil 18. Optimalisasi AMP pada kasus kematian ibu 19. Pendampingan Ibu hamil dan Ibu Hamil Resti terintegrasi dengan institusi pendidikan Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo. 20. Melakukan pendampingan ibu hamil Risti oleh kader bersama dengan Promkes. 21. Pengawalan ibu hamil risti dan komplikasi sampai ditempat rujukan dan nifas dirumah oleh team Gerdu Penakib Kabupaten dan Satgas Gerdu Penakib Desa serta kecamatan. 22. Workshop akselerasi kematian Ibu dan bayi 23. Melaksanakan ANC terpadu kepada semua ibu hamil di semua kecamatan dan desa.

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>24. Pengoptimalan kader Posyandu dengan membentuk kader asuh.</p> <p>25. Membentuk kelas Kakek Nenek di 5 kecamatan (Rencana seluruh kecamatan).</p> <p>26. Membentuk kelas Ibu Hamil disemua Desa dan Kelas Ibu Balita di 14 Desa (Rencana seluruh Desa/ kelurahan).</p> <p>27. Kemitraan bidan dan dukun baik selama kehamilan, bersalin maupun nifas pada semua kecamatan.</p> <p>28. Pengendalian Ibu Hamil Resiko Tinggi melalui aplikasi Si Messem (Sistim Informasin Managemen elektronik Situbondo Sehat Mantap)</p>

Tabel 2.6 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENURUNAN PREVALENSI GIZI BURUK :

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase balita gizi buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting 2. Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif 3. Melakukan penguatan terhadap Tim Pangan dan Gizi 4. Mendorong penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan tempat-tempat umum sesuai dengan PP 33/2012 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keamanan pangan 6. Meningkatkan cakupan pemulihan gizi buruk melalui pembentukan Pusat

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
		Pemulihan Gizi (TFC) di Puskesmas Perawatan 7. Meningkatkan jumlah nutrisisionis bekerja sama dengan institusi pendidikan gizi 8. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gizi buruk 9. Melakukan sosialialisasi pemberian makanan pada bayi dan anak untuk merubah pola asuh dan budaya masyarakat 10. Mengoptimalkan RPG (Rumah Pemulihan Gizi)

Tabel 2.7 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM IKM PELAYANANKESIHATAN :

Sasaran	INDIKATOR	STRATEGI
Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat	a. % Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar b. % Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar	1. Optimalisasi Koordinasi antara Provinsi dan Kab/Kota dalam kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 2. Meningkatkan Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan 3. Fasilitasi Tenaga spesialis dan Rekomendasi Usulan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan 4. Koordinasi Distribusi Obat dan Vaksin pada fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan

Sasaran	INDIKATOR	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi dan Institusi pendidikan 6. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes) 7. Penguatasn sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan 8. Kebijakan Penanganan Keluhan Pasien di Fasilitas Kesehatan 9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan 10. meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta 11. Membuat model Fasilitas kesehatan terakreditasi 12. Fasilitasi Clinical Pathways di fasilitas kesehatan rujukan untuk kasus-kasus terbanyak dan membutuhkan biaya yang tinggi 13. Fasilitasi sistem informasi bidang kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan

Sasaran	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>14. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan Nakes Mandiri/Kebijakan In House Training/Pemberdayaan pelatihan oleh organisasi profesi contoh : P2KS)</p> <p>15. Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya program kesehatan/promotif preventif bagi masyarakat</p> <p>16. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Dokter spesialis/ mengikutsertakan program PDBSBK</p> <p>17. Pemetaan Sumber Daya dan Manajemen Puskesmas</p> <p>18. Kebijakan akreditasi mutu sesuai kondisi sumber daya fasilitas kesehatan puskesmas (dasar, madya, utama, paripurna)</p>

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tersebut disajikan pada **tabel T-C.29** sesuai dengan format terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dapat diketahui dari dua hal yakni tingkat derajat kesehatan masyarakat dan capaian program pelayanan kesehatan terhadap SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari capaian berikut :

1) Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Stadar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Berikut merupakan hasil pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan kabupaten Situbondo (12 Indikator) pada tahun 2018 :

Tabel 2.8 Hasil capaian SPM tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET (%)	(A)/(B) (%)	KETERANGAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	84.07%	TIDAK TERCAPAI
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	97.55%	TIDAK TERCAPAI
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100.16%	TERCAPAI
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	93.50%	TIDAK TERCAPAI
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	99.18%	TIDAK TERCAPAI
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	76.63%	TIDAK TERCAPAI
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	62.24%	TIDAK TERCAPAI
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	66.78%	TIDAK TERCAPAI
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	1.02%	TIDAK TERCAPAI
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100.00%	TERCAPAI

11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	80%	100.00%	TERCAPAI
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	91.48%	TIDAK TERCAPAI

Karena adanya perubahan SPM dari Permenkes 741 Tahun 2008 yang terdiri 22 indikator menjadi Permenkes 43 Tahun 2016 terdiri 12 Indikator dengan Target 100% maka untuk capaian SPM belum sepenuhnya tercapai yang tercapai kinerjanya hanyalah 3 indikator yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat dan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB.

2) Capaian Indikator Kinerja Utama

Berikut merupakan hasil capaian indikator kinerja tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9 Hasil capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018
1	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	110 (per 100.000 kelahiran hidup)	141,6/ 100.000 KH kelahiran
			Angka Kematian Bayi	15 (per 1000 kelahiran hidup)	13,2/ 1000 KH kelahiran hidup
			Prevalensi gizi Buruk	1.9%	0,29%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76	79%	82,28 %

			Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76	78%	78,08 %
--	--	--	---	-----	----------------

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terdapat di **halaman Lampiran**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya dibidang kesehatan. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa timur, arah kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar, belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan, masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, Masih tingginya AKI dan AKB, masalah gizi buruk, sering terjadi kekosongan obat dan distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Demikian juga Isu penting yang ada di Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Kesehatan, ada empat isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target SDG's; 3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di DTPK.

Selain empat isu pokok di atas, isu strategis yang berkembang di Kabupaten Situbondo adalah:

1. Masalah gizi buruk.

2. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
3. Pemenuhan SDM tenaga kesehatan baik kuantitas dan kualitas.
4. Distribusi tenaga kesehatan belum merata.
5. Penyediaan dana obat dan perbekalan kesehatan belum memadai.
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap PHBS masih rendah.
7. Meningkatnya kasus ATM khususnya HIV/AIDS dan TB
8. Penyakit potensi KLB/ wabah masih tinggi.
9. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.
10. Belum optimalnya jaminan pembiayaan kesehatan terhadap masyarakat miskin.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo adalah :

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Status Gizi Masyarakat masih rendah.
- b. Distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Situbondo masih belum merata, yang mana sebagian besar tenaga kesehatan terpusat di wilayah kota.
- c. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang belum memadai.
ketersediaan obat dan vaksin periode bulan Januari sampai Desember tahun 2017 rata-rata tingkat ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Situbondo sebesar 83,41% dan sudah di atas target 80% yang ditetapkan.
- d. Tingkat promosi dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Situbondo. Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Rumah Tangga yang ber PHBS di Kabupaten Situbondo sebesar 26,10%%, yakni 12.595 rumah tangga dari 48.261 rumah tangga yang dipantau.
- e. Meningkatnya kasus ATM khususnya HIV/AIDS

Cakupan penemuan kasus penyakit ATM khususnya HIV/AIDS di kabupaten Situbondo pada tahun tahun 2017 tercatat 160 kasus baru HIV dan 59 kasus baru AIDS . Angka ini kembali meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama 8 tahun terakhir kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo cenderung terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Padahal angka-angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi (fenomena gunung es).

Dalam menghadapi Isu – isu penting ini dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo juga dihadapkan kepada peluang dan tantangan yang ada. Peluang tersebut antara lain :

- a. Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan

Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 menyebutkan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai 47 peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2), bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan. (2) Perundangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap bidang kesehatan yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) e, yang menyebutkan bahwapenanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaann kedua

undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

b. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah

Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan. Selanjutnya pada Ayat (4) yang berbunyi bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, dan salah satunya (pada point b) adalah kesehatan

c. Sustainable Development Goals

Pembangunan Milenium (*Sustainable Development Goals/SDGs*) bertujuan melanjutkan MDG's Lima tahun sebelumnya dan mengatasi tantangan utama pembangunan, diantaranya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Komitmen global *Sustainable Development Goal's (SDG's)* ditargetkan akan tercapai 50% pada tahun 2020. Dari delapan point komitmen, tiga diantaranya adalah masalah kesehatan yaitu (1) penurunan angka kematian anak, (2) peningkatan kesehatan ibu, dan (3) Upaya menghentikan penyebaran terhadap penyakit (khususnya HIV/AIDS, malaria, TB dan penyakit lainnya).

d. Perkembangan IPTEK Kesehatan

Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kesehatan. Teknologi yang ada jika dimanfaatkan akan mempermudah tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.

e. Anggaran Kesehatan

Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi (APBD), Pemerintah pusat (APBN) maupun anggaran hibah/ bantuan luar negeri. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah (APBD) sejak 2005-2016 mengalami siklus baik

peningkatan maupun penurunan anggaran secara bertahap. Tetapi pembiayaan kesehatan di Kabupaten Situbondo yang bersumber dari APBD secara keseluruhan sudah mencapai minimal 10% dari total APBD. Atau secara total untuk bidang kesehatan, menurut WHO 30% .

f. **Assuransi Kesehatan**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dinas kesehatan bekerjasama dengan asuransi kesehatan untuk mengatasi masalah pembiayaan antara lain Askes, Askeskin, Jamkesmas, Jamkesda dll.

Tantangan tersebut antara lain :

a. **Tingkat Kemiskinan Masyarakat yang tinggi.**

Kemampuan ekonomi masyarakat di Situbondo masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan/mengakses layanan kesehatan sehingga masyarakat cenderung mencari layanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah pengawasan tenaga kesehatan.

b. **Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan masih rendah.**

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan masih rendah hal ini dapat dilihat dari pola makan dan gaya hidup yang tidak baik misalnya merokok, minum minuman keras.

c. **PHBS, UKP dan UKBM.**

Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah kebawah masih rendah.

d. **Adanya wilayah dengan letak geografis sulit.**

Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Situbondo misalnya: pegunungan, daerah terpencil, perbatasan menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan.

e. **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.**

Masih adanya budaya/mitos masyarakat yang menghambat program kesehatan antara lain dalam pertolongan persalinan dengan dukun bayi, menolak imunisasi, menolak menyusui dan banyak anak banyak rejeki.

Dari uraian Isu – isu penting yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo serta dengan melihat kenyataan bahwa kondisi kesehatan masih sangat jauh dari kondisi yang diinginkan, sangat diperlukan adanya suatu perumusan tentang strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta karakteristik masyarakat Kabupaten Situbondo.

Hasil rumusan strategi dalam mengatasi mencapai sasaran yang telah di tentukan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah:

1. Terwujudnya promosi kesehatan, pemberdayaan , penanggulangan masalah gizi, operasional puskesmas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan non miskin melalui;
 - a. Meningkatkan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
 - b. Mengoptimalkan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - c. meningkatkan status gizi masyarakat berpedoman pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 - d. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin dan non miskin melalui program asuransi kesehatan masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan serta kesehatan keluarga melalui;
 - a. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat untuk mendukung tercapainya SDGs.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan perkembangan IPTEK
3. Tersedianya obat, dan perbekalan kesehatan serta optimalnya pembinaan , pengendalian dan pengawasan obat, obat tradisional, napza, perbekalan kesehatan dan kosmetika;
 - a. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan meningkatkan alokasi dana untuk obat dan perbekalan kesehatan .
 - b. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

4. Tercapainya pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan, makanan dan minuman, melalui;
 - a. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular khususnya HIV/AIDS melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
5. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia , sarana, prasarana, informasi, dan pengelolaan anggaran kesehatan, melalui;
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui kebijakan pusat dan daerah melalui rekrutmen CPNS dan penjurangan karier.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui alokasi anggaran dana APBD/APBN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut Visi dan Misi RPJMD dapat dikategorikan kedalam dua dimensi pembangunan yaitu dimensi utama pembangunan (sumber daya manusia, Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Good governance) dan dimensi pendukung pembangunan (infrastruktur). Keberhasilan kedua jenis pembangunan tersebut didukung sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2020 ini sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo :

1. Prioritas Pembangunan SDM dengan Meningkatkan daya saing kualitas sumber daya manusia Kabupaten Situbondo yang berkeadilan melalui jaminan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
2. Prioritas Pariwisata dengan Membangun pengembangan pariwisata berbasis ekotourism dengan mengintegrasikannya sumber daya alam, pertanian, peternakan, dan perikanan

Proses demi proses dalam rumusan Rencana kerja dilaksanakan agar dapat kesesuaian terhadap rancangan awal Rencana kerja Pemerintah Daerah, meskipun ada program dan kegiatan yang baru dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Tabel T-C.31 terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terdapat ***di halaman lampiran***

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dihasilkan dari Musrenbang baik desa maupun kecamatan serta diakomodir pada Musrenbang Kabupaten masih jauh dari harapan visi misi kepala daerah serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (2016 – 2021), meskipun ada sebagian usulan dari masyarakat yang tepat. Tetapi usulan program dan kegiatan dari masyarakat itu disinkronkan dengan program dan kegiatan yang ada di dinas kesehatan kabupaten Situbondo untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kesehatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari para lembaga yang ikut memikirkan demi kemajuan Kabupaten Situbondo khususnya dibidang kesehatan, juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo serta penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tersebut.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terdapat ***di halaman lampiran***

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dinamis (pro-growth) serta mengedepankan prinsip partisipasi (participatory based development), penyediaan lapangan pekerjaan (pro-job), dan berwawasan lingkungan (pro-environment)
3. Berpusat pada potensi lokal (local based development) yang dimiliki oleh masyarakat dan sumberdaya alam.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya adapun arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah Pemantapan pariwisata dan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kebijakan diarahkan kepada:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting dengan Peningkatan cakupan ASI eksklusif, pengoptimalkan RPG, revitalisasi Posyandu, peningkatan cakupan pemulihan gizi buruk melalui pembentukan Pusat Pemulihan Gizi (TFC) di Puskesmas Perawatan
4. Peningkatan IKM (20 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit) dengan memfasilitasi Tenaga spesialis dan pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Pengembangan Aplikasi SI Messemm, Pemantapan program DC2T (Dinkes Command Center and Theater)
5. Penurunan Angka ODF(OPEN DEFECATION FREE) / Buang Air Besar Sembarangan
6. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.
7. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan.
8. Peningkatan, pencegahan dan surveilans dan deteksi dini penyakit, penyakit yang potensial KLB dengan pengobatan sesuai standart serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya yang berbasis lingkungan.
9. Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

. Sebagai penjabaran dari Visi Misi Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (2016 – 2021),

1. Pencapaian Visi dan Misi, maka Dinas Kesehatan menindaklanuti Visi: “Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”.. Utamanya Misi I yaitu Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan. Dan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Pembangunan Kesehatan diharapkan dapat memenuhi 12 indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi :
 - (1) Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standart;
 - (2) Setiap Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar;
 - (3) Setiap Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - (4) Setiap Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - (5) Setiap Anak Usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
 - (6) Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 sd 59 th mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
 - (7) Setiap Warga Negara Indonesia 60 th keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
 - (8) Setiap Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - (9) Setiap Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - (10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - (11) Setiap Orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar; dan
 - (12) Setiap Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, Pengguna Napza dan warga binaan LP) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar.

Adapun perinciannya program dan kegiatan yang baru :

A. Program Rutin Dinas kesehatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan
5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah
 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 12. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)
 13. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
 14. Dukungan Pelaksanaan Harjakasi
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :**
1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 5. Pengadaan Mebeleur
 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 7. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
 8. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
 9. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
 10. Peningkatan, Pengadaan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :**
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 3. Penyusunan RKA dan DPA
 4. Penyusunan Renja SKPD
 5. Peningkatan Upaya Standar Pelayanan dan Teknologi

B. Program Pembangunan Dinas Kesehatan

1. Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya obat dan Alat Kesehatan
2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin
3. Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

1. Peningkatan pelayanan Kesehatan primer dan Kestrad

2. Peningkatan pelayanan rujukan dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya

3. Program Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan
4. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dan lansia

4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak menular

Kegiatan :

1. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
2. Pelayanan pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular
3. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UPT (Puskesmas, GFK, dan Labkesda)

Kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas
2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
3. Penyelenggaraan kegiatan rutin penunjang operasional Puskesmas
4. Penyelenggaraan kegiatan rutin penunjang operasional Gudang Farmasi & Kesehatan
5. Penyelenggaraan kegiatan rutin penunjang operasional Labkesda

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan :

1. Penyediaan / Peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitasi kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

7. Program pelayanan Rumah sakit

Kegiatan :

1. Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
2. Peningkatan Kemitraan Yankes
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
4. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C 33, sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106,147,776,248.00	
1102	Kesehatan				106,147,776,248.00	
1102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2,145,950,300.00	
1102.110201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.00	Dinas Kesehatan	445,200,000.00	APBD
1102.110201.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	Dinas Kesehatan	14,190,000.00	APBD
1102.110201.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	Dinas Kesehatan	688,800,000.00	APBD
1102.110201.01.005	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	Dinas Kesehatan	163,525,000.00	APBD
1102.110201.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	Dinas Kesehatan	10,851,200.00	APBD
1102.110201.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	Dinas Kesehatan	10,340,000.00	APBD

1102.110201.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	Dinas Kesehatan	9,245,600.00	APBD
1102.110201.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kesehatan	2,100,000.00	APBD
1102.110201.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	Dinas Kesehatan	26,010,000.00	APBD
1102.110201.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	Dinas Kesehatan		
001	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	Dinas Kesehatan	475,000,000.00	APBD
1102.110201.01.012	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%	Dinas Kesehatan	72,000,000.00	APBD
1102.110201.01.013	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah honor yang dibayarkan	100%	Dinas Kesehatan		
001	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah honor yang dibayarkan	100%	Dinas Kesehatan	12,000,000.00	APBD
1102.110201.01.014	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%	Dinas Kesehatan		
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%	Dinas Kesehatan	196,738,500.00	APBD
1102.110201.01.031	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%	Dinas Kesehatan		
001	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%	Dinas Kesehatan	19,950,000.00	APBD
1102.110201.01.034	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo Harjakasi	100%	Dinas Kesehatan		
001	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Harjakasi	100%	Dinas Kesehatan	0.00	APBD
002	Best Situbondo Carnival (BSC)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo	100%	Dinas Kesehatan		APBD

1102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			18,495,097,700	
1102.110201.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket	Dinas Kesehatan		
001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket	Dinas Kesehatan	130,788,500	APBD
1102.110201.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	Dinas Kesehatan		
001	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	Dinas Kesehatan	0	APBD
1102.110201.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit	Dinas Kesehatan		
001	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit	Dinas Kesehatan	400,000,000	APBD
1102.110201.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop. komputer dan printer	22 unit	Dinas Kesehatan		
001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop. komputer dan printer	22 unit	Dinas Kesehatan	49,500,000	APBD
1102.110201.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja		Dinas Kesehatan		
001	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja		Dinas Kesehatan	25,000,000	APBD
1102.110201.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket	Dinas Kesehatan		
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket	Dinas Kesehatan	80,000,000	APBD
1102.110201.02.017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil	Dinas Kesehatan		
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil	Dinas Kesehatan	175,000,000	APBD
1102.110201.02.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	Dinas Kesehatan		
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	Dinas Kesehatan	38,100,000	APBD
1102.110201.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	Dinas Kesehatan		
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	Dinas Kesehatan	50,000,000	APBD
1102.110201.02.033	Peningkatan, pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR			17,546,709,200	
	Pembangunan Pagar Puskesmas	Jumlah Luas Pagar yang dibangun di Puskesmas			527,040,000.00	

			50 mtr	Puskesmas Banyuglugur		
			75 mtr	Puskesmas Jatibanteng		
			74 mtr	Puskesmas Widoropayung		
			89 mtr	Puskesmas Wonorejo		
	Pemasangan Paving Puskesmas	Jumlah Luas Paving yang terpasang di Puskesmas			0.00	APBD
			286 mtr	Puskesmas Widoropayung		
			256 mtr	Puskesmas Jatibanteng		
			754 mtr	Puskesmas Panji		
			871 mtr	Puskesmas Wonorejo		
	Perluasan Puskesmas				2,076,444,200.00	APBD
	Perluasan Puskesmas Jangkar		60 M2	Puskesmas Jangkar		
	Perluasan Puskesmas Panji		200 M2	Puskesmas Panji		
	Pembangunan Poli TB DOTS Puskesmas Besuki		10 M2	Puskesmas Besuki		
	Pembangunan garasi ambulance puskesmas arjasa		54 M2	puskesmas arjasa		
	Ruang Sekuriti Pusk Arjasa		6 M2	Pusk Arjasa		
	RUANG DAPUR/GIZI Pusk Arjasa		18 M2	Pusk Arjasa		
	PEMBANGUNAN RUANG KONSUL TB Pusk Arjasa		24 M2			
				Pusk Arjasa		
	PEMBANGUNAN RUANG SOPIR Pusk Arjasa		24 M2	Pusk Arjasa		
	PEMBANGUNAN RUANG RAMAH ANAK Pusk Arjasa		50 M2			
				Pusk Arjasa		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu	Jumlah luas Puskesmas yang diperluas			550,000,000.00	APBD
			80 M2	Pustu Sumberanyar Kec Banyuputih		
			80 M2	Pustu Lubawang Kec Banyuglugur		
			80 M2	Pustu Pasir Putih Kec Bungatan		
			400 M2	Pustu Gadarsi Arjasa Kec Arjasa		
			80 M2	Pustu Pesisir Kec Besuki		
			80 M2	Pustu Bloro Kec Suboh		
			80 M2	Pustu Demung Kec Besuki		
	Pemasangan Kanopi Puskesmas	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Puskesmas			0.00	
			70 mtr	Puskesmas Widoropayung		
			208 mtr	Puskesmas Wonorejo		
	Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas	Jumlah Luas Tempat Parkir Puskesmas yang dibangun			112,500,000.00	APBD
			150 mtr	Pusk Panarukan		
	Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas	Jumlah Luas Rung Pertemuan Yang dibangun			0.00	APBD
			100 mtr	Puskesmas Besuk		
			130 mtr	Puskesmas Mangaran		
	Pemasangan Neonbox Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipasang Neonbox			0.00	APBD
			1 pkt	Puskesmas Widoropayung		
			1 pkt	Puskesmas Wonorejo		
	Pembangunan Pagar Ponkesdes	Jumlah Luas ponkesdes yang di pagar			100,000,000.00	
			65 mtr	Ponkesdes Sidodadi		
			20 mtr	Ponkesdes Battal		

			90 mtr	Ponkesdes Kedungdowo		
			15 mtr	Ponkesdes Kumbangsari		
			60 mtr	Ponkesdes Sumberejo		
			85 mtr	Ponkesdes Kilensari		
			45 mtr	Ponkesdes Taman Kursi		
			50 mtr	Ponkesdes Wonorejo		
			50 mtr	Ponkesdes Olean 2		
	Pemasangan Paving Ponkesdes	Jumlah Luas Ponkesdes yang dipaving			405,275,000.00	APBD
			56 mtr	Ponkesdes Battal		
			900 mtr	Ponkesdes Sumberargo		
			48 mtr	Ponkesdes Tj. Glugur		
			111 mtr	Ponkesdes Balung		
			111 mtr	Ponkesdes Rejekwesi		
			20 mtr	Ponkesdes Kukusan		
			15 mtr	Ponkesdes Klatakan		
			540 mtr	Ponkesdes Alas Tengah		
	Pembangunan Ponkesdes	Jumlah Ponkesdes yang dibangun			750,000,000.00	APBD
			80 M2	Ponkesdes Kapongan		
			80 M2	Ponkesdes Kilensari		
			80 M2	Ponkesdes Alas Bayur Atas		
			80 M2	Ponkesdes Campoan		
	Pemasangan Kanopi Ponkesdes	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Ponkesdes			0.00	musrenbang
			70 mtr	Puskesmas Widoropayung		
	Pemasangan Paving Pustu	Jumlah Luas Pustu yang dipaving			283,050,000.00	musrenbang
			175 mtr	Pustu Juglangan		
			128 mtr	Pustu Semiring		
			20 mtr	Pustu Tj. Kamal		
			105 mtr	Pustu Mimbaan		
			110 mtr	Pustu Jatisari		
			300 mtr	Pustu Mojodungkul		
			30 mtr	Pustu Tambak Ukir		
			240 mtr	Pustu Agel		
			150 mtr	Pustu Curah Kalak		
	Pembangunan Pagar Pustu	Jumlah Luas Pustu yang pagar			0.00	musrenbang
			70 mtr	Pustu Gunung Malang		
			100 mtr	Pustu Curahtatal		
			30 mtr	Pustu Bayeman		
			82 mtr	Pustu Ketowan		
			77 mtr	Pustu Campalok Jatisari		
			110 mtr	Pustu Kayumas		
			80 mtr	Pustu Pokaan		
			60 mtr	Pustu Taman		
	Pemasangan Kanopi Pustu	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Pustu			0.00	musrenbang
			50 mtr	Pustu Agel		
			20 mtr	Pustu Semiring		
			26 mtr	Pustu Tj. Kamal		

			20 mtr	Pustu Trebungan		
			30 mtr	Pustu Taman Sari		
	Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes	Jumlah Luas Ponkesdes yang di rehab			550,000,000.00	musrenbang
			80 M2	Ponkesdes Siliwang		
			80 M2	Ponkesdes Taman		
			80 M2	Ponkesdes Jatisari		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luas Rumah Dinas yang di rehab			500,000,000.00	musrenbang
	Rumah Dinas Talkandang		80 M2	Pusk Situbondo		
	Rumah Dinas Dokter Desa Ketowan Kec Arjasa		80 M2	Pusk Arjasa		
	Rumah Dinas Dokter Kendit Kec Kendit		80 M2	Pusk Kendit		
	Pengadaan Genset Puskesmas (PAJAK ROKOK)	Jumlah Genset yang dibutuhkan oleh puskesmas			900,000,000.00	
			1 unit	Puskesmas Wonorejo		
			1 unit	Puskesmas Widoropayung		
			1 unit	Puskesmas Klampokan		
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh (DAK)	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh	1 pkt	Puskesmas Suboh	2,500,000,000.00	APBD
	Perluasan Puskesmas Sumbermalang (DAK)	Jumlah Perluasan Puskesmas Sumbermalang	860 M2	Puskesmas Sumbermalang	4,000,000,000.00	
	Pembangunan Gudang Puskesmas	Jumlah Pembangunan Gudang Puskesmas	20 M2	Puskesmas Mangaran	92,400,000.00	APBD
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan (DAK)	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan	538 M2	Puskesmas Klampokan	2,500,000,000.00	musrenbang
	Perencanaan Pengadaan Tanah			Pusk Widoropayung	129,885,500.00	
	Persiapan Pengadaan Tanah			Pusk Klampokan	64,728,200.00	APBD
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah			Pusk Mlandingan	1,405,386,300.00	
	Pemasangan Paving Rumah Dinas	Jumlah Luas Pemasangan Paving Rumah Sakit				
	Rumah Dinas Kendit		222 mtr	Pusk Kendit	50,000,000.00	APBD
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Jumlah Luas Pembangunan Pagar Rumah Dinas				
	Pagar Rumah Dinas Kendit		27 mtr	Pusk Kendit	50,000,000.00	
1102.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			540,373,500	
1102.110201.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	Dinas Kesehatan		
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	Dinas Kesehatan	17,080,000	APBD
1102.110201.03.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	Dinas Kesehatan		

001	Monitoring dan Evaluasi Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	Dinas Kesehatan	92,506,000	APBD
1102.110201.03.005	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen	Dinas Kesehatan		
001	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen	Dinas Kesehatan	40,000,000	APBD
1102.110201.03.018	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	Dinas Kesehatan		
001	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	Dinas Kesehatan	25,000,000	APBD
1102.110201.03.026	Peningkatan upaya standar pelayanan dan teknologi	Prosentase SPM Kesehatan dan Informasi Tehnologi yang memenuhi target	90%	Dinas Kesehatan		
001	Evaluasi Data Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah bimtek dan validasi data dalam pelaksanaan program SPM (Standar pelayanan Minimal)	5 Kali	Dinas Kesehatan	49,498,500	APBD
002	Pembangunan dan Pemuktahiran Profil dan Data Dasar Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil, Buletin dan Data dasar Kesehatan yang sesuai standar	5 Dokumen	Dinas Kesehatan	63,482,000	APBD
003	Penyediaan Program Terintegrasi E-Billing	prosentase aplikasi program yang terintegrasi E-Billing	90%	Dinas Kesehatan	252,807,000	APBD
1102.15	Program Sumber Daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat			24,590,462,807	
		Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN				
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah				
1102.110201.15.001	Peningkatan Upaya Obat dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan	7,864,535,807	APBD
001	Pengawasan Obat, Obat Traditional dan Kosmetik di Pasaran	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%	Dinas Kesehatan	61,120,500	APBD
002	Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan	Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	100%	Dinas Kesehatan	16,355,500	APBD
		Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	90%			
003	Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Pajak rokok)	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali	Dinas Kesehatan	108,341,950	PAJAK ROKOK
004	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi)	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%	Dinas Kesehatan	7,065,162,357	DAK
		Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	90%			
	Pembinaan dan Pemantauan Toko/Swalayan dan Pasar Makanan Minuman Menjelang Hari Raya (PAJAK ROKOK)	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali	Dinas Kesehatan	13,555,500	

	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk PMI			PMI	600,000,000	
1102.110201.15.002	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin			Dinas Kesehatan	16,480,060,000	APBD
001	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pajak Rokok)	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000	Dinas Kesehatan	11,505,060,000	
002	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pemberi Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000	Dinas Kesehatan	2,000,000,000	APBD
003	Bimtek, Sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Bimtek, sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas		Dinas Kesehatan	175,000,000	APBD
004	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Prosentase Jampersal yang dilayani	90%	Dinas Kesehatan	2,000,000,000	DAK NON FISIK
5	Manajemen BOK dan Jampersal (DAK NON FISIK)	Prosentase Manajemen Dinas Kesehatan yang bisa menyerap anggaran BOK , jampersal > 90%	90%	Dinas Kesehatan	800,000,000	DAK NON FISIK
1102.110201.15.003	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Dinas Kesehatan	245,867,000	APBD
001	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah Pemilihan Nakes Teladan	7 Nakes	Dinas Kesehatan	59,624,400	APBD
002	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek , sosialisasi dan pelatihan	127 orang	Dinas Kesehatan	142,039,750	APBD
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD			
003	Bimtek, Pembinaan dan Pengawasan Mutu pada Tenaga Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	180 orang	Dinas Kesehatan	44,202,850	APBD
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD			
1102.16	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Prosentase puskesmas dan Rumah Sakit yang reakreditasi			5,077,104,000	
		Prosentase puskesmas yg terstandarisasi				
		Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart				
1102.110201.16.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional			Dinas Kesehatan	4,061,963,700	APBD
001	Peningkatan Minilokakarya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di Monev kegiatan Minilokakarya di Puskesmas	20 pkm	Dinas Kesehatan	14,099,000	APBD
002	Pelayanan Kesehatan Primer kepada Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat	61 orang	Dinas Kesehatan	337,465,700	APBD
003	Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dan Unsur Masyarakat/ Organisasi (BK)	Jumlah Tenaga Ponkesdes yang melakukan Kunjungan konseling	86 Perawat Ponkesdes	Dinas Kesehatan	603,720,000	APBD

004	Pemantapan terhadap Manajemen dan Pelaksanaan PIS PK	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Monev, Workshop PIS-PK Keluarga Sehat		Dinas Kesehatan	0	APBD
005	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Laboratorium	Jumlah Peserta Kompetensi Pelayanan Laboratorium	29 orang	Dinas Kesehatan	21,850,500	APBD
007	Sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya	Jumlah sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Pertama dan jaringannya	7 kali	Dinas Kesehatan	86,441,500	APBD
008	Honor Perawat Ponkesdes (BK)	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang	Dinas Kesehatan	1,496,400,000	BK
009	Honor Perawat Ponkesdes	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang	Dinas Kesehatan	516,000,000	APBD
010	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Jumlah Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart yang dibayarkan	5 orang	Dinas Kesehatan	150,000,000	BK
011	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter yang di Bayarkan	5 orang	Dinas Kesehatan	7,500,000	APBD
012	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes (BK)	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes yang di Bayarkan	86 orang	Dinas Kesehatan	74,820,000	BK
013	Peningkatan Program Kesehatan Primer dan Tradisional	prosentase sasaran masyarakat yg mendapatkan layanan	82%	Dinas Kesehatan	140,507,000	APBD
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	7 kali			
014	Pemantapan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (DAK Non Fisik)	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	100%	Dinas Kesehatan	43,160,000	DAK NON FISIK
	Penyediaan Jasa Dokter	Jumlah Honor Dokter Yang dibayar	100%	Dinas Kesehatan	570,000,000	
1102.110201.16.002	Peningkatan Pelayanan Rujukan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			Dinas Kesehatan	414,233,000	APBD
001	Peningkatan Pelayanan Strata Lanjutan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	4 kali	Dinas Kesehatan	214,233,000	APBD
002	Peningkatan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan dan Bencana	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	6 kali	Dinas Kesehatan	200,000,000	APBD
		Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	2 kali	Dinas Kesehatan		
1102.110201.16.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya			Dinas Kesehatan	600,907,300	APBD
001	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	20 PKM & 3 RSUD	Dinas Kesehatan	200,000,000	APBD

002	Peningkatan Mutu Fasyankes	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	5Kali	Dinas Kesehatan	253,595,300	APBD
003	Penguatan Sistem Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, resertifikasi akreditasi	6 PKM	Dinas Kesehatan	147,312,000	APBD
1102.17	Program Kesehatan Masyarakat	Penurunan AKI			4,016,527,768	
		Penurunan AKB				
		Prevalensi Gizi Buruk				
		Prosentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan				
		Prosentase Media Promosi yg dikembangkan				
1102.110201.17.001	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Dinas Kesehatan	1,230,135,250	APBD
001	Peningkatan Promosi Kesehatan	Prosentase promosi Kesehatan	80%	Dinas Kesehatan	300,000,000	APBD
002	Pengembangan Taman Posyandu (BK Khusus)	Jumlah Pengembangan taman Posyandu	160 Taman Posyandu	Dinas Kesehatan	125,000,000	BK
003	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	6 kali	Dinas Kesehatan	425,000,000	APBD
004	Pendampingan Ponkestren (BK Khusus)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pendampingan Ponkestren		Dinas Kesehatan	121,029,000	BK
005	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat BOK Sekunder - DAK NON FISIK)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka pengembangan Pemberdayaan masyarakat	4 kali	Dinas Kesehatan	161,676,250	DAK NON FISIK
006	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2020	Jumlah peringkatan Hari Kesehatan Nasional	1 kali	Dinas Kesehatan	97,430,000	APBD
1102.110201.17.002	Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat			Dinas Kesehatan	1,384,951,050	APBD
001	Pelaksanaan dan Pendidikan untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (PAJAK ROKOK)	Jumlah Pelatihan, Sosialisasi dan Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam kegiatan Bulan Timbang dan ePPGBM	5 kali	Dinas Kesehatan	273,008,750	PAJAK ROKOK
		Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	200orang			
002	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah Sosialisasi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5 kali	Dinas Kesehatan	552,540,300	APBD
		Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	1885 orang			
003	Pemberian PMT untuk Masyarakat yang Rawan Gizi	Jumlah PMT untuk Masyarakat Rawan Gizi	7650 orang	Dinas Kesehatan	198,900,000	APBD
004	Pelayanan Gizi Terintegrasi di Rumah Pemulihan Gizi	Jumlah Tenaga Ahli Pada Rumah Pemulihan Gizi	10 orang	Dinas Kesehatan	274,402,000	APBD

005	Penyediaan Peta dan Informasi tentang Gizi (PAJAK ROKOK)	Jumlah Sosialisasi Anemia dan Pemanfaatan TTD	2 kali	Dinas Kesehatan	86,100,000	PAJAK ROKOK
1102.110201.17.003	Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan	511,943,968	APBD
001	Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sehat	3 kali	Dinas Kesehatan	107,301,800	APBD
002	Pembinaan dan Sosialisasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (PAJAK ROKOK)	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali	Dinas Kesehatan	0	PAJAK ROKOK
003	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pelayanan sanitasi dasar masyarakat	3 kali	Dinas Kesehatan	163,501,200	APBD
004	Pengawasan Kualitas Air	Jumlah Sosialisasi Hygiene Inspeksi Sarana Air Bersih dan validasi data inpeksi SAB	3 kali	Dinas Kesehatan	26,451,000	APBD
005	Upaya Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Sosialisasi, Bimtek Upaya Pelayanan kesehatan Olahraga	2 kali	Dinas Kesehatan	122,142,168	APBD
006	Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah sosialisasi, Bimtek Peningkatan Upaya kesehatan Kerja (UKK)	2 kali	Dinas Kesehatan	92,547,800	APBD
1102.110201.17.004	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia				889,497,500	APBD
001	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Usia (PAJAK ROKOK)	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	11 kali	Dinas Kesehatan	589,497,500	PAJAK ROKOK
		prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%	Dinas Kesehatan		
002	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	16 kali	Dinas Kesehatan	300,000,000	APBD
		prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%	Dinas Kesehatan		
1102.18	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacingan)			2,449,943,900	
		Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular (TBC BTA +, HIV)				
		Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap				
		Prosentase Skrening Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus)				
		Prosentase skrening Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)				

1102.110201.18.001	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			Dinas Kesehatan	1,416,116,300	APBD
001	Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	77,150,000	APBD
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali			
002	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Binatang	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	310,251,000	APBD
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali			
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%			
003	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular IMS dan HIV/AIDS (PAJAK ROKOK)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	515,430,600	PAJAK ROKOK
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali			
004	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HISP	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	142,106,500	APBD
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali			
005	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	163,035,200	APBD
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali			
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%			
006	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (PAJAK ROKOK)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	Dinas Kesehatan	208,143,000	PAJAK ROKOK
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali			
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%			
1102.110201.18.002	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			Dinas Kesehatan	543,289,050	APBD
001	Layanan Penunjang Pada Disabilitas	Jumlah sosialisasi, Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali	Dinas Kesehatan	154,564,000	APBD
		Jumlah Alat Penunjang Disabilitas	50 Alat Penunjang			
002	Pelayanan Kesehatan Indera dan Gigi Mulut	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indra dan Gilut	100%	Dinas Kesehatan	129,644,000	APBD

004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Prosentase ODGJ yg ditangani	100%	Dinas Kesehatan	116,183,000	APBD
005	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali	Dinas Kesehatan	142,898,050	
1102.110201.18.003	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dan Imunisasi				490,538,550	APBD
001	Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	3 Kali	Dinas Kesehatan	148,091,500	APBD
		Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan	60 kasus			
002	Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Prosentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%	Dinas Kesehatan	108,923,000	APBD
004	Peningkatan Imunisasi Rutin dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Prosentase sasaran yg diimunisasi	90%	Dinas Kesehatan	233,524,050	APBD
1102.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT (Puskesmas, GFK dan Labkesda)	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan IKM sesuai standar			43,212,104,773	
1102.110201.20.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas				27,529,903,523	BLUD
001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuputih	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Banyuputih	1,791,441,000	BLUD
002	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Asembagus	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Asembagus	1,905,055,038	BLUD
003	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jangkar	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Jangkar	1,560,166,000	BLUD
004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Arjasa	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Arjasa	1,910,651,655	BLUD
005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kapongan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Kapongan	1,400,000,000	BLUD

006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panji	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Panji	1,571,630,000	BLUD
007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mangaran	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Mangaran	1,458,130,573	BLUD
008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Situbondo	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Situbondo	1,636,140,106	BLUD
009	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panarukan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Panarukan	2,129,629,860	BLUD
010	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kendit	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Kendit	1,164,536,254	BLUD
011	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mlandingan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Mlandingan	1,495,330,123	BLUD
012	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Bungatan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Bungatan	1,304,756,400	BLUD
013	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Suboh	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Suboh	1,433,658,000	BLUD
014	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Besuki	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Besuki	2,596,544,080	BLUD
015	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jatibanteng	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Jatibanteng	1,466,657,468	BLUD

016	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Sumbermalang	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Sumbermalang	1,755,525,374	BLUD
017	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuglugur	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	Puskesmas Banyuglugur	950,051,592	BLUD
1102.110201.20.002	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				12,143,000,000	
001	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuputih (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Banyuputih	694,000,000	DAK Non Fisik
002	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Asembagus (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Asembagus	755,094,200	DAK Non Fisik
003	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jangkar (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Jangkar	680,928,000	DAK Non Fisik
004	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjasa (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Arjasa	752,308,800	DAK Non Fisik
005	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kapongan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Kapongan	663,594,900	DAK Non Fisik
006	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panji (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Panji	702,153,600	DAK Non Fisik
007	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mangaran (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Mangaran	574,346,800	DAK Non Fisik
008	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Situbondo (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Situbondo	620,158,050	DAK Non Fisik
009	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panarukan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Panarukan	638,913,000	DAK Non Fisik
010	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendit (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Kendit	643,886,800	DAK Non Fisik
011	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bungatan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Bungatan	603,330,800	DAK Non Fisik
012	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mlandingan (DAK Non Fisik)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Mlandingan	643,039,100	DAK Non Fisik
013	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Suboh (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Suboh	638,288,850	DAK Non Fisik
014	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Besuki (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Besuki	558,779,100	DAK Non Fisik
015	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jatibanteng (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Jatibanteng	602,686,950	DAK Non Fisik
016	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumbermalang (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Sumbermalang	629,152,150	DAK Non Fisik
017	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuglugur (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Banyuglugur	617,226,200	DAK Non Fisik
018	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wonorejo (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	289,462,200	DAK Non Fisik
019	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Klampokan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	408,997,550	DAK Non Fisik

020	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Widoropayung (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	426,652,950	DAK Non Fisik
1102.110201.20.003	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas				2,974,775,950	
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Kapongan	90,400,000.00	APBD
002	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Banyuputih	53,372,000.00	APBD
003	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Asembagus	74,595,000.00	APBD
004	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Jangkar	93,050,000.00	APBD
005	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Arjasa	63,365,000.00	APBD
006	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Panji	105,750,000.00	APBD
007	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Mangaran	95,470,000.00	APBD
008	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Situbondo	77,100,000.00	APBD
009	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Panarukan	111,836,250.00	APBD
010	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Kendit	61,200,000.00	APBD
011	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Bungatan	44,155,000.00	APBD
012	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Mlandingan	101,000,000.00	APBD
013	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Suboh	83,550,000.00	APBD
014	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Besuki	54,000,000.00	APBD
015	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Jatibanteng	49,340,000.00	APBD
016	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Sumbermalang	117,200,000.00	APBD
017	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Banyuglugur	63,050,000.00	APBD
018	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	70,000,000.00	APBD
019	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	60,000,000.00	APBD
020	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	62,300,000.00	APBD
021	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	210,606,000.00	APBD
022	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	403,374,000.00	APBD
023	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	597,246,000.00	APBD

024	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	98,328,000.00	APBD
025	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	1,000,000.00	APBD
026	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	71,580,400.00	APBD
027	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	1,750,000.00	APBD
028	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	5,000,000.00	APBD
029	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	200,000.00	APBD
030	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Wonorejo	29,080,800.00	APBD
031	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Klampokan	20,877,500.00	APBD
032	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	Puskesmas Widoropayung	5,000,000.00	APBD
1102.110201.20.004	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten		100%	GFK	354,806,200	APBD
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%	GFK	207,540,200	APBD
002	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK - Non Fisik)	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%	GFK	147,266,000	DAK Non Fisik
1102.110201.20.005	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda		100%	LABKESDA	209,619,100	APBD
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	LABKESDA	78,819,100	APBD
002	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum di UPT Labkesda	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	LABKESDA	82,300,000	APBD
003	Pemeriksaan sampel Air Secara Bakteriologis dan Kimia (PAJAK ROKOK)	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	LABKESDA	24,600,000	PAJAK ROKOK
004	Pemeriksaan Makanan yang Mengandung Formalin dan Borax (PAJAK ROKOK)	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	LABKESDA	23,900,000	PAJAK ROKOK
Program Pembinaan Lingkungan Sosial					5,620,211,500	
002-004	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pembangunan Ponkesdes Kalirejo Kec Sumbermalang (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Kalirejo	393,600,000	DBHCHT
002-006	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Perluasan Ponkesdes Wonorejo Kec Banyuputih (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Wonorejo	139,500,000	DBHCHT
002-007	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes Sumberanyar Kec Jatibanteng (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Sumberanyar	275,520,000	DBHCHT

002-008	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi Pustu Sumberanyar Mlandingan (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Pustu Sumberanyar Mlandingan	275,520,000	DBHCHT
002-009	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Penurunan Faktor Resiko PTM (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			637,125,000	DBHCHT
002-011	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Ambulance Rujukan (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			900,000,000	DBHCHT
002-014	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan untuk 3 Puskesmas Baru (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		3 Puskesmas Baru	1,739,429,500	DBHCHT
002-017	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana&Prasarana Fasilitas Kesehatan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan melalui Pembangunan Ponkesdes Kayumas Kec Arjasa (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Kayumas	472,317,000	DBHCHT
002-018	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Perante Kec Asembagus (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Perante	393,600,000	
002-019	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Tanah Merah Kec Arjasa	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		Ponkesdes Tanah Merah	393,600,000	
JUMLAH					106,147,776,248.00	

BAB V

PENUTUP

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan membutuhkan perencanaan yang tertuang dalam sebuah dokumen. Rencana Kerja Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020, yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016- 2021 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Untuk Mendukung IKU adalah :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting dengan Peningkatan cakupan ASI eksklusif, pengoptimalkan RPG, revitalisasi Posyandu, peningkatan cakupan pemulihan gizi buruk melalui pembentukan Pusat Pemulihan Gizi (TFC) di Puskesmas Perawatan
4. Peningkatan IKM (20 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit) dengan memfasilitasi Tenaga spesialis dan pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Pengembangan Aplikasi SI Messem, Pemantapan program DC2T (Dinkes Command Center and Theater)
5. Penurunan Angka ODF(OPEN DEFECATION FREE) / Buang Air Besar Sembarangan
6. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.
7. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan.
8. Peningkatan, pencegahan dan surveilans dan deteksi dini penyakit, penyakit yang potensial KLB dengan pengobatan sesuai

standart serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya yang berbasis lingkungan.

9. Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan PD. Baik kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain. kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Tahun 2016-2021;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;

5.3 Rencana tindak lanjut

Dinas Kesehatan memperhatikan Prioritas penggunaan anggaran untuk pelayanan Kepada Masyarakat utamanya kelompok rentan yaitu Ibu, Bayi, Balita, Lansia dan Masyarakat serta Cakupan SPM (12 Indikator).

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019(tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/kota Situbondo

Nama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.00.000	BELANJA									
1102.110201.00.00.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
1102.110201.00.00.000	BELANJA LANGSUNG									
1102.110201.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	90%	88.5%	90%	95%	95	90%	274%	68.375%
1102.110201.00.01.002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	70.5%	100%	100%	100.0	100%	271%	67.625%
1102.110201.00.01.004	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	66.0%	100%	85%	85.0	100%	251%	62.750%
1102.110201.00.01.005	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	86.1%	100%	100%	100.0	100%	286%	71.525%
1102.110201.00.01.006	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	99.2%	100%	100%	100.0	100%	299%	74.800%

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.01.008.5.2	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	99.7%	100%	90%	90.0	100%	290%	72.425%
1102.110201.00.01.009.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	99.8%	100%	100%	100.0	100%	300%	74.950%
1102.110201.00.01.010.5.2	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	100.0%	100%	100%	100.0	100%	300%	75.000%
1102.110201.00.01.013.5.2	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100.0%	100%	100%	100.0	100%	300%	75.000%
1102.110201.00.01.015.5.2	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	86.5%	100%	80%	80.0	100%	267%	66.625%
1102.110201.00.01.016.5.2	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH SERTA DALAM DAERAH	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	100.0%	100%	87%	87.0	100%	287%	71.750%
1102.110201.00.01.017.5.2	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	12 orang	3 ORANG
1102.110201.00.01.018.5.2	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI/TEKNIS (THL)	Jumlah honor yang dibayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100	1 orang	3 orang	1ORANG
1102.110201.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	100%	96%	95.72	100%	296%	73.93

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.02.002.5.2	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas			1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 UNIT	1 unit
1102.110201.00.02.003.5.2	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor			3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	6 UNIT	2 unit
1102.110201.00.02.005.5.2	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Kendaraan Operasional		1 mobil	1 mobil	1 mobil	100	1 mobil	3 MOBIL	1 mobil
1102.110201.00.02.009.5.2	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop, komputer dan printer		17 unit	20 unit	16 unit	80	20 unit	53 UNIT	13 unit
1102.110201.00.02.011.5.2	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Penyediaan perlengkapan Gedung kantor		2 unit	3 unit	2 unit	66.67	3 unit	7 UNIT	2 unit
1102.110201.00.02.017.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		7 mobil	8 mobil	7 mobil	87.5	8 mobil	22 UNIT	6 unit
1102.110201.00.02.023.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya		80%	85%	80%	94.12	85%	245%	61.25
1102.110201.00.02.025.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	jumlah rumah dinas yang direhab		1 unit	1 unit	1 unit	100.0	1 unit	3 UNIT	1 unit
1102.110201.00.02.026.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	Prosentase rehab gedung kantor		67%	70%	67%	95.7	70%	204%	51
1102.110201.00.02.030.5.2	TAMBAH DAYA/PASANG BARU LISTRIK	Jumlah tambah daya untuk aliran listrik		1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 PAKET	1 paket
1102.110201.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PROSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100%	100%	100%	95%	95	100%	295%	73.725

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.03.002.5.2	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	856 pakaian	775 pakaian	840 pakaian	798 pakaian	95.0	840 pakaian	2413 PAKAIAN	604 pakaian
1102.110201.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN YANG MEMENUHI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH	100%	100%	100%	91%	91.21	100%	291%	72.8025
1102.110201.00.05.001.5.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Jumlah Tenaga yg memahami terhadap pengelolaan barang	34 orang		34 orang	34 orang	100	34 orang	68 ORANG	17 orang
1102.110201.00.05.007.5.2	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah nakes yang mengikuti nakes teladan, Jumlah Tenaga fungsional kesehatan yang mengikuti bimtek , sosialisasi dan pelatihan	524 orang		453 orang	400 orang	93.02325581	453 orang	853 ORANG	213 orang
1102.110201.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.06.001.5.2	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokuemen	2 Dokumen

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.06.004.5.2	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen
1102.110201.00.06.005.5.2	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen
1102.110201.00.06.009.5.2	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen
1102.110201.00.07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROSENTASE PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.07.002.5.2	PENYUSUNAN RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen
1102.110201.00.07.004.5.2	KOORDINASI DAN FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1102.110201.00.09	PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI	PROSENTASE PELAKSANAAN HARJAKASI	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.09.001.5.2	DUKUNGAN PELAKSANAAN HARJAKASI	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo Harjakasi	1 sarana	1 sarana	1 sarana	1 sarana	100	1 sarana	3 Sarana	1 Sarana
1102.110201.00.10	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN	PROSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.10.001.5.2	DUKUNGAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR AGAMA	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 Paket	1 Pakte

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	PROSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN ALKES	85%	85%	85%	85%	100	85%	255%	63.75
1102.110201.00.15.001.5.2	PENGADAAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	prosentase pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai	85%	85%	85%	85%	100	85%	255%	63.75
1102.110201.00.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROSENTASE UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	94%	94%	94%	94%	100	94%	282%	70.5
1102.110201.00.16.002.5.2	PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dan Farmasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6 Jenis	2 Jenis
1102.110201.00.16.004.5.2	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	prosentase sasaran masyarakat yg mendapatkan layanan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	100.00%	300%	75
1102.110201.00.16.005.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	75 Kali	19 kali
1102.110201.00.16.008.5.2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Jumlah petugas yang dimonitoring dan dievaluasi	102 orang	102 orang	102 orang	102 orang	100	102 orang	306 orang	77 orang
1102.110201.00.16.009.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)	prosentase sasaran masyarakat KIA yang dilayani	92.01%	92.01%	92.01%	92.01%	100	92.01%	276%	69.0075

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.16.011.5.2	PENINGKATAN MUTU DAN JANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS BESERTA JARINGANNYA	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100	20 kali	60 kali	15 kali
1102.110201.00.16.012.5.2	JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT SITUBONDO	prosentase realisasi anggaran Jampersal yang terserap	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.16.013.5.2	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	97.20%	100%	97.20%	97.2	100%	294%	73.6
1102.110201.00.16.014.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	75
1102.110201.00.16.015.5.2	PENYEDIAAN JASA DOKTER UMUM DI PUSKESMAS PLUS	Jumlah Tersedianya dokter di Puskesmas	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100	1 orang	3 orang	1 orang
1102.110201.00.16.016.5.2	PENYEDIAAN JASA DOKTER UMUM DI PUSKESMAS RAWAT INAP STANDAR	Jumlah Tersedianya dokter di Puskesmas	5 orang	4 orang	5 orang	4 orang	80	5 orang	13 orang	3 orang
1102.110201.00.16.017.5.2	PELAKSANAAN P3K	Jumlah Pelayanan P3K	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	100	24 orang	72 orang	18 orang
1102.110201.00.16.020.5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	56%	100%	76%	76.27	100%	232%	57.95

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.16.021 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD LABKESDA	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	96.80%	100%	96.01%	96.01	100%	293%	73.2025
1102.110201.00.16.022 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS BANYUGLUGUR	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	99.16%	100%	67.33%	67.33	100%	266%	66.6225
1102.110201.00.16.023 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS JATIBANTENG	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	95.66%	100%	77.42%	77.42	100%	273%	68.27
1102.110201.00.16.024 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS SUMBERMALANG	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	99.71%	100%	56.48%	56.48	100%	256%	64.0475
1102.110201.00.16.025 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS BESUKI	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	93.47%	100%	93.47%	93.47	100%	287%	71.735
1102.110201.00.16.026 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS SUBOH	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	89.85%	100%	89.85%	89.85	100%	280%	69.925
1102.110201.00.16.027 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS MLANDINGAN	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	99.74%	100%	74.21%	74.21	100%	274%	68.4875

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.16.028 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS BUNGATAN	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	76.60%	100%	77.60%	77.6	100%	254%	63.55
1102.110201.00.16.029 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS KENDIT	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	94.00%	100%	84.01%	84.01	100%	278%	69.5025
1102.110201.00.16.030 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS PANARUKAN	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	86.79%	100%	86.92%	86.92	100%	274%	68.4275
1102.110201.00.16.031 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS SITUBONDO	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	66.49%	100%	72.50%	72.5	100%	239%	59.7475
1102.110201.00.16.032 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS PANJI	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	96.00%	100%	96.98%	96.98	100%	293%	73.245
1102.110201.00.16.033 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS MANGARAN	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	93.00%	100%	59.54%	59.54	100%	253%	63.135
1102.110201.00.16.034 .5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS KAPONGAN	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	71.50%	100%	73.53%	73.53	100%	245%	61.2575

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.16.035.5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS ARJASA	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	89.82%	100%	77.50%	77.5	100%	267%	66.83
1102.110201.00.16.036.5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS ASEMBAGUS	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	90.01%	100%	72.50%	72.5	100%	263%	65.6275
1102.110201.00.16.037.5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS JANGKAR	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	87.25%	100%	60.67%	60.67	100%	248%	61.98
1102.110201.00.16.038.5.2	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT BLUD PUSKESMAS BANYUPUTIH	prosentase tersedianya biaya Administrasi Perkantoran dan Operasional UPT	100%	91.26%	100%	79.50%	79.5	100%	271%	67.69
1102.110201.00.18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase Media Promosi yang dikembangkan, Rasio Posyandu Purnama Mandiri,	97%	97%	97%	97%	100	97%	291%	72.75
1102.110201.00.18.001.5.2	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	Jumlah media promosi dan pengadaan sarana promosi kesehatan yang tersampaikan kepada masyarakat	3053 media promkes	3053 media promkes	3053 media promkes	3053 media promkes	100	3053 media promkes	159 media promkes	90 media promkes
1102.110201.00.18.002.5.2	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	prosentase sasaran masyarakat yang diberi penyuluhan	75%	75%	75%	75%	100	75%	225%	56.25

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada anak balita	80%	80%	80%	80%	100	80%	240%	60
1102.110201.00.19.001.5.2	PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG GIZI	Jumlah dokumen mapping gizi	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	100	1 peta	3 peta	1 peta
1102.110201.00.19.002.5.2	PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	Prosentasesasaran masyarakat yang diberi PMT	90%	53.74%	90%	53.74%	59.71	90%	197%	49.37
1102.110201.00.19.003.5.2	PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A, DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	Jumlah sosialisasi dan bimtek dalam penanggulangan Gizi	8 Kali	16 Kali	8 Kali	16 Kali	100	8 Kali	40 kali	10 kali
1102.110201.00.19.004.5.2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	Jumlah desa dan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang gizi yang benar	1841 orang	1841 orang	1841 orang	1841 orang	100	1841 orang	5523 orang	1381 orang
1102.110201.00.19.005.5.2	PENINGKATAN KAPASITAS RUMAH PEMULIHAN GIZI	Jumlah gizi buruk yang di skrening dan yang mendapatkan perawatan	20 Anak	500 Anak	20 Anak	500 Anak	100	20 Anak	1020 anak	255 orang
1102.110201.00.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Prosentase Pencegahan dan Penyakit Menular	80%	80%	80%	80%	100	80%	240%	60
1102.110201.00.20.002.5.2	PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH	prosentase Balita dan anak sekolah yang mendapatkan vaksin	91.50%	85.30%	91.50%	85.30%	93.22	91.50%	262%	65.525

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.20.003.5.2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	80%	80%	80%	80%	100	80%	240%	60
1102.110201.00.20.004.5.2	PENINGKATAN IMUNIASASI	Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap	91.50%	85.30%	91.50%	85.30%	93.22404372	91.50%	262%	65.525
1102.110201.00.20.005.5.2	PENINGKATAN SURVELLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillace Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	100	5 kasus	15 kasus	4 kasus
1102.110201.00.20.006.5.2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	87%	87%	87%	87%	100	87%	261%	65.25
1102.110201.00.21	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase SPM Kesehatan dan Informasi Tehnologi Yang Memenuhi Target	100.0	74.04	100.0	74.04	74.04	100.0	248%	62.02
1102.110201.00.21.001.5.2	PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKHNOLOGI KESEHATAN	Jumlah Pengembangan informasi dan teknologi kesehatan	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0%	0
1102.110201.00.21.002.5.2	PENYEDIAAN PROGRAM TERINTEGRASI E-BILLING	Prosentase Program yang terintegrasi e-billing	100.0	74.7	100.0	74.7	74.7	100.0	249%	62.35
1102.110201.00.21.003.5.2	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah bimtek dan validasi data dalam pelaksanaan program SPM (Standar pelayanan Minimal)	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100	5 kali	15 kali	4 kali

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.21.004.5.2	PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Dokumen Profil, Buletin dan Data dasar Kesehatan yang sesuai standar	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15 dokumen	4 dokumen
1102.110201.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Prosentase penduduk Miskin yang terlayani	100%	82.65%	100%	82.65%	82.65	100%	265.30%	66.325
1102.110201.00.22.002.5.2	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (JAMKESDA)	Prosentase Maskin SPM yang terlayani	100%	82.65%	100%	82.65%	82.65	100%	265.30%	66.325
1102.110201.00.23	PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR	100%	100%	100%	100%	100	100%	300.00%	75
1102.110201.00.23.001.5.2	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	Jumlah pembangunan Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	100.0	11 Puskesmas	33 puskesmas	8 Puskesmas
1102.110201.00.23.002.5.2	PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU	Jumlah pembangunan Puskesmas Pembantu	7 Pustu	4 Pustu	7 Pustu	4 Pustu	57.14	7 Pustu	15 Pustu	4 Pustu
1102.110201.00.23.003.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBANTU	Jumlah rehab Pustu	5 unit	0	5 unit	0	0	5 unit	5 unit	1 Unit
1102.110201.00.23.004.5.2	PEMBANGUNAN POLINDES	Jumlah pembangunan Polindes	2 unit	1 Unit	2 unit	1 Unit	50.0	2 unit	4 unit	1 Unit
1102.110201.00.23.005.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS	Jumlah Rehab Puskesmas	4 unit	3 unit	4 unit	3 unit	75	4 unit	10 unit	2 Unit

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.23.006.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT POS KESEHATAN DESA	Jumlah rehab pembangunan Ponkesdes	6 unit	0	6 unit	0	0	6 unit	6 unit	1 Unit
1102.110201.00.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Prosentase Lansia yang dibina dan dilayani	80%	92%	80%	92%	100	80%	264.00%	66
1102.110201.00.26.001.5.2	PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah lansia yang dibina dan dilayani	80%	92%	80%	92%	100	80%	264.00%	66
1102.110201.00.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	88.02%	100%	88.02%	88.02	100%	276.04%	69.01
1102.110201.00.27.002.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS BANYUGLUGUR	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	69.72%	100%	69.72%	69.72	100%	239.44%	59.86
1102.110201.00.27.003.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS JATIBANTENG	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	94.80%	100%	94.80%	94.8	100%	289.60%	72.4

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.27.004.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS SUMBERMALANG	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	89.49%	100%	89.49%	89.49	100%	278.98%	69.745
1102.110201.00.27.005.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS BESUKI	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	94.53%	100%	94.53%	94.53	100%	289.06%	72.265
1102.110201.00.27.006.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS SUBOH	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	92.77%	100%	92.77%	92.77	100%	285.54%	71.385
1102.110201.00.27.007.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS MLANDINGAN	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	95.77%	100%	95.77%	95.77	100%	291.54%	72.885

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.27.008.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS BUNGATAN	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	92.57%	100%	92.57%	92.57	100%	285.14%	71.285
1102.110201.00.27.009.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS KENDIT	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	90.96%	100%	90.96%	90.96	100%	281.92%	70.48
1102.110201.00.27.010.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS PANARUKAN	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	93.86%	100%	93.86%	93.86	100%	287.72%	71.93
1102.110201.00.27.011.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS SITUBONDO	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	73.32%	100%	73.32%	73.32	100%	246.64%	61.66

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.27.012.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS PANJI	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	84.98%	100%	84.98%	84.98	100%	269.96%	67.49
1102.110201.00.27.013.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS MANGARAN	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	92.99%	100%	92.99%	92.99	100%	285.98%	71.495
1102.110201.00.27.014.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS KAPONGAN	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	79.25%	100%	79.25%	79.25	100%	258.50%	64.625
1102.110201.00.27.015.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS ARJASA	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	98.33%	100%	98.33%	98.33	100%	296.66%	74.165

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.27.016.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS ASEMBAGUS	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	81.91%	100%	81.91%	81.91	100%	263.82%	65.955
1102.110201.00.27.017.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS JANGKAR	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	87.35%	100%	87.35%	87.35	100%	274.70%	68.675
1102.110201.00.27.018.5.2	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS BANYUPUTIH	Prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	81.53%	100%	81.53%	81.53	100%	263.06%	65.765
1102.110201.00.28	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	PROSENTASE PENYEHATAN LINGKUNGAN YANG DITANGANI	72.0	72	72.0	72	100	72.0	216.00%	54
1102.110201.00.28.001.5.2	PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT	Jumlah TTU (Tempat - tempat Umum) yang dibina lingkungan sehat memenuhi syarat kesehatan	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	100	7 kali	21 kali	5 kali

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.28.002.5.2	PENGEMBANGAN SANITASI DAN SARANA AIR BERSIH	prosentase Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan	70%	70%	70%	70%	100	70%	210.00%	52.5
1102.110201.00.28.003.5.2	PELAYANAN BINA PENYEHATAN LINGKUNGAN	Jumlah Sosialisasi dan pembinaan pada TPM (Tempat Pengolahan Makanan) memenuhi syarat kesehatan	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	100	7 kali	21 kali	5 kali
1102.110201.00.29	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	prosentase pengembangan obat assli Indonesia	60%	60%	60%	60%	100	60%	180.00%	45
1102.110201.00.29.001.5.2	PELATIHAN PENGOBATAN TRADISIONAL	prosentase pengembangan obat assli Indonesia	60%	60%	60%	60%	100	60%	180.00%	45
1102.110201.00.30	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Prosentase tercukupinya sarana prasarana sesuai standar			100%	100%	100	100%	200.00%	50
1102.110201.00.30.013.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN JASA KALIBRASI	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 paket	1 paket	100	1 paket		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.014.5.2	PEMBAYARAN IURAN JAMNINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU PEMBAYARAN IJK BAGI PEKERJA YG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MELALUI PEMBAYARAN PBI APBD	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 paket	1 paket	100	1 paket		
1102.110201.00.30.015.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI BANGUNAN PONKESDES SUMBERWARU	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.016.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI PEMBANGUNAN BARU RUANGAN RAWAT INAP PUSKESMAS BANYUGLUGUR	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.017.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI BANGUNAN PONKESDES TLOGOSARI	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.018.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG RAWAT INAP PUSK SUMBERMALANG	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.019.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI BANGUNAN PONKESDES MLANDINGAN WETAN	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.020.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITAS SEDANG/BERAT BANGUNAN PONKESDES PACALAN	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.021.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITAS SEDANG/BERAT BANGUNAN PONKESDES LANDANGAN	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.022.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP PUSKESMAS WONOREJO	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.023.5.2	PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SALURAN AIR LIMBAH, SANITASI DAN AIR BERSIH MELALUI PEMELIHARAAN IPAL DI PUSKESMAS	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.026 .5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.027 .5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI PENGADAAN REAGEN DAN BHP UNTUK PMS TERMASUK HIV/AIDS	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.028 .5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YG BEKERJASAMA DGN BPJS KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN PERALATAN OPERASIONAL BERUPA PENGADAAN ALAT FOGGING	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.029 .5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI PENGADAAN OBAT-OBATAN UNTUK PENYAKIT DBD	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.032.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBANTU PLALANGAN)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.033.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHAB SEDANG/BERAT PONKESDES MANDARAN	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.034.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG RAWAT INAP PUSKESMAS ARJASA	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1102.110201.00.30.035.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI REHABILITASI SEDANG/BERAT PONKESDES DAWUHAN	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		
1102.110201.00.30.036.5.2	PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITASI KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELALUI PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP PUSKESMAS PANJI	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			1 unit	1 unit	100	1 unit		

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106,147,776,248.00				0.00
1102	Kesehatan				106,147,776,248.00				0.00
1102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2,145,950,300.00				2,360,545,330.00
1102.110201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	1.00	445,200,000.00	APBD			489,720,000.00
1102.110201.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	Dinas Kesehatan	100%	14,190,000.00	APBD			15,609,000.00
1102.110201.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan	100%	688,800,000.00	APBD			757,680,000.00
1102.110201.01.005	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	Dinas Kesehatan	100%	163,525,000.00	APBD			179,877,500.00
1102.110201.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	100%					

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	100%	10,851,200.00	APBD			11,936,320.00
1102.110201.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	Dinas Kesehatan	100%	10,340,000.00	APBD			11,374,000.00
1102.110201.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	Dinas Kesehatan	100%	9,245,600.00	APBD			10,170,160.00
1102.110201.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	100%	2,100,000.00	APBD			2,310,000.00
1102.110201.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	Dinas Kesehatan	100%	26,010,000.00	APBD			28,611,000.00
1102.110201.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas Kesehatan	100%					
001	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas Kesehatan	100%	475,000,000.00	APBD			522,500,000.00
1102.110201.01.012	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	Dinas Kesehatan	100%	72,000,000.00	APBD			79,200,000.00
1102.110201.01.013	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah honor yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	100%					
001	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah honor yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	100%	12,000,000.00	APBD			13,200,000.00
1102.110201.01.014	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	100%					
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	100%	196,738,500.00	APBD			216,412,350.00
1102.110201.01.031	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	100%					
001	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	100%	19,950,000.00	APBD			21,945,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102.110201.01.034	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo Harjakasi	Dinas Kesehatan	100%					
001	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Harjakasi	Dinas Kesehatan	100%	0.00	APBD			-
002	Best Situbondo Carnival (BSC)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo	Dinas Kesehatan	100%		APBD			-
1102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			18,495,097,700				20,344,607,470
1102.110201.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	Dinas Kesehatan	1 paket					
001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	Dinas Kesehatan	1 paket	130,788,500	APBD			143,867,350.00
1102.110201.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	Dinas Kesehatan	2 unit					
001	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	Dinas Kesehatan	2 unit	0	APBD			-
1102.110201.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	Dinas Kesehatan	2 unit					
001	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	Dinas Kesehatan	2 unit	400,000,000	APBD			440,000,000.00
1102.110201.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop. komputer dan printer	Dinas Kesehatan	22 unit					
001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop. komputer dan printer	Dinas Kesehatan	22 unit	49,500,000	APBD			54,450,000.00
1102.110201.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja	Dinas Kesehatan						
001	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja	Dinas Kesehatan		25,000,000	APBD			27,500,000.00
1102.110201.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	1 paket					
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	1 paket	80,000,000	APBD			88,000,000.00
1102.110201.02.017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dinas Kesehatan	8 mobil					
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dinas Kesehatan	8 mobil	175,000,000	APBD			192,500,000.00
1102.110201.02.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	80%					

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	80%	38,100,000	APBD			41,910,000.00
1102.110201.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	80%					
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	Dinas Kesehatan	80%	50,000,000	APBD			55,000,000.00
1102.110201.02.033	Peningkatan, pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR			17,546,709,200				19,301,380,120.00
	Pembangunan Pagar Puskesmas	Jumlah Luas Pagar yang dibangun di Puskesmas			527,040,000.00				
			Puskesmas Banyuglugur	50 mtr					
			Puskesmas Jatibanteng	75 mtr					
			Puskesmas Widoropayung	74 mtr					
			Puskesmas Wonorejo	89 mtr					
	Pemasangan Paving Puskesmas	Jumlah Luas Paving yang terpasang di Puskesmas			0.00	APBD			
			Puskesmas Widoropayung	286 mtr					
			Puskesmas Jatibanteng	256 mtr					
			Puskesmas Panji	754 mtr					
			Puskesmas Wonorejo	871 mtr					
	Perluasan Puskesmas				2,076,444,200.00	APBD			
	Perluasan Puskesmas Jangkar		Puskesmas Jangkar	60 M2					
	Perluasan Puskesmas Panji		Puskesmas Panji	200 M2					
	Pembangunan Poli TB DOTS Puskesmas Besuki		Puskesmas Besuki	10 M2					
	Pembangunan garasi ambulance puskesmas arjasa		puskesmas arjasa	54 M2					
	Ruang Security Pusk Arjasa		Pusk Arjasa	6 M2					
	RUANG DAPUR/GIZI Pusk Arjasa		Pusk Arjasa	18 M2					
	PEMBANGUNAN RUANG KONSUL TB Pusk Arjasa		Pusk Arjasa	24 M2					
	PEMBANGUNAN RUANG SOPIR Pusk Arjasa		Pusk Arjasa	24 M2					
	PEMBANGUNAN RUANG RAMAH ANAK Pusk Arjasa		Pusk Arjasa	50 M2					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu	Jumlah luas Puskesmas yang diperluas			550,000,000.00	APBD			
			Pustu Sumberanyar Kec Banyuputih	80 M2					
			Pustu Lubawang Kec Banyuglugur	80 M2					
			Pustu Pasir Putih Kec Bungatan	80 M2					
			Pustu Gadarsi Arjasa Kec Arjasa	400 M2					
			Pustu Pesisir Kec Besuki	80 M2					
			Pustu Bloro Kec Suboh	80 M2					
			Pustu Demung Kec Besuki	80 M2					
	Pemasangan Kanopi Puskesmas	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Puskesmas			0.00				
			Puskesmas Widoropayung	70 mtr					
			Puskesmas Wonorejo	208 mtr					

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas	Jumlah Luas Tempat Parkir Puskesmas yang dibangun			112,500,000.00	APBD			
			Pusk Panarukan	150 mtr					
	Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas	Jumlah Luas Rung Pertemuan Yang dibangun			0.00	APBD			
			Puskesmas Besuk	100 mtr					
			Puskesmas Mangaran	130 mtr					
	Pemasangan Neonbox Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipasang Neonbox			0.00	APBD			
			Puskesmas Widoropayung	1 pkt					
			Puskesmas Wonorejo	1 pkt					
	Pembangunan Pagar Ponkesdes	Jumlah Luas ponkesdes yang di pagar			100,000,000.00				
			Ponkesdes Sidodadi	65 mtr					
			Ponkesdes Battal	20 mtr					
			Ponkesdes Kedungdowo	90 mtr					
			Ponkesdes Kumbangsari	15 mtr					
			Ponkesdes Sumberejo	60 mtr					
			Ponkesdes Kilensari	85 mtr					
			Ponkesdes Taman Kursi	45 mtr					
			Ponkesdes Wonorejo	50 mtr					
			Ponkesdes Olean 2	50 mtr					
	Pemasangan Paving Ponkesdes	Jumlah Luas Ponkesdes yang dipaving			405,275,000.00	APBD			
			Ponkesdes Battal	56 mtr					
			Ponkesdes Sumberargo	900 mtr					
			Ponkesdes Tj. Glugur	48 mtr					
			Ponkesdes Balung	111 mtr					
			Ponkesdes Rejekwesi	111 mtr					
			Ponkesdes Kukusan	20 mtr					
			Ponkesdes Klatakan	15 mtr					
			Ponkesdes Alas Tengah	540 mtr					
	Pembangunan Ponkesdes	Jumlah Ponkesdes yang dibangun			750,000,000.00	APBD			
			Ponkesdes Kapongan	80 M2					
			Ponkesdes Kilensari	80 M2					
			Ponkesdes Alas Bayur Atas	80 M2					
			Ponkesdes Campoan	80 M2					
	Pemasangan Kanopi Ponkesdes	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Ponkesdes			0.00	musrenbang			
			Puskesmas Widoropayung	70 mtr					
	Pemasangan Paving Pustu	Jumlah Luas Pustu yang dipaving			283,050,000.00	musrenbang			
			Pustu Juglangan	175 mtr					
			Pustu Semiring	128 mtr					
			Pustu Tj. Kamal	20 mtr					
			Pustu Mimbaan	105 mtr					
			Pustu Jatisari	110 mtr					

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pustu Mojodungkul	300 mtr					
			Pustu Tambak Ukir	30 mtr					
			Pustu Agel	240 mtr					
			Pustu Curah Kalak	150 mtr					
	Pembangunan Pagar Pustu	Jumlah Luas Pustu yang pagar			0.00	musrenbang			
			Pustu Gunung Malang	70 mtr					
			Pustu Curahtatal	100 mtr					
			Pustu Bayeman	30 mtr					
			Pustu Ketowan	82 mtr					
			Pustu Campalok Jatisari	77 mtr					
			Pustu Kayumas	110 mtr					
			Pustu Pokaan	80 mtr					
			Pustu Taman	60 mtr					
	Pemasangan Kanopi Pustu	Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Pustu			0.00	musrenbang			
			Pustu Agel	50 mtr					
			Pustu Semiring	20 mtr					
			Pustu Tj. Kamal	26 mtr					
			Pustu Trebungan	20 mtr					
			Pustu Taman Sari	30 mtr					
	Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes	Jumlah Luas Ponkesdes yang di rehab			550,000,000.00	musrenbang			
			Ponkesdes Siliwung	80 M2					
			Ponkesdes Taman	80 M2					
			Ponkesdes Jatisari	80 M2					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luas Rumah Dinas yang di rehab			500,000,000.00	musrenbang			
	Rumah Dinas Talkandang		Pusk Situbondo	80 M2					
	Rumah Dinas Dokter Desa Ketowan Kec Arjasa		Pusk Arjasa	80 M2					
	Rumah Dinas Dokter Kendit Kec Kendit		Pusk Kendit	80 M2					
	Pengadaan Genset Puskesmas (PAJAK ROKOK)	Jumlah Genset yang dibutuhkan oleh puskesmas			900,000,000.00				
			Puskesmas Wonorejo	1 unit					
			Puskesmas Widoropayung	1 unit					
			Puskesmas Klampokan	1 unit					
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh (DAK)	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh	Puskesmas Suboh	1 pkt	2,500,000,000.00	APBD			
	Perluasan Puskesmas Sumbermalang (DAK)	Jumlah Perluasan Puskesmas Sumbermalang	Puskesmas Sumbermalang	860 M2	4,000,000,000.00				
	Pembangunan Gudang Puskesmas	Jumlah Pembangunan Gudang Puskesmas	Puskesmas Mangaran	20 M2	92,400,000.00	APBD			

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan (DAK)	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	538 M2	2,500,000,000.00	musrenbang			
	Perencanaan Pengadaan Tanah		Pusk Widoropayung		129,885,500.00				
	Persiapan Pengadaan Tanah		Pusk Klampokan		64,728,200.00	APBD			
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		Pusk Mlandingan		1,405,386,300.00				
	Pemasangan Paving Rumah Dinas	Jumlah Luas Pemasangan Paving Rumah Sakit							
	Rumah Dinas Kendit		Pusk Kendit	222 mtr	50,000,000.00	APBD			
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Jumlah Luas Pembangunan Pagar Rumah Dinas							
	Pagar Rumah Dinas Kendit		Pusk Kendit	27 mtr	50,000,000.00				
1102.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			540,373,500				594,410,850
1102.110201.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	Dinas Kesehatan	3 Dokumen					
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	17,080,000	APBD			18,788,000.00
1102.110201.03.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	Dinas Kesehatan	1 Dokumen					
001	Monitoring dan Evaluasi Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	92,506,000	APBD			101,756,600.00
1102.110201.03.005	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	18 Dokumen					
001	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	18 Dokumen	40,000,000	APBD			44,000,000.00
1102.110201.03.018	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	Dinas Kesehatan	1 Dokumen					
001	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	25,000,000	APBD			27,500,000.00
1102.110201.03.026	Peningkatan upaya standar pelayanan dan teknologi	Prosentase SPM Kesehatan dan Informasi Tehnologi yang memenuhi target	Dinas Kesehatan	90%					
001	Evaluasi Data Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah bimtek dan validasi data dalam pelaksanaan program SPM (Standar pelayanan Minimal)	Dinas Kesehatan	5 Kali	49,498,500	APBD			54,448,350.00
002	Pembangunan dan Pemuktahiran Profil dan Data Dasar Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil, Buletin dan Data dasar Kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	5 Dokumen	63,482,000	APBD			69,830,200.00
003	Penyediaan Program Terintegrasi E-Billing	presentase aplikasi program yang terintegrasi E-Billing	Dinas Kesehatan	90%	252,807,000	APBD			278,087,700.00
1102.15	Program Sumber Daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat			24,590,462,807				27,049,509,088

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah							
1102.110201.15.001	Peningkatan Upaya Obat dan Alat Kesehatan		Dinas Kesehatan		7,864,535,807	APBD			8,650,989,387.70
001	Pengawasan Obat, Obat Traditional dan Kosmetik di Pasaran	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	Dinas Kesehatan	100%	61,120,500	APBD			67,232,550.00
002	Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan	Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	Dinas Kesehatan	100%	16,355,500	APBD			17,991,050.00
		Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional		90%					-
003	Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Pajak rokok)	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	Dinas Kesehatan	5kali	108,341,950	PAJAK ROKOK			119,176,145.00
004	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi)	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	Dinas Kesehatan	100%	7,065,162,357	DAK			7,771,678,592.70
		Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan		90%					-
	Pembinaan dan Pemantauan Toko/Swalayan dan Pasar Makanan Minuman Menjelang Hari Raya (PAJAK ROKOK)	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	Dinas Kesehatan	5kali	13,555,500				
	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk PMI		PMI		600,000,000				
1102.110201.15.002	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin		Dinas Kesehatan		16,480,060,000	APBD			18,128,066,000.00
001	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pajak Rokok)	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	Dinas Kesehatan	23000	11,505,060,000				
002	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pemberi Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	Dinas Kesehatan	23000	2,000,000,000	APBD			2,200,000,000.00
003	Bimtek, Sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Bimtek, sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan		175,000,000	APBD			192,500,000.00
004	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Prosentase Jampersal yang dilayani	Dinas Kesehatan	90%	2,000,000,000	DAK NON FISIK			2,200,000,000.00
5	Manajemen BOK dan Jampersal (DAK NON FISIK)	Prosentase Manajemen Dinas Kesehatan yang bisa menyerap anggaran BOK , jampersal > 90%	Dinas Kesehatan	90%	800,000,000	DAK NON FISIK			880,000,000.00
1102.110201.15.003	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Dinas Kesehatan		245,867,000	APBD			270,453,700.00
001	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah Pemilihan Nakes Teladan	Dinas Kesehatan	7 Nakes	59,624,400	APBD			65,586,840.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek , sosialisasi dan pelatihan	Dinas Kesehatan	127 orang	142,039,750	APBD			156,243,725.00
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan		20 PKM & 3 RSUD					
003	Bimtek, Pembinaan dan Pengawasan Mutu pada Tenaga Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Pegawasan Mutu Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	180 orang	44,202,850	APBD			48,623,135.00
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan		20 PKM & 3 RSUD					
1102.16	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Prosentase puskesmas dan Rumah Sakit yang reakreditasi			5,077,104,000				5,584,814,400
		Prosentase puskesmas yg terstandarisasi							
		Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart							
1102.110201.16.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional		Dinas Kesehatan		4,061,963,700	APBD			4,468,160,070.00
001	Peningkatan Minilokakarya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di Monev kegiatan Minilokakarya di Puskesmas	Dinas Kesehatan	20 pkm	14,099,000	APBD			15,508,900.00
002	Pelayanan Kesehatan Primer kepada Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kesehatan	61 orang	337,465,700	APBD			371,212,270.00
003	Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dan Unsur Masyarakat/ Organisasi (BK)	Jumlah Tenaga Ponkesdes yang melakukan Kunjungan konseling	Dinas Kesehatan	86 Perawat Ponkesdes	603,720,000	APBD			664,092,000.00
004	Pemantapan terhadap Manajemen dan Pelaksanaan PIS PK	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Monev, Workshop PIS-PK Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan		0	APBD			-
005	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Laboratorium	Jumlah Peserta Kompetensi Pelayanan Laboratorium	Dinas Kesehatan	29 orang	21,850,500	APBD			24,035,550.00
007	Sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya	Jumlah sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Pertama dan jaringannya	Dinas Kesehatan	7 kali	86,441,500	APBD			95,085,650.00
008	Honor Perawat Ponkesdes (BK)	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	86 orang	1,496,400,000	BK			1,646,040,000.00
009	Honor Perawat Ponkesdes	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	86 orang	516,000,000	APBD			567,600,000.00
010	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Jumlah Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	5 orang	150,000,000	BK			165,000,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	Juran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Jumlah luran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter yang di Bayarkan	Dinas Kesehatan	5 orang	7,500,000	APBD			8,250,000.00
012	Juran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes (BK)	Jumlah luran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes yang di Bayarkan	Dinas Kesehatan	86 orang	74,820,000	BK			82,302,000.00
013	Peningkatan Program Kesehatan Primer dan Tradisional	prosentase sasaran masyarakat yg mendapatkan layanan	Dinas Kesehatan	82%	140,507,000	APBD			154,557,700.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat		7 kali					
014	Pemantapan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (DAK Non Fisik)	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	Dinas Kesehatan	100%	43,160,000	DAK NON FISIK			47,476,000.00
	Penyediaan Jasa Dokter	Jumlah Honor Dokter Yang dibayar	Dinas Kesehatan	100%	570,000,000				627,000,000.00
1102.110201.16.002	Peningkatan Pelayanan Rujukan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		Dinas Kesehatan		414,233,000	APBD			455,656,300.00
001	Peningkatan Pelayanan Strata Lanjutan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan	4 kali	214,233,000	APBD			235,656,300.00
002	Peningkatan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan dan Bencana	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan	6 kali	200,000,000	APBD			220,000,000.00
		Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	Dinas Kesehatan	2 kali					
1102.110201.16.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya		Dinas Kesehatan		600,907,300	APBD			660,998,030.00
001	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	Dinas Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD	200,000,000	APBD			220,000,000.00
002	Peningkatan Mutu Fasyankes	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	Dinas Kesehatan	5Kali	253,595,300	APBD			278,954,830.00
003	Penguatan Sistem Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, resertifikasi akreditasi	Dinas Kesehatan	6 PKM	147,312,000	APBD			162,043,200.00
1102	Program Kesehatan Masyarakat	Penurunan AKI			4,016,527,768				4,418,180,545
		Penurunan AKB							
		Prevalensi Gizi Buruk							
		Prosentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan							

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase Media Promosi yg dikembangkan							
1102.110201.17.001	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehatan		1,230,135,250	APBD			1,353,148,775.00
001	Peningkatan Promosi Kesehatan	Prosentase promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	80%	300,000,000	APBD			330,000,000.00
002	Pengembangan Taman Posyandu (BK Khusus)	Jumlah Pengembangan taman Posyandu	Dinas Kesehatan	160 Taman Posyandu	125,000,000	BK			137,500,000.00
003	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	6 kali	425,000,000	APBD			467,500,000.00
004	Pendampingan Ponkestren (BK Khusus)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pendampingan Ponkestren	Dinas Kesehatan		121,029,000	BK			133,131,900.00
005	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat BOK Sekunder - DAK NON FISIK)	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka pengembangan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan	4 kali	161,676,250	DAK NON FISIK			177,843,875.00
006	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2020	Jumlah peringkatan Hari Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	1 kali	97,430,000	APBD			107,173,000.00
1102.110201.17.002	Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat		Dinas Kesehatan		1,384,951,050	APBD			1,523,446,155.00
001	Pelaksanaan dan Pendidikan untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (PAJAK ROKOK)	Jumlah Pelatihan, Sosialisasi dan Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam kegiatan Bulan Timbang dan ePPGBM	Dinas Kesehatan	5 kali	273,008,750	PAJAK ROKOK			300,309,625.00
		Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)		200orang					
002	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah Sosialisasi , Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dinas Kesehatan	5 kali	552,540,300	APBD			607,794,330.00
		Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)		1885 orang					
003	Pemberian PMT untuk Masyarakat yang Rawan Gizi	Jumlah PMT untuk Masyarakat Rawan Gizi	Dinas Kesehatan	7650 orang	198,900,000	APBD	pokir "75 jt" dan musrebang ' 52.660.000'		218,790,000.00
004	Pelayanan Gizi Terintegrasi di Rumah Pemulihan Gizi	Jumlah Tenaga Ahli Pada Rumah Pemulihan Gizi	Dinas Kesehatan	10 orang	274,402,000	APBD			301,842,200.00
005	Penyediaan Peta dan Informasi tentang Gizi (PAJAK ROKOK)	Jumlah Sosialisasi Anemia dan Pemanfaatan TTD	Dinas Kesehatan	2 kali	86,100,000	PAJAK ROKOK			94,710,000.00
1102.110201.17.003	Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan		Dinas Kesehatan		511,943,968	APBD			563,138,364.80
001	Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	3 kali	107,301,800	APBD			118,031,980.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Pembinaan dan Sosialisasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (PAJAK ROKOK)	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinas Kesehatan	2 kali	0	PAJAK ROKOK			-
003	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pelayanan sanitasi dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3 kali	163,501,200	APBD			179,851,320.00
004	Pengawasan Kualitas Air	Jumlah Sosialisasi Hygiene Inspeksi Sarana Air Bersih dan validasi data inpeksi SAB	Dinas Kesehatan	3 kali	26,451,000	APBD			29,096,100.00
005	Upaya Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Sosialisasi, Bimtek Upaya Pelayanan kesehatan Olahraga	Dinas Kesehatan	2 kali	122,142,168	APBD			134,356,384.80
006	Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah sosialisasi, Bimtek Peningkatan Upaya kesehatan Kerja (UKK)	Dinas Kesehatan	2 kali	92,547,800	APBD			101,802,580.00
1102.110201.17.004	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia				889,497,500	APBD			978,447,250.00
001	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Usia (PAJAK ROKOK)	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	Dinas Kesehatan	11 kali	589,497,500	PAJAK ROKOK			648,447,250.00
		prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	Dinas Kesehatan	80%					
002	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	Dinas Kesehatan	16 kali	300,000,000	APBD			330,000,000.00
		prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	Dinas Kesehatan	80%					
1102.18	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacangan) Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular (TBC BTA +, HIV) Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap Prosentase Skrening Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus) Prosentase skrening Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)			2,449,943,900				2,694,938,290
1102.110201.18.001	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		Dinas Kesehatan		1,416,116,300	APBD			1,557,727,930.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	77,150,000	APBD			84,865,000.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		4 kali					
002	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Binatang	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	310,251,000	APBD			341,276,100.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		4 kali					
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas		91%					
003	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular IMS dan HIV/AIDS (PAJAK ROKOK)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	515,430,600	PAJAK ROKOK			566,973,660.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		3 kali					
004	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HISP	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	142,106,500	APBD			156,317,150.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		3 kali					
005	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	163,035,200	APBD			179,338,720.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		3 kali					
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas		91%					
006	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (PAJAK ROKOK)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	Dinas Kesehatan	91%	208,143,000	PAJAK ROKOK			228,957,300.00
		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan		4 kali					
		prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas		91%					
1102.110201.18.002	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Dinas Kesehatan		543,289,050	APBD			597,617,955.00
001	Layanan Penunjang Pada Disabilitas	Jumlah sosialisasi, Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	1 kali	154,564,000	APBD			170,020,400.00
		Jumlah Alat Penunjang Disabilitas		50 Alat Penunjang					

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Pelayanan Kesehatan Indera dan Gigi Mulut	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indra dan Gilut	Dinas Kesehatan	100%	129,644,000	APBD			142,608,400.00
004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Prosentase ODGJ yg ditangani	Dinas Kesehatan	100%	116,183,000	APBD			127,801,300.00
005	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	1 kali	142,898,050				
1102.110201.18.003	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dan Imunisasi				490,538,550	APBD			539,592,405.00
001	Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	3 Kali	148,091,500	APBD			162,900,650.00
		Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan		60 kasus					
002	Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Prosentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Dinas Kesehatan	100%	108,923,000	APBD			119,815,300.00
004	Peningkatan Imunisasi Rutin dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Prosentase sasaran yg diimunisasi	Dinas Kesehatan	90%	233,524,050	APBD			256,876,455.00
1102.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT (Puskesmas, GFK dan Labkesda)	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan IKM sesuai standar			43,212,104,773				47,533,315,250
1102.110201.20.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas				27,529,903,523	BLUD			30,282,893,875.30
001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuputih	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Banyuputih	100%	1,791,441,000	BLUD			1,970,585,100.00
002	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Asembagus	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Asembagus	100%	1,905,055,038	BLUD			2,095,560,541.80
003	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jangkar	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Jangkar	100%	1,560,166,000	BLUD			1,716,182,600.00
004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Arjasa	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Arjasa	100%	1,910,651,655	BLUD			2,101,716,820.50

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kapongan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Kapongan	100%	1,400,000,000	BLUD			1,540,000,000.00
006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panji	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Panji	100%	1,571,630,000	BLUD			1,728,793,000.00
007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mangaran	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Mangaran	100%	1,458,130,573	BLUD			1,603,943,630.30
008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Situbondo	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Situbondo	100%	1,636,140,106	BLUD			1,799,754,116.60
009	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panarukan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Panarukan	100%	2,129,629,860	BLUD			2,342,592,846.00
010	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kendit	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Kendit	100%	1,164,536,254	BLUD			1,280,989,879.40
011	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mlandingan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Mlandingan	100%	1,495,330,123	BLUD			1,644,863,135.30
012	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Bungatan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Bungatan	100%	1,304,756,400	BLUD			1,435,232,040.00
013	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Suboh	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Suboh	100%	1,433,658,000	BLUD			1,577,023,800.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
014	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Besuki	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Besuki	100%	2,596,544,080	BLUD			2,856,198,488.00
015	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jatibanteng	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Jatibanteng	100%	1,466,657,468	BLUD			1,613,323,214.80
016	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Sumbermalang	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Sumbermalang	100%	1,755,525,374	BLUD			1,931,077,911.40
017	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuglugur	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	Puskesmas Banyuglugur	100%	950,051,592	BLUD			1,045,056,751.20
1102.110201.20.002	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				12,143,000,000				13,357,300,000
001	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuputih (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Banyuputih	100%	694,000,000	DAK Non Fisik			763,400,000.00
002	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Asembagus (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Asembagus	100%	755,094,200	DAK Non Fisik			830,603,620.00
003	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jangkar (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Jangkar	100%	680,928,000	DAK Non Fisik			749,020,800.00
004	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjasa (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Arjasa	100%	752,308,800	DAK Non Fisik			827,539,680.00
005	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kapongan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Kapongan	100%	663,594,900	DAK Non Fisik			729,954,390.00
006	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panji (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Panji	100%	702,153,600	DAK Non Fisik			772,368,960.00
007	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mangaran (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Mangaran	100%	574,346,800	DAK Non Fisik			631,781,480.00
008	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Situbondo (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Situbondo	100%	620,158,050	DAK Non Fisik			682,173,855.00
009	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panarukan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Panarukan	100%	638,913,000	DAK Non Fisik			702,804,300.00
010	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendit (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Kendit	100%	643,886,800	DAK Non Fisik			708,275,480.00
011	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bungatan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Bungatan	100%	603,330,800	DAK Non Fisik			663,663,880.00
012	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mlandingan (DAK Non Fisik)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Mlandingan	100%	643,039,100	DAK Non Fisik			707,343,010.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Suboh (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Suboh	100%	638,288,850	DAK Non Fisik			702,117,735.00
014	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Besuki (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Besuki	100%	558,779,100	DAK Non Fisik			614,657,010.00
015	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jatibanteng (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Jatibanteng	100%	602,686,950	DAK Non Fisik			662,955,645.00
016	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumbermalang (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Sumbermalang	100%	629,152,150	DAK Non Fisik			692,067,365.00
017	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuglugur (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Banyuglugur	100%	617,226,200	DAK Non Fisik			678,948,820.00
018	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wonorejo (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	289,462,200	DAK Non Fisik			318,408,420.00
019	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Klampokan (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	408,997,550	DAK Non Fisik			449,897,305.00
020	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Widoropayung (DAK Non Fisik - BOK)	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	426,652,950	DAK Non Fisik			469,318,245.00
1102.110201.20.003	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas				2,974,775,950				3,272,253,545
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Kapongan	100%	90,400,000.00	APBD			99,440,000.00
002	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Banyuputih	100%	53,372,000.00	APBD			58,709,200.00
003	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Asembagus	100%	74,595,000.00	APBD			82,054,500.00
004	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Jangkar	100%	93,050,000.00	APBD			102,355,000.00
005	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Arjasa	100%	63,365,000.00	APBD			69,701,500.00
006	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Panji	100%	105,750,000.00	APBD			116,325,000.00
007	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Mangaran	100%	95,470,000.00	APBD			105,017,000.00
008	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Situbondo	100%	77,100,000.00	APBD			84,810,000.00
009	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Panarukan	100%	111,836,250.00	APBD			123,019,875.00
010	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Kendit	100%	61,200,000.00	APBD			67,320,000.00
011	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Bungatan	100%	44,155,000.00	APBD			48,570,500.00
012	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Mlandingan	100%	101,000,000.00	APBD			111,100,000.00
013	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Suboh	100%	83,550,000.00	APBD			91,905,000.00
014	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Besuki	100%	54,000,000.00	APBD			59,400,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Jatibanteng	100%	49,340,000.00	APBD			54,274,000.00
016	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Sumbermalang	100%	117,200,000.00	APBD			128,920,000.00
017	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Banyuglugur	100%	63,050,000.00	APBD			69,355,000.00
018	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	70,000,000.00	APBD			77,000,000.00
019	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	60,000,000.00	APBD			66,000,000.00
020	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	62,300,000.00	APBD			68,530,000.00
021	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	210,606,000.00	APBD			231,666,600.00
022	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	403,374,000.00	APBD			443,711,400.00
023	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	597,246,000.00	APBD			656,970,600.00
024	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	98,328,000.00	APBD			108,160,800.00
025	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	1,000,000.00	APBD			1,100,000.00
026	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	71,580,400.00	APBD			78,738,440.00
027	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	1,750,000.00	APBD			1,925,000.00
028	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	5,000,000.00	APBD			5,500,000.00
029	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	200,000.00	APBD			220,000.00
030	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Wonorejo	100%	29,080,800.00	APBD			31,988,880.00
031	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Klampokan	100%	20,877,500.00	APBD			22,965,250.00
032	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	Puskesmas Widoropayung	100%	5,000,000.00	APBD			5,500,000.00
1102.110201.20.004	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten		GFK	100%	354,806,200	APBD			390,286,820
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	GFK	100%	207,540,200	APBD			228,294,220.00
002	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK - Non Fisik)	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	GFK	100%	147,266,000	DAK Non Fisik			161,992,600.00
1102.110201.20.005	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda		LABKESDA	100%	209,619,100	APBD			230,581,010
001	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	LABKESDA	100%	78,819,100	APBD			86,701,010.00
002	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum di UPT Labkesda	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	LABKESDA	100%	82,300,000	APBD			90,530,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	Pemeriksaan sampel Air Secara Bakteriologis dan Kimia (PAJAK ROKOK)	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	LABKESDA	100%	24,600,000	PAJAK ROKOK			27,060,000.00
004	Pemeriksaan Makanan yang Mengandung Formalin dan Borax (PAJAK ROKOK)	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	LABKESDA	100%	23,900,000	PAJAK ROKOK			26,290,000.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				5,620,211,500				6,182,232,650.00
002-004	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pembangunan Ponkesdes Kalirejo Kec Sumbermalang (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Kalirejo		393,600,000	DBHCHT			
002-006	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Perluasan Ponkesdes Wonorejo Kec Banyuwutih (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Wonorejo		139,500,000	DBHCHT			
002-007	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes Sumberanyar Kec Jatibanteng (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Sumberanyar		275,520,000	DBHCHT			
002-008	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi Pustu Sumberanyar Mlandingan (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Pustu Sumberanyar Mlandingan		275,520,000	DBHCHT			
002-009	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Penurunan Faktor Resiko PTM (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			637,125,000	DBHCHT			
002-011	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Ambulance Rujukan (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			900,000,000	DBHCHT			
002-014	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan untuk 3 Puskesmas Baru (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	3 Puskesmas Baru		1,739,429,500	DBHCHT			
002-017	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana&Prasarana Fasilitas Kesehatan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan melalui Pembangunan Ponkesdes Kayumas Kec Arjasa (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Kayumas		472,317,000	DBHCHT			
002-018	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Perante Kec Asembagus (DBHCHT)	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Perante		393,600,000				

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002-019	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Tanah Merah Kec Arjasa	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	Ponkesdes Tanah Merah		393,600,000				
JUMLAH						106,147,776,248.00			

TABEL T-C.32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN SITUBONDO**

NAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

No	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Catatan
1	2	4	3	5	7
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
	Peningkatan, pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR		
	Pemasangan Kanopi Ponkesdes		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Ponkesdes		musrenbang
		Puskesmas Widoropayung		70 mtr	
	Pemasangan Paving Pustu		Jumlah Luas Pustu yang dipaving		musrenbang
		Pustu Juglangan		175 mtr	
		Pustu Semiring		128 mtr	
		Pustu Tj. Kamal		20 mtr	
		Pustu Mimbaan		105 mtr	
		Pustu Jatisari		110 mtr	
		Pustu Mojodungkul		300 mtr	
		Pustu Tambak Ukir		30 mtr	
		Pustu Agel		240 mtr	
		Pustu Curah Kalak		150 mtr	
	Pembangunan Pagar Pustu		Jumlah Luas Pustu yang pagar		musrenbang
		Pustu Gunung Malang		70 mtr	
		Pustu Curahtatal		100 mtr	
		Pustu Bayeman		30 mtr	
		Pustu Ketowan		82 mtr	

No	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Catatan
1	2	4	3	5	7
		Pustu Campalok Jatisari		77 mtr	
		Pustu Kayumas		110 mtr	
		Pustu Pokaan		80 mtr	
		Pustu Taman		60 mtr	
	Pemasangan Kanopi Pustu		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Pustu		musrenbang
		Pustu Agel		50 mtr	
		Pustu Semiring		20 mtr	
		Pustu Tj. Kamal		26 mtr	
		Pustu Trebungan		20 mtr	
		Pustu Taman Sari		30 mtr	
	Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes		Jumlah Luas Ponkesdes yang di rehab		musrenbang
		Ponkesdes Siliwung		80 M2	
		Ponkesdes Taman		80 M2	
		Ponkesdes Jatisari		80 M2	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Jumlah Luas Rumah Dinas yang di rehab		musrenbang
	Rumah Dinas Talkandang	Pusk Situbondo		80 M2	
	Rumah Dinas Dokter Desa Ketowan Kec Arjasa	Pusk Arjasa		80 M2	
	Rumah Dinas Dokter Kendit Kec Kendit	Pusk Kendit		80 M2	
	Pengadaan Genset Puskesmas (PAJAK ROKOK)		Jumlah Genset yang dibutuhkan oleh puskesmas		
		Puskesmas Wonorejo		1 unit	
		Puskesmas Widoropayung		1 unit	
		Puskesmas Klampokan		1 unit	
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan (DAK)	Puskesmas Klampokan	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan	538 M2	musrenbang

TABEL T-C.31
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN SITUBONDO

NAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				119,031,991,063.90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				#REF!
	Kesehatan				119,031,991,063.90	Kesehatan				#REF!
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		5,760,547,360.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		2,145,950,300.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.00	495,714,978.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.00	445,200,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	22,853,137.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	100%	14,190,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	3,815,723,315.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya honor administrasi perkantoran	100%	688,800,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	241,375,186.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase terbayarnya jasa kebersihan dan Jasa Keamanan Kantor serta tersedianya bahan pembersih serta peralatan kebersihan	100%	163,525,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	76,301,132.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya alat tulis kantor	100%	10,851,200.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	83,827,046.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya belanja cetak dan penggandaan SKPD	100%	10,340,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	16,870,092.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di SKPD	100%	9,245,600.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2,898,918.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	prosentase terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2,100,000.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%		Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	50,541,025.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	prosentase tersedianya makan dan minum di SKPD	100%	26,010,000.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Dinas Kesehatan	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Dinas Kesehatan	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Dinas Kesehatan	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	777,038,865.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Dinas Kesehatan	prosentase terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	475,000,000.00
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%	31,944,000.00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga yang melakukan pengamanan kantor	100%	72,000,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Dinas Kesehatan	Jumlah honor yang dibayarkan	100%		Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Dinas Kesehatan	Jumlah honor yang dibayarkan	100%	
	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Dinas Kesehatan	Jumlah honor yang dibayarkan	100%	10,629,366.00	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Dinas Kesehatan	Jumlah honor yang dibayarkan	100%	12,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%	48,315,300.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	100%	196,738,500.00
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%		Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%	
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%	36,300,000.00	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya kebutuhan dalam rangka peringatan Hari Besar Agama	100%	19,950,000.00
	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo Harjakasi	100%		Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo Harjakasi	100%	
	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Harjakasi	100%	25,107,500.00	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Harjakasi	100%	0.00
	Best Situbondo Carnival (BSC)	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo	100%	25,107,500.00	Best Situbondo Carnival (BSC)	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Best Situbondo	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		17,977,728,233	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		18,495,097,700
	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket		Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket	
	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket	100,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun	1 paket	130,788,500
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	100,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	0
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit	400,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Ac, Genset)	2 unit	400,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop, komputer dan printer	22 unit		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop, komputer dan printer	22 unit	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop, komputer dan printer	22 unit	273,698,927	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop, komputer dan printer	22 unit	49,500,000
	Pengadaan Mebeleur	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja			Pengadaan Mebeleur	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja		
	Pengadaan Mebeleur	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja		85,435,945	Pengadaan Mebeleur	Dinas Kesehatan	Jumlah terbelinya meja kerja dan kursi kerja		25,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket	100,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase gedung kantor yang dipelihara kondisinya	1 paket	80,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil	368,396,110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 mobil	175,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	38,100,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	61,038,329	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	prosentase peralatan kantor yang dipelihara kondisinya	80%	50,000,000
	Peningkatan, pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR		16,439,158,922	Peningkatan, pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA YANG MEMENUHI STANDAR		17,546,709,200
	Pembangunan Pagar Puskesmas		Jumlah Luas Pagar yang dibangun di Puskesmas			Pembangunan Pagar Puskesmas		Jumlah Luas Pagar yang dibangun di Puskesmas		527,040,000.00
		Puskesmas Banyuglugur		50 mtr			Puskesmas Banyuglugur		50 mtr	
		Puskesmas Jatibanteng		75 mtr			Puskesmas Jatibanteng		75 mtr	
		Puskesmas Widoropayung		74 mtr			Puskesmas Widoropayung		74 mtr	
		Puskesmas Wonorejo		89 mtr			Puskesmas Wonorejo		89 mtr	
	Pemasangan Paving Puskesmas		Jumlah Luas Paving yang terpasang di Puskesmas			Pemasangan Paving Puskesmas		Jumlah Luas Paving yang terpasang di Puskesmas		0.00
		Puskesmas Widoropayung		286 mtr			Puskesmas Widoropayung		286 mtr	
		Puskesmas Jatibanteng		256 mtr			Puskesmas Jatibanteng		256 mtr	
		Puskesmas Panji		754 mtr			Puskesmas Panji		754 mtr	
		Puskesmas Wonorejo		871 mtr			Puskesmas Wonorejo		871 mtr	
	Perluasan Puskesmas					Perluasan Puskesmas				2,076,444,200.00
	Perluasan Puskesmas Jangkar	Puskesmas Jangkar		60 M2		Perluasan Puskesmas Ja	Puskesmas Jangkar		60 M2	
	Perluasan Puskesmas Panji	Puskesmas Panji		200 M2		Perluasan Puskesmas Pa	Puskesmas Panji		200 M2	
	Pembangunan Poli TB DOTS Puskesmas Besuki	Puskesmas Besuki		10 M2		Pembangunan Poli TB DC	Puskesmas Besuki		10 M2	
	Pembangunan garasi ambulance puskesmas arjasa	puskesmas arjasa		54 M2		Pembangunan garasi ambulance puskesmas arjasa	puskesmas arjasa		54 M2	
	Ruang Sekurity Pusk Arjasa	Pusk Arjasa		6 M2		Ruang Sekurity Pusk Arja	Pusk Arjasa		6 M2	
	RUANG DAPUR/GIZI Pusk Arjasa	Pusk Arjasa		18 M2		RUANG DAPUR/GIZI Pus	Pusk Arjasa		18 M2	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	PEMBANGUNAN RUANG KONSUL TB Pusk Arjasa	Pusk Arjasa		24 M2		PEMBANGUNAN RUANG	Pusk Arjasa		24 M2	
	PEMBANGUNAN RUANG SOPIR Pusk Arjasa	Pusk Arjasa		24 M2		PEMBANGUNAN RUANG	Pusk Arjasa		24 M2	
	PEMBANGUNAN RUANG RAMAH ANAK Pusk Arjasa	Pusk Arjasa		50 M2		PEMBANGUNAN RUANG	Pusk Arjasa		50 M2	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu		Jumlah luas Puskesmas yang diperluas			Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu		Jumlah luas Puskesmas yang diperluas		550,000,000.00
		Pustu Sumberanyar Kec Banyuputih		80 M2			Pustu Sumberanyar Kec Banyuputih		80 M2	
		Pustu Lubawang Kec Banyuglugur		80 M2			Pustu Lubawang Kec Banyuglugur		80 M2	
		Pustu Pasir Putih Kec Bungatan		80 M2			Pustu Pasir Putih Kec Bungatan		80 M2	
		Pustu Gadarsi Arjasa Kec Arjasa		400 M2			Pustu Gadarsi Arjasa Kec Arjasa		400 M2	
		Pustu Pesisir Kec Besuki		80 M2			Pustu Pesisir Kec Besuki		80 M2	
		Pustu Bloro Kec Suboh		80 M2			Pustu Bloro Kec Suboh		80 M2	
		Pustu Demung Kec Besuki		80 M2			Pustu Demung Kec Besuki		80 M2	
	Pemasangan Kanopi Puskesmas		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Puskesmas			Pemasangan Kanopi Puskesmas		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Puskesmas		0.00
		Puskesmas Widoropayung		70 mtr			Puskesmas Widoropayung		70 mtr	
		Puskesmas Wonorejo		208 mtr			Puskesmas Wonorejo		208 mtr	
	Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas		Jumlah Luas Tempat Parkir Puskesmas yang dibangun			Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas		Jumlah Luas Tempat Parkir Puskesmas yang dibangun		112,500,000.00
		Pusk Panarukan		150 mtr			Pusk Panarukan		150 mtr	
	Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas		Jumlah Luas Ruang Pertemuan Yang dibangun			Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas		Jumlah Luas Ruang Pertemuan Yang dibangun		0.00
		Puskesmas Besuk		100 mtr			Puskesmas Besuk		100 mtr	
		Puskesmas Mangaran		130 mtr			Puskesmas Mangaran		130 mtr	
	Pemasangan Neonbox Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dipasang Neonbox			Pemasangan Neonbox Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dipasang Neonbox		0.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
		Puskesmas Widoropayung		1 pkt			Puskesmas Widoropayung		1 pkt	
		Puskesmas Wonorejo		1 pkt			Puskesmas Wonorejo		1 pkt	
	Pembangunan Pagar Ponkesdes		Jumlah Luas ponkesdes yang di pagar			Pembangunan Pagar Ponkesdes		Jumlah Luas ponkesdes yang di pagar		100,000,000.00
		Ponkesdes Sidodadi		65 mtr			Ponkesdes Sidodadi		65 mtr	
		Ponkesdes Battal		20 mtr			Ponkesdes Battal		20 mtr	
		Ponkesdes Kedungdowo		90 mtr			Ponkesdes Kedungdowo		90 mtr	
		Ponkesdes Kumbangsari		15 mtr			Ponkesdes Kumbangsari		15 mtr	
		Ponkesdes Sumberejo		60 mtr			Ponkesdes Sumberejo		60 mtr	
		Ponkesdes Kilensari		85 mtr			Ponkesdes Kilensari		85 mtr	
		Ponkesdes Taman Kursi		45 mtr			Ponkesdes Taman Kursi		45 mtr	
		Ponkesdes Wonorejo		50 mtr			Ponkesdes Wonorejo		50 mtr	
		Ponkesdes Olean 2		50 mtr			Ponkesdes Olean 2		50 mtr	
	Pemasangan Paving Ponkesdes		Jumlah Luas Ponkesdes yang dipaving			Pemasangan Paving Ponkesdes		Jumlah Luas Ponkesdes yang dipaving		405,275,000.00
		Ponkesdes Battal		56 mtr			Ponkesdes Battal		56 mtr	
		Ponkesdes Sumberargo		900 mtr			Ponkesdes Sumberargo		900 mtr	
		Ponkesdes Tj. Glugur		48 mtr			Ponkesdes Tj. Glugur		48 mtr	
		Ponkesdes Balung		111 mtr			Ponkesdes Balung		111 mtr	
		Ponkesdes Rejekwesi		111 mtr			Ponkesdes Rejekwesi		111 mtr	
		Ponkesdes Kukusan		20 mtr			Ponkesdes Kukusan		20 mtr	
		Ponkesdes Klatakan		15 mtr			Ponkesdes Klatakan		15 mtr	
		Ponkesdes Alas Tengah		540 mtr			Ponkesdes Alas Tengah		540 mtr	
	Pembangunan Ponkesdes		Jumlah Ponkesdes yang dibangun			Pembangunan Ponkesdes		Jumlah Ponkesdes yang dibangun		750,000,000.00
		Ponkesdes Kapongan		80 M2			Ponkesdes Kapongan		80 M2	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
		Ponkesdes Kilensari		80 M2			Ponkesdes Kilensari		80 M2	
		Ponkesdes Alas Bayur Atas		80 M2			Ponkesdes Alas Bayur Atas		80 M2	
		Ponkesdes Campoan		80 M2			Ponkesdes Campoan		80 M2	
	Pemasangan Kanopi Ponkesdes		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Ponkesdes			Pemasangan Kanopi Ponkesdes		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Ponkesdes		0.00
		Puskesmas Widoropayung		70 mtr			Puskesmas Widoropayung		70 mtr	
	Pemasangan Paving Pustu		Jumlah Luas Pustu yang dipaving			Pemasangan Paving Pustu		Jumlah Luas Pustu yang dipaving		283,050,000.00
		Pustu Juglangan		175 mtr			Pustu Juglangan		175 mtr	
		Pustu Semiring		128 mtr			Pustu Semiring		128 mtr	
		Pustu Tj. Kamal		20 mtr			Pustu Tj. Kamal		20 mtr	
		Pustu Mimbaan		105 mtr			Pustu Mimbaan		105 mtr	
		Pustu Jatisari		110 mtr			Pustu Jatisari		110 mtr	
		Pustu Mojodungkul		300 mtr			Pustu Mojodungkul		300 mtr	
		Pustu Tambak Ukir		30 mtr			Pustu Tambak Ukir		30 mtr	
		Pustu Agel		240 mtr			Pustu Agel		240 mtr	
		Pustu Curah Kalak		150 mtr			Pustu Curah Kalak		150 mtr	
	Pembangunan Pagar Pustu		Jumlah Luas Pustu yang pagar			Pembangunan Pagar Pustu		Jumlah Luas Pustu yang pagar		0.00
		Pustu Gunung Malang		70 mtr			Pustu Gunung Malang		70 mtr	
		Pustu Curahtatal		100 mtr			Pustu Curahtatal		100 mtr	
		Pustu Bayeman		30 mtr			Pustu Bayeman		30 mtr	
		Pustu Ketowan		82 mtr			Pustu Ketowan		82 mtr	
		Pustu Campalok Jatisari		77 mtr			Pustu Campalok Jatisari		77 mtr	
		Pustu Kayumas		110 mtr			Pustu Kayumas		110 mtr	
		Pustu Pokaan		80 mtr			Pustu Pokaan		80 mtr	
		Pustu Taman		60 mtr			Pustu Taman		60 mtr	
	Pemasangan Kanopi Pustu		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Pustu			Pemasangan Kanopi Pustu		Jumlah Luas Kanopi yang terpasang di Pustu		0.00
		Pustu Agel		50 mtr			Pustu Agel		50 mtr	
		Pustu Semiring		20 mtr			Pustu Semiring		20 mtr	
		Pustu Tj. Kamal		26 mtr			Pustu Tj. Kamal		26 mtr	
		Pustu Trebungan		20 mtr			Pustu Trebungan		20 mtr	
		Pustu Taman Sari		30 mtr			Pustu Taman Sari		30 mtr	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes		Jumlah Luas Ponkesdes yang di rehab			Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes		Jumlah Luas Ponkesdes yang di rehab		550,000,000.00
		Ponkesdes Siliwung		80 M2			Ponkesdes Siliwung		80 M2	
		Ponkesdes Taman		80 M2			Ponkesdes Taman		80 M2	
		Ponkesdes Jatisari		80 M2			Ponkesdes Jatisari		80 M2	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Jumlah Luas Rumah Dinas yang di rehab			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Jumlah Luas Rumah Dinas yang di rehab		500,000,000.00
	Rumah Dinas Talkandang	Pusk Situbondo		80 M2		Rumah Dinas Talkandang	Pusk Situbondo		80 M2	
	Rumah Dinas Dokter Desa Ketowan Kec Arjasa	Pusk Arjasa		80 M2		Rumah Dinas Dokter Desa Ketowan Kec Arjasa	Pusk Arjasa		80 M2	
	Rumah Dinas Dokter Kendit Kec Kendit	Pusk Kendit		80 M2		Rumah Dinas Dokter Kendit Kec Kendit	Pusk Kendit		80 M2	
	Pengadaan Genset Puskesmas (PAJAK ROKOK)		Jumlah Genset yang dibutuhkan oleh puskesmas			Pengadaan Genset Puskesmas (PAJAK ROKOK)		Jumlah Genset yang dibutuhkan oleh puskesmas		900,000,000.00
		Puskesmas Wonorejo		1 unit			Puskesmas Wonorejo		1 unit	
		Puskesmas Widoropayung		1 unit			Puskesmas Widoropayung		1 unit	
		Puskesmas Klampokan		1 unit			Puskesmas Klampokan		1 unit	
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh (DAK)	Puskesmas Suboh	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh	1 pkt		Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh (DAK)	Puskesmas Suboh	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Suboh	1 pkt	2,500,000,000.00
	Perluasan Puskesmas Sumbermalang (DAK)	Puskesmas Sumbermalang	Jumlah Perluasan Puskesmas Sumbermalang	860 M2		Perluasan Puskesmas Sumbermalang (DAK)	Puskesmas Sumbermalang	Jumlah Perluasan Puskesmas Sumbermalang	860 M2	4,000,000,000.00
	Pembangunan Gudang Puskesmas	Puskesmas Mangaran	Jumlah Pembangunan Gudang Puskesmas	20 M2		Pembangunan Gudang Puskesmas	Puskesmas Mangaran	Jumlah Pembangunan Gudang Puskesmas	20 M2	92,400,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan (DAK)	Puskesmas Klampokan	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan	538 M2		Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan (DAK)	Puskesmas Klampokan	Jumlah Luas Pembangunan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Klampokan	538 M2	2,500,000,000.00
	Perencanaan Pengadaan Tanah	Pusk Widoropayung				Perencanaan Pengadaan Tanah	Pusk Widoropayung			129,885,500.00
	Persiapan Pengadaan Tanah	Pusk Klampokan				Persiapan Pengadaan Tanah	Pusk Klampokan			64,728,200.00
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Pusk Mlandingan				Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Pusk Mlandingan			1,405,386,300.00
	Pemasangan Paving Rumah Dinas		Jumlah Luas Pemasangan Paving Rumah Sakit			Pemasangan Paving Rumah Dinas		Jumlah Luas Pemasangan Paving Rumah Sakit		
	Rumah Dinas Kendit	Pusk Kendit		222 mtr		Rumah Dinas Kendit	Pusk Kendit		222 mtr	50,000,000.00
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas		Jumlah Luas Pembangunan Pagar Rumah Dinas			Pembangunan Pagar Rumah Dinas		Jumlah Luas Pembangunan Pagar Rumah Dinas		
	Pagar Rumah Dinas Kendit	Pusk Kendit		27 mtr		Pagar Rumah Dinas Kendit	Pusk Kendit		27 mtr	50,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PROSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		703,551,906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PROSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		540,373,500
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	23,516,235	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen	17,080,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	
	Monitoring dan Evaluasi Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	26,435,716	Monitoring dan Evaluasi Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen akhir tahun SKPD	1 Dokumen	92,506,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen		Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen	
	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen	80,747,670	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	18 Dokumen	40,000,000
	Penyusunan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	
	Penyusunan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	72,852,285	Penyusunan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	25,000,000
	Peningkatan upaya standar pelayanan dan teknologi	Dinas Kesehatan	Prosentase SPM Kesehatan dan Informasi Tehnologi yang memenuhi target	90%	500,000,000	Peningkatan upaya standar pelayanan dan teknologi	Dinas Kesehatan	Prosentase SPM Kesehatan dan Informasi Tehnologi yang memenuhi target	90%	
	Evaluasi Data Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah bimtek dan validasi data dalam pelaksanaan program SPM (Standar pelayanan Minimal)	5 Kali		Evaluasi Data Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah bimtek dan validasi data dalam pelaksanaan program SPM (Standar pelayanan Minimal)	5 Kali	49,498,500
	Pembangunan dan Pemuktahiran Profil dan Data Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil, Buletin dan Data dasar Kesehatan yang sesuai standar	5 Dokumen		Pembangunan dan Pemuktahiran Profil dan Data Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil, Buletin dan Data dasar Kesehatan yang sesuai standar	5 Dokumen	63,482,000
	Penyediaan Program Terintegrasi E-Billing	Dinas Kesehatan	prosentase aplikasi program yang terintegrasi E-Billing	90%		Penyediaan Program Terintegrasi E-Billing	Dinas Kesehatan	prosentase aplikasi program yang terintegrasi E-Billing	90%	252,807,000
	Program Sumber Daya Kesehatan		Prosentase Ketersediaan Obat		31,793,658,031	Program Sumber Daya Kesehatan		Prosentase Ketersediaan Obat		24,590,462,807
			Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN					Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN		
			Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah					Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah		
	Peningkatan Upaya Obat dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan			8,006,698,650	Peningkatan Upaya Obat dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan			7,864,535,807

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pengawasan Obat, Obat Traditional dan Kosmetik di Pasaran	Dinas Kesehatan	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%		Pengawasan Obat, Obat Traditional dan Kosmetik di Pasaran	Dinas Kesehatan	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%	61,120,500
	Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	100%		Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	100%	16,355,500
			Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	90%				Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	90%	
	Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Pajak rokok)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali		Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Pajak rokok)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali	108,341,950
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi)	Dinas Kesehatan	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi)	Dinas Kesehatan	Prosentase Kesesuaian obat di Fasyankes Primer dan Lanjutan dibanding Formularium Nasional	100%	7,065,162,357
			Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	90%				Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	90%	
	Pembinaan dan Pemantauan Toko/Swalayan dan Pasar Makanan Minuman Menjelang Hari Raya (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali		Pembinaan dan Pemantauan Toko/Swalayan dan Pasar Makanan Minuman Menjelang Hari Raya (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	5kali	13,555,500
	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk PMI									600,000,000
	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan			23,595,000,000	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan			16,480,060,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000		Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin	Dinas Kesehatan	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000	11,505,060,000
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pemberi Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	Dinas Kesehatan	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pemberi Pelayanan Kesehatan (Jamkesda)	Dinas Kesehatan	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	23000	2,000,000,000
	Bimtek, Sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Bimtek, sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas			Bimtek, Sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Bimtek, sosialisasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas		175,000,000
	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Prosentase Jampersal yang dilayani	90%		Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Prosentase Jampersal yang dilayani	90%	2,000,000,000
	Manajemen BOK dan Jampersal (DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Prosentase Manajemen Dinas Kesehatan yang bisa menyerap anggaran BOK , jampersal > 90%	90%		Manajemen BOK dan Jampersal (DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Prosentase Manajemen Dinas Kesehatan yang bisa menyerap anggaran BOK , jampersal > 90%	90%	800,000,000
	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan			191,959,381	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan			245,867,000
	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pemilihan Nakes Teladan	7 Nakes		Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pemilihan Nakes Teladan	7 Nakes	59,624,400
	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek , sosialisasi dan pelatihan	127 orang		Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek , sosialisasi dan pelatihan	127 orang	142,039,750
			Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD				Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD	
	Bimtek, Pembinaan dan Pengawasan Mutu pada Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	180 orang		Bimtek, Pembinaan dan Pengawasan Mutu pada Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	180 orang	44,202,850

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD				Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah menyusun dokumen perencanaan SDM Kesehatan	20 PKM & 3 RSUD	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		Prosentase puskesmas dan Rumah Sakit yang reakreditasi		3,525,676,309	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		Prosentase puskesmas dan Rumah Sakit yang reakreditasi		5,077,104,000
			Prosentase puskesmas yg terstandarisasi					Prosentase puskesmas yg terstandarisasi		
			Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart					Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan			750,000,000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan			4,061,963,700
	Peningkatan Minilokakarya Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang di Monev kegiatan Minilokarya di Puskesmas	20 pkm		Peningkatan Minilokakarya Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang di Monev kegiatan Minilokarya di Puskesmas	20 pkm	14,099,000
	Pelayanan Kesehatan Primer kepada Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat	61 orang		Pelayanan Kesehatan Primer kepada Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat	61 orang	337,465,700
	Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dan Unsur Masyarakat/ Organisasi (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Ponkesdes yang melakukan Kunjungan konseling	86 Perawat Ponkesdes		Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dan Unsur Masyarakat/ Organisasi (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Ponkesdes yang melakukan Kunjungan konseling	86 Perawat Ponkesdes	603,720,000
	Pemantapan terhadap Manajemen dan Pelaksanaan PIS PK	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Monev, Workshop PIS-PK Keluarga Sehat			Pemantapan terhadap Manajemen dan Pelaksanaan PIS PK	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Monev, Workshop PIS-PK Keluarga Sehat		0
	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Laboratorium	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta Kompetensi Pelayanan Laboratorium	29 orang		Peningkatan Kompetensi Pelayanan Laboratorium	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta Kompetensi Pelayanan Laboratorium	29 orang	21,850,500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Pertama dan jaringannya	7 kali		Sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi Standart Sarana Kesehatan Pertama dan jaringannya	7 kali	86,441,500
	Honor Perawat Ponkesdes (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang		Honor Perawat Ponkesdes (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang	1,496,400,000
	Honor Perawat Ponkesdes	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang		Honor Perawat Ponkesdes	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Perawat Ponkesdes yang dibayarkan	86 orang	516,000,000
	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart yang dibayarkan	5 orang		Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart yang dibayarkan	5 orang	150,000,000
	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter yang di Bayarkan	5 orang		Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter yang di Bayarkan	5 orang	7,500,000
	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes yang di Bayarkan	86 orang		Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes (BK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes yang di Bayarkan	86 orang	74,820,000
	Peningkatan Program Kesehatan Primer dan Tradisional	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yg mendapatkan layanan	82%		Peningkatan Program Kesehatan Primer dan Tradisional	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yg mendapatkan layanan	82%	140,507,000
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	7 kali				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	7 kali	
	Pemantapan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	100%		Pemantapan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	100%	43,160,000
	Penyediaan Jasa Dokter	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Dokter Yang dibayar	100%		Penyediaan Jasa Dokter	Dinas Kesehatan	Jumlah Honor Dokter Yang dibayar	100%	570,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pelayanan Rujukan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Dinas Kesehatan			600,000,000	Peningkatan Pelayanan Rujukan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Dinas Kesehatan			414,233,000
	Peningkatan Pelayanan Strata Lanjutan	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	4 kali		Peningkatan Pelayanan Strata Lanjutan	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	4 kali	214,233,000
	Peningkatan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan dan Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	6 kali		Peningkatan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan dan Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan	6 kali	200,000,000
		Dinas Kesehatan	Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	2 kali			Dinas Kesehatan	Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	2 kali	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya	Dinas Kesehatan			2,175,676,309	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya	Dinas Kesehatan			600,907,300
	Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	20 PKM & 3 RSUD		Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	20 PKM & 3 RSUD	200,000,000
	Peningkatan Mutu Fasyankes	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	5Kali		Peningkatan Mutu Fasyankes	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	5Kali	253,595,300
	Penguatan Sistem Akreditasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, resertifikasi akreditasi	6 PKM		Penguatan Sistem Akreditasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, resertifikasi akreditasi	6 PKM	147,312,000
	Program Kesehatan Masyarakat		Penurunan AKI		6,683,593,728	Program Kesehatan Masyarakat		Penurunan AKI		4,016,527,768
			Penurunan AKB					Penurunan AKB		
			Prevalensi Gizi Buruk					Prevalensi Gizi Buruk		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Prosentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan					Prosentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan		
			Prosentase Media Promosi yg dikembangkan					Prosentase Media Promosi yg dikembangkan		
	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan			1,156,591,084	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan			1,230,135,250
	Peningkatan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Prosentase promosi Kesehatan	80%		Peningkatan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Prosentase promosi Kesehatan	80%	300,000,000
	Pengembangan Taman Posyandu (BK Khusus)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengembangan taman Posyandu	160 Taman Posyandu		Pengembangan Taman Posyandu (BK Khusus)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengembangan taman Posyandu	160 Taman Posyandu	125,000,000
	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	6 kali		Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	6 kali	425,000,000
	Pendampingan Ponkestren (BK Khusus)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pendampingan Ponkestren			Pendampingan Ponkestren (BK Khusus)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka Pendampingan Ponkestren		121,029,000
	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat BOK Sekunder - DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka pengembangan Pemberdayaan masyarakat	4 kali		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat BOK Sekunder - DAK NON FISIK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi , Bimtek dalam rangka pengembangan Pemberdayaan masyarakat	4 kali	161,676,250
	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2020	Dinas Kesehatan	Jumlah peringkatan Hari Kesehatan Nasional	1 kali		Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2020	Dinas Kesehatan	Jumlah peringkatan Hari Kesehatan Nasional	1 kali	97,430,000
	Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan			2,131,575,607	Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan			1,384,951,050
	Pelaksanaan dan Pendidikan untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelatihan, Sosialisasi dan Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam kegiatan Bulan Timbang dan ePPGBM	5 kali		Pelaksanaan dan Pendidikan untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelatihan, Sosialisasi dan Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam kegiatan Bulan Timbang dan ePPGBM	5 kali	273,008,750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	200orang				Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	200orang	
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5 kali		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5 kali	552,540,300
			Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	1885 orang				Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	1885 orang	
	Pemberian PMT untuk Masyarakat yang Rawan Gizi	Dinas Kesehatan	Jumlah PMT untuk Masyarakat Rawan Gizi	7650 orang		Pemberian PMT untuk Masyarakat yang Rawan Gizi	Dinas Kesehatan	Jumlah PMT untuk Masyarakat Rawan Gizi	7650 orang	198,900,000
	Pelayanan Gizi Terintegrasi di Rumah Pemulihan Gizi	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Ahli Pada Rumah Pemulihan Gizi	10 orang		Pelayanan Gizi Terintegrasi di Rumah Pemulihan Gizi	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Ahli Pada Rumah Pemulihan Gizi	10 orang	274,402,000
	Penyediaan Peta dan Informasi tentang Gizi (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Anemia dan Pemanfaatan TTD	2 kali		Penyediaan Peta dan Informasi tentang Gizi (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Anemia dan Pemanfaatan TTD	2 kali	86,100,000
	Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan			2,807,474,769	Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan			511,943,968
	Pembinaan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sehat	3 kali		Pembinaan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sehat	3 kali	107,301,800
	Pembinaan dan Sosialisasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali		Pembinaan dan Sosialisasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali	0
	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pelayanan sanitasi dasar masyarakat	3 kali		Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pelayanan sanitasi dasar masyarakat	3 kali	163,501,200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pengawasan Kualitas Air	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Hygiene Inspeksi Sarana Air Bersih dan validasi data inpeksi SAB	3 kali		Pengawasan Kualitas Air	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi Hygiene Inspeksi Sarana Air Bersih dan validasi data inpeksi SAB	3 kali	26,451,000
	Upaya Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek Upaya Pelayanan kesehatan Olahraga	2 kali		Upaya Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek Upaya Pelayanan kesehatan Olahraga	2 kali	122,142,168
	Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, Bimtek Peningkatan Upaya kesehatan Kerja (UKK)	2 kali		Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi, Bimtek Peningkatan Upaya kesehatan Kerja (UKK)	2 kali	92,547,800
	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Usila				587,952,268	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Usila				889,497,500
	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Usila (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	11 kali		Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Usila (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	11 kali	589,497,500
		Dinas Kesehatan	prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%			Dinas Kesehatan	prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%	
	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	16 kali		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatam Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Sekolah dan Lansia	16 kali	300,000,000
		Dinas Kesehatan	prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%			Dinas Kesehatan	prosentase sasaran Masyarakat KIA yang dilayani	80%	
	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacingan)		3,467,235,497	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacingan)		2,449,943,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular (TBC BTA +, HIV)					Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular (TBC BTA +, HIV)		
			Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap					Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap		
			Prosentase Skrening Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus)					Prosentase Skrening Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus)		
			Prosentase skrening Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)					Prosentase skrening Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)		
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan			1,607,474,769	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan			1,416,116,300
	Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Penguatan Komisi Penang	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	77,150,000
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali		
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Binatang	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Binatang	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	310,251,000
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali		
			prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%			prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%		
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular IMS dan HIV/AIDS (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular IMS dan HIV/AIDS (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	515,430,600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali	
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HISP	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HISP	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	142,106,500
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali	
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	163,035,200
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	3 kali	
			prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%				prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%	
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (PAJAK ROKOK)	Dinas Kesehatan	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	208,143,000
			Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	4 kali	
			prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%				prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%	
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan			1,200,000,000	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan			543,289,050
	Layanan Penunjang Pada Disabilitas	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali		Layanan Penunjang Pada Disabilitas	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali	154,564,000
			Jumlah Alat Penunjang Disabilitas	50 Alat Penunjang				Jumlah Alat Penunjang Disabilitas	50 Alat Penunjang	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Pelayanan Kesehatan Indera dan Gigi Mulut	Dinas Kesehatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indra dan Gilut	100%		Pelayanan Kesehatan Indera dan Gigi Mulut	Dinas Kesehatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indra dan Gilut	100%	129,644,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	Prosentase ODGJ yg ditangani	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	Prosentase ODGJ yg ditangani	100%	116,183,000
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	1 kali	142,898,050
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dan Imunisasi				659,760,728	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dan Imunisasi				490,538,550
	Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	3 Kali		Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini	Dinas Kesehatan	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	3 Kali	148,091,500
			Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan	60 kasus				Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan	60 kasus	
	Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Dinas Kesehatan	Prosentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%		Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Dinas Kesehatan	Prosentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%	108,923,000
	Peningkatan Imunisasi Rutin dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Dinas Kesehatan	Prosentase sasaran yg diimunisasi	90%		Peningkatan Imunisasi Rutin dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Dinas Kesehatan	Prosentase sasaran yg diimunisasi	90%	233,524,050
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT (Puskesmas, GFK dan Labkesda)		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan IKM sesuai standar		44,120,000,000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT (Puskesmas, GFK dan Labkesda)		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan IKM sesuai standar		43,212,104,773
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas				30,000,000,000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas				27,529,903,523

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuputih	Puskesmas Banyuputih	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuputih	Puskesmas Banyuputih	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,791,441,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Asembagus	Puskesmas Asembagus	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Asembagus	Puskesmas Asembagus	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,905,055,038
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jangkar	Puskesmas Jangkar	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jangkar	Puskesmas Jangkar	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,560,166,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Arjasa	Puskesmas Arjasa	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Arjasa	Puskesmas Arjasa	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,910,651,655
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kapongan	Puskesmas Kapongan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kapongan	Puskesmas Kapongan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,400,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panji	Puskesmas Panji	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panji	Puskesmas Panji	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,571,630,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mangaran	Puskesmas Mangaran	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mangaran	Puskesmas Mangaran	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,458,130,573
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,636,140,106
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panarukan	Puskesmas Panarukan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Panarukan	Puskesmas Panarukan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	2,129,629,860
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kendit	Puskesmas Kendit	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Kendit	Puskesmas Kendit	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,164,536,254

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mlandingan	Puskesmas Mlandingan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Mlandingan	Puskesmas Mlandingan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,495,330,123
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Bungatan	Puskesmas Bungatan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Bungatan	Puskesmas Bungatan	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,304,756,400
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Suboh	Puskesmas Suboh	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Suboh	Puskesmas Suboh	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,433,658,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Besuki	Puskesmas Besuki	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Besuki	Puskesmas Besuki	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	2,596,544,080
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,466,657,468

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Sumbermalang	Puskesmas Sumbermalang	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Sumbermalang	Puskesmas Sumbermalang	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	1,755,525,374
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuglugur	Puskesmas Banyuglugur	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%		Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BLUD Puskesmas Banyuglugur	Puskesmas Banyuglugur	prosentase penyediaan pelayanan kesehatan di UPT BLUD Puskesmas (Jamkesda, Umum, Kapitasi dan Non Kapitasi)	100%	950,051,592
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				12,500,000,000	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				12,143,000,000
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuputih (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuputih (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	694,000,000
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Asembagus (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Asembagus (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	755,094,200
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jangkar (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jangkar (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	680,928,000
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjasa (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjasa (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	752,308,800
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kapongan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kapongan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	663,594,900
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panji (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panji (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	702,153,600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mangaran (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mangaran (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	574,346,800
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Situbondo (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Situbondo (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	620,158,050
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panarukan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panarukan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	638,913,000
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendit (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendit (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	643,886,800
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bungatan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bungatan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	603,330,800
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mlandingan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mlandingan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	643,039,100
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Suboh (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Suboh (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	638,288,850
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Besuki (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Besuki (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	558,779,100
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jatibanteng (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jatibanteng (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	602,686,950
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumbermalang (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumbermalang (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	629,152,150

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuglugur (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuglugur (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	617,226,200
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wonorejo (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wonorejo (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	289,462,200
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Klampokan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Klampokan (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	408,997,550
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Widoropayung (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Widoropayung (DAK Non Fisik - BOK)	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran BOK yang terserap	100%	426,652,950
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas				1,350,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas				2,974,775,950
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kapongan	Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kapongan	Puskesmas Kapongan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	90,400,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuputih	Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuputih	Puskesmas Banyuputih	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	53,372,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Asembagus	Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Asembagus	Puskesmas Asembagus	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	74,595,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jangkar	Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jangkar	Puskesmas Jangkar	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	93,050,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Arjasa	Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Arjasa	Puskesmas Arjasa	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	63,365,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panji	Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panji	Puskesmas Panji	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	105,750,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mangaran	Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mangaran	Puskesmas Mangaran	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	95,470,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Situbondo	Puskesmas Situbondo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	77,100,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panarukan	Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Panarukan	Puskesmas Panarukan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	111,836,250.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kendit	Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Kendit	Puskesmas Kendit	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	61,200,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Bungatan	Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Bungatan	Puskesmas Bungatan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	44,155,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mlandingan	Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Mlandingan	Puskesmas Mlandingan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	101,000,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Suboh	Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Suboh	Puskesmas Suboh	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	83,550,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Besuki	Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Besuki	Puskesmas Besuki	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	54,000,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Jatibanteng	Puskesmas Jatibanteng	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	49,340,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Sumbermalang	Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Sumbermalang	Puskesmas Sumbermalang	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	117,200,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuglugur	Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Banyuglugur	Puskesmas Banyuglugur	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	63,050,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	70,000,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	60,000,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	62,300,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	210,606,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	403,374,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	597,246,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	98,328,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	1,000,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	71,580,400.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	1,750,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	5,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan SPM Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	200,000.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Wonorejo	Puskesmas Wonorejo	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	29,080,800.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Klampokan	Puskesmas Klampokan	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	20,877,500.00
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum Puskesmas Widoropayung	Puskesmas Widoropayung	prosentase realisasi anggaran rutin yang terserap	100%	5,000,000.00
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	GFK		100%	195,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	GFK		100%	354,806,200
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	GFK	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Gudang Farmasi Kabupaten	GFK	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%	207,540,200
	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK - Non Fisik)	GFK	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%		Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK - Non Fisik)	GFK	Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK	100%	147,266,000
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	LABKESDA		100%	75,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	LABKESDA		100%	209,619,100
	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Labkesda	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	78,819,100
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum di UPT Labkesda	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Umum di UPT Labkesda	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	82,300,000
	Pemeriksaan sampel Air Secara Bakteriologis dan Kimia (PAJAK ROKOK)	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%		Pemeriksaan sampel Air Secara Bakteriologis dan Kimia (PAJAK ROKOK)	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	24,600,000
	Pemeriksaan Makanan yang Mengandung Formalin dan Borax (PAJAK ROKOK)	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%		Pemeriksaan Makanan yang Mengandung Formalin dan Borax (PAJAK ROKOK)	LABKESDA	Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda	100%	23,900,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				5,000,000,000	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				5,620,211,500
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pembangunan Ponkesdes Kalirejo Kec Sumbermalang (DBHCHT)	Ponkesdes Kalirejo	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pembangunan Ponkesdes Kalirejo Kec Sumbermalang (DBHCHT)	Ponkesdes Kalirejo	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		393,600,000
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Perluasan Ponkesdes Wonorejo Kec Banyuputih (DBHCHT)	Ponkesdes Wonorejo	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Perluasan Ponkesdes Wonorejo Kec Banyuputih (DBHCHT)	Ponkesdes Wonorejo	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		139,500,000
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes Sumberanyar Kec Jatibanteng (DBHCHT)	Ponkesdes Sumberanyar	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi sedang/berat Ponkesdes Sumberanyar Kec Jatibanteng (DBHCHT)	Ponkesdes Sumberanyar	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		275,520,000
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi Pustu Sumberanyar Mlandingan (DBHCHT)	Pustu Sumberanyar Mlandingan	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Rehabilitasi Pustu Sumberanyar Mlandingan (DBHCHT)	Pustu Sumberanyar Mlandingan	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		275,520,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Penurunan Faktor Resiko PTM (DBHCHT)		Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Penurunan Faktor Resiko PTM (DBHCHT)		Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		637,125,000
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Ambulance Rujukan (DBHCHT)		Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Ambulance Rujukan (DBHCHT)		Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		900,000,000
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan untuk 3 Puskesmas Baru (DBHCHT)	3 Puskesmas Baru	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan untuk 3 Puskesmas Baru (DBHCHT)	3 Puskesmas Baru	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		1,739,429,500
	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana&Prasarana Fasilitas Kesehatan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan melalui Pembangunan Ponkesdes Kayumas Kec Arjasa (DBHCHT)	Ponkesdes Kayumas	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana&Prasarana Fasilitas Kesehatan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan melalui Pembangunan Ponkesdes Kayumas Kec Ariasa (DBHCHT)	Ponkesdes Kayumas	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		472,317,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	RENJA (Rp)
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Perante Kec Asembagus (DBHCHT	Ponkesdes Perante	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Perante Kec Asembagus (DBHCHT	Ponkesdes Perante	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		393,600,000
	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Tanah Merah Kec Arjasa	Ponkesdes Tanah Merah	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki			Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Melalui Pembangunan Ponkesdes Tanah Merah Kec Arjasa	Ponkesdes Tanah Merah	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki		393,600,000